

REFLEKSI 5 TAHUN OTONOMI AWARDS

Hasil Monitoring dan Evaluasi
Kinerja Kabupaten/Kota
di Sulawesi Selatan 2013

REFLEKSI 5 TAHUN OTONOMI AWARDS

Hasil Monitoring dan Evaluasi
Kinerja Kabupaten/Kota
di Sulawesi Selatan 2013

Diterbitkan Atas Kerjasama:



Metamorfosa
Inovasi Daerah
Hasil Monitoring dan Evaluasi
Kinerja Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan
untuk Otonomi Awards 2013

Penulis	Erniwati, Nurdin Tappa, A. Mattingaragau T., Dasman, A. Risdawati AP, Ihsanul Amri, Abd. Hafid
Editor	Sukriansyah S. Latief, Muhammad Yusuf AR
Cover Design & Penata Letak	Rahma WR
Desain Grafik	Norman
Penerbit	The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO)
Alamat Penerbit	Graha Pena Lt.4, Jl Urip Sumoharjo No.20, Makassar Telp. (0411)-3661928, Fax. (0411)-3661923

Terbitan Pertama, September 2013
xv+182 halaman; 15,5 x 23 cm
ISBN: 978-602-95604-6-4

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang
All rights reserved

Kata Pengantar

Assalamu Alaikum Wr Wb

Syukur Alhamdulillah, The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) berhasil menyusun buku ke enam di tahun kelima usia FIPO. Sebagaimana lima buku yang diterbitkan sebelumnya, buku ini berisi laporan hasil monitoring dan evaluasi (monev) atas inovasi program 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Dalam buku ini, tim penulis memaparkan secara lengkap temuan inovasi-inovasi program dalam bidang layanan pendidikan, kesehatan, administrasi dan perizinan. Termasuk inovasi bidang partisipasi publik, akuntabilitas, pemberdayaan ekonomi lokal, pemerataan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi.

Di edisi ini, kami menyajikan satu poin laporan penilaian dengan kategori yang bersifat khusus. Yaitu bidang sanitasi dan air minum. FIPO dengan dukungan Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene (IUWASH), melakukan pengamatan, penilaian dan evaluasi terhadap kondisi sanitasi dan layanan air minum di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Terkait dengan air minum, maka objeknya adalah perusahaan daerah air minum (PDAM) selaku pengelola air minum di daerah. FIPO membedah PDAM. Bukan saja terkait kualitas air minum yang dialirkan ke rumah-rumah warga tetapi juga bentuk-bentuk layanan lain yang dapat diberikan. Seperti kemudahan akses dan keterlibatan masyarakat yang bersifat interaktif.

Internal pengelolaan PDAM turut menjadi bagian penting yang dimonitor dan dievaluasi. Tim monev FIPO meneliti keterlibatan kelompok masyarakat sipil yang memberikan umpan balik pelayanan atas kinerja PDAM hingga restrukturisasi utang.

Temuan-temuan itu disajikan secara lengkap dengan harapan dapat menjadi referensi bagi daerah peraih Otonomi Awards untuk makin meningkatkan kualitas program menuju kesejahteraan masyarakat. Dan bagi kabupaten/kota yang belum berhasil meraih awards dapat menjadi semangat untuk merefleksikan hal-hal luar biasa yang dilakukan kabupaten/kota pemenang di tengah kebebasan berkembang.

Wassalamu Alaikum Wr Wb

Makassar, Januari 2014
The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO)



ERNIWATI

Direktur Eksekutif

Sambutan Direktur Utama Media Fajar Koran

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas terbitnya buku ketujuh yang disusun tim The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO). Buku yang berisi analisa keberhasilan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan ini, merupakan rangkaian kegiatan monitor dan evaluasi (monev) dan malam Otonomi Awards 2013.

Saya mengapresiasi komitmen FIPO dan konsistensinya dalam melakukan monev. Sikap jujur dan independen dalam memberikan penilaian merupakan suatu kebanggaan bagi PT Media Fajar Koran yang menaungi FIPO.

Lembaga non profit yang tahun ini memasuki usia enam tahun, mampu menunjukkan kerja-kerja baik pemerintah di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dalam menyusun program-program yang inovatif. Prestasi-prestasi itu patut diapresiasi. Dan FIPO mengambil peran itu.

Saya juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada pemerintah daerah yang memberikan kemudahan bagi peneliti FIPO untuk mendapat informasi dan data program pembangunan. Keterbukaan dan transparansi data sangat mendukung kerja monev peneliti.

Terimakasih juga kepada USAID Kinerja, IUWASH, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, PT Semen Tonasa, Pelindo, Sony Taylor dan Telkom yang telah memberikan dukungan moril dan meteriil mulai pelaksanaan riset hingga malam Otonomi Awards. Semoga dukungan ini terus berlanjut menuju Indonesia yang sejahtera. Amin

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, Januari 2014
PT Media Fajar Koran



H Agus Salim Alwi Hamu
Direktur Utama

Sambutan USAID Mission Director

USAID Indonesia telah mendukung Pemerintah Indonesia sejak tahun 1950 melalui program-programnya di bidang yang menjadi prioritas bagi Pemerintah Indonesia. Dalam lima tahun terakhir ini, program bantuan USAID di Indonesia difokuskan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia dan mitigasi ancaman global melalui pelaksanaan beberapa pilar program seperti: 1) Pertumbuhan Ekonomi; 2) Kesehatan; 3) Lingkungan; 4) Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan; dan 5) Bantuan Kemanusiaan untuk Daerah Bencana. Pelaksanaan program-program ini dilakukan di bawah payung Kemitraan Komprehensif yang ditandatangani oleh Presiden Barack Obama dan Presiden Susilo Bambang Yudoyono.

Program-program yang dilakukan oleh USAID Indonesia selalu mendukung fokus fokus pemerintah daerah sehingga senantiasa dilakukan melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Selain itu juga menjalin kemitraan dengan Kelompok Masyarakat Sipil, termasuk LSM, universitas dan kelompok masyarakat serta pihak swasta. Kerjasama kemitraan ini dilakukan di beberapa bidang yang mendukung perbaikan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia seperti misalnya, pendidikan, kesehatan, akses air minum dan sanitasi, perbaikan lingkungan serta bidang-bidang yang mendukung pertumbuhan ekonomi, demokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan lingkungan yang mendukung.

Kerjasama Program USAID IUWASH dan KINERJA dengan The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) dalam pemberian Otonomi Awards kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu contoh kemitraan yang komprehensif dan nyata di tingkat lapangan untuk mendukung perbaikan kinerja Pemerintah Daerah. Komitmen untuk memperkuat aspek tata kelola pemerintahan tidak dapat dipisahkan dengan sektor teknis yang akan diperbaiki. Dengan demikian, kerjasama ini merupakan salah satu cerita sukses bagi USAID Indonesia dalam memberikan dukungan terhadap peningkatan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.

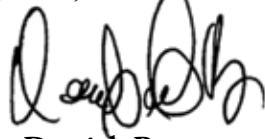
Otonomi Awards yang diberikan FIPO kepada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, tidak hanya diberikan kepada mitra USAID IUWASH atau USAID KINERJA tetapi juga diberikan kepada Pemerintah Daerah yang benar-benar telah berhasil menunjukkan inovasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah. Proses kegiatan monitoring dan evaluasi melalui Otonomi Awards dirancang bersama-sama dengan keterlibatan penuh dari USAID IUWASH dan KINERJA sehingga parameter yang dikembangkan benar-benar memenuhi indikator yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang penilaian. Upaya ini diharapkan menjadi landasan kuat untuk keberlanjutan program-program yang sudah didukung oleh USAID IUWASH dan USAID KINERJA. Aspek keberlanjutan menjadi hal terpenting untuk menilai keberhasilan program di masa mendatang.

Untuk Lima Tahun ke Depan, USAID Indonesia masih menjadikan aspek tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas serta aspek peningkatan layanan dasar bagi masyarakat sebagai fokus program. Dukungan terhadap

Pemerintah Daerah di kedua aspek ini merupakan upaya USAID untuk mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mendukung transparansi Pemerintah Indonesia dan upaya meningkatkan akuntabilitas di tingkat nasional. Selain bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, USAID Indonesia juga akan melakukan peningkatan kapasitas lembaga lokal termasuk peningkatan partisipasi warga negara serta pihak swasta. Melalui penerapan strategi ini, dalam lima tahun kedepan, USAID akan menjadi co-partner bagi institusi lokal dan tidak lagi menjadi sponsor utama dalam pelaksanaan program-program. Strategi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kemauan Indonesia untuk memimpin inisiatif pelaksanaan program di berbagai sektor dan memobilisasi sumber daya keuangan untuk menjalankan program-program pembangunan. Pertimbangan ini akan mampu menghasilkan keberlanjutan dampak program pembangunan.

Akhirnya, saya berharap kemitraan ini dapat terus dilanjutkan untuk mendukung keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya masing-masing. Ke depan, USAID Indonesia akan terus berkomitmen untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera.

Jakarta, Februari 2014



Derrick Brown

Acting USAID Mission Director

Sambutan Chief of Party KINERJA-USAID

Sejak 2012, KINERJA - USAID sangat mendukung pelaksanaan *Otonomi Awards* yang dilakukan *Fajar Institute Pro-Otonomi* (FIPO) bersama *The Jawa Post Institute of Pro-Otonomi*, JPIP. Sebagai lembaga yang dilahirkan untuk menjaga dan mendorong implementasi otonomi daerah secara baik, FIPO berkepentingan untuk menciptakan proses rekonstruksi desentralisasi dan otonomi daerah secara obyektif. Salah satu cara terbaik adalah dengan membuka ruang diskursus yang memadai dan menginformasikan secara luas sejumlah praktik baik (*best practices*) otonomi daerah.

KINERJA sangat mengapresiasi berbagai upaya FIPO sebagai organisasi nirlaba yang bersifat independen untuk secara konsisten memantau pelaksanaan otonomi daerah. Hingga saat ini, FIPO telah berhasil menjalankan aktivitas monitoring dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan *Otonomi Awards* yang meliputi 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. 2013 menjadi tahun kelima penganugerahan *Otonomi Awards* oleh FIPO.

Untuk memberikan dampak kompetitif, FIPO mempublikasikan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkala pada setiap pelaksanaan *Otonomi Awards*. Penilaian ini didasarkan kepada tiga parameter utama, yaitu perkembangan ekonomi, pelayanan publik, dan kinerja politik lokal. Juga, parameter khusus lingkungan hidup dan sanitasi total berbasis masyarakat.

Untuk mereka yang belum begitu mengenal KINERJA, maka perkenankanlah saya memberikan deskripsi singkat terkait KINERJA. KINERJA adalah program kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID-Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di Indonesia. Program KINERJA dilaksanakan di lima provinsi di Indonesia: Aceh, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Papua. Program KINERJA-USAID difokuskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tiga sektor yaitu sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan iklim usaha.

Salah satu pendekatan utama yang digunakan KINERJA adalah mendorong adanya replikasi praktik-praktik baik. Karena pendekatan ini sangatlah sejalan dengan FIPO, KINERJA mendukung pelaksanaan *Otonomi Awards* di Sulawesi Selatan dan juga dua provinsi wilayah program KINERJA lainnya, yaitu: Jawa Timur dan Kalimantan Barat.

Akhir kata, saya ucapkan selamat atas terbitnya buku ini dan semoga dapat menjadi wadah pembelajaran dan tukar-pikiran bersama terkait praktik-praktik baik dan inovatif yang telah dilakukan berbagai pemerintah daerah di Sulawesi Selatan yang telah meraih penghargaan *Otonomi Awards* 2013.

Selamat dan sukses selalu untuk FIPO! Terima kasih.

Terima kasih

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elke Rapp', written in a cursive style.

Elke Rapp

Chief of Party KINERJA - USAID

Daftar Isi

Kata Pengantar Direktur Eksekutif FIPO	v
Sambutan Direktur Utama Media Fajar Koran	vi
Sambutan USAID Mission Director	vii
Sambutan Chief of Party KINERJA-USAID	ix
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Grafik	xv
 Bab 1. Pendahuluan	 1
■ Landasan Filosofi Program	2
■ Metodologi	7
 Bab 2. Refleksi Otda di Sulawesi Selatan dalam Lima Tahun Monev FIPO	 17
■ Kemajuan Berkebebasan	18
■ Refleksi Inovasi Daerah	24
■ Keterbukaan dan Transparansi	30
■ Pelayanan Publik	34
 Bab 3. Catatan Singkat Kemenangan Daerah	 53
■ Otonomi Awards Untuk Daerah Terbaik	54
■ Ranking dan Peraih Otonomi Awards 2013	59
 Bab 4. Praktik Cerdas Otonomi Awards 2013	 105
■ Membangun Infrastruktur Pendorong Pertumbuhan Ekonomi	106
■ Tak ada Bank, LKM Pun Jadi	109
■ Showroom Sapi Sejahterahkan Peternak	112
■ Tuntas Tuna Calistung Dongkrak IPM Sidrap	115
■ Komisi Penanggulangan AIDS Mandiri	118
■ Perizinan Terpadu yang tidak Berliku	122
■ Dorong Pembangunan Melalui Warung Demokrasi	125
■ Transparansi Dokumen Publik Secara Online	128
■ Mengubah Air Mata Menjadi Mata Air	131
■ Madu Baebunta, Dorong Peningkatan Ekonomi Petani	134
 Bab 5. Parameter Khusus	 137
■ Parameter Khusus	138
■ Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Sistem IPAL Komunal	149
■ 'Bersama' PDAM, Air Bersih untuk Semua	156
 Bab 6. Penutup	 159
■ Catatan Kegiatan Penelitian dan Survei Publik 2013	160
■ Seminar Nasional	163
■ Penganugrahan Otonomi Awards FIPO 2013	174
■ Tentang Penulis	178

Daftar Tabel

1. Tingkatan Inovasi Program Pembangunan Pemerintah Daerah	9
2. Parameter Kehidupan Ekonomi	13
3. Parameter Pelayanan Publik	14
4. Parameter Performa Politik Lokal	16
5. <i>Nominee</i> dan Peraih OA 2013 Parameter Kehidupan Ekonomi Lokal	56
6. <i>Nominee</i> dan Peraih OA 2013 Parameter Layanan Publik	57
7. <i>Nominee</i> dan Peraih OA 2013 Parameter Performa Politik Lokal	57
8. <i>Nominee</i> dan Peraih OA 2013 Parameter Khusus	58
9. <i>Nominee</i> dan Peraih OA 2013 Parameter Inspiratif/Unik	58
10. Peraih Otonomi Awards 2013	58
11. Pertumbuhan Ekonomi	64
12. Pemerataan Ekonomi	70
13. Pemberdayaan Ekonomi	76
14. Layanan Publik	81
15. Layanan Kesehatan	86
16. Layanan Administrasi Kependudukan dan Perizinan	91
17. Performa Politik lokal Partisipasi Publik	97
18. Akuntabilitas Publik	103

Daftar Grafik

1. Otonomi Awards 2013 Kategori Pertumbuhan Ekonomi	65
2. Otonomi Awards 2013 Kategori Pemerataan Ekonomi	71
3. Otonomi Awards 2013 Kategori Pemberdayaan Ekonomi	77
4. Otonomi Awards 2013 Kategori Layanan Pendidikan	82
5. Otonomi Awards 2013 Kategori Layanan Kesehatan	87
6. Otonomi Awards 2013 Kategori Layanan Administrasi Kependudukan dan Perizinan	92
7. Otonomi Awards 2013 Kategori Partisipasi Publik	98
8. Otonomi Awards 2013 Kategori Akuntabilitas Publik	104

Bab 1

Pendahuluan



Landasan Filosofi Program

Inovasi, Kemajuan Otonomi Daerah

Dalam ruang otonomi yang makin bebas, ditandai dengan pelimpahan kewenangan dan penyerahan urusan yang luas, sedikit banyak telah mendorong daerah untuk merestorasi pola pembangunan agar terus bergerak maju dan berkembang. Pola konvensional dan sektoral yang terbukti tak ampuh menjadi konstruksi kemajuan, sudah sepatutnya didesain dan dikembangkan ulang. Kerangka dasar pembangunan sudah seharusnya dikonstruksi dengan desain inovatif, holistik serta berciri interkoneksi agar menjadi pijakan sekaligus katalisator kemajuan.

Program dengan ide cerdas, kerja kreatif, partisipatif dan berkesinambungan adalah sebuah keharusan dalam kerangka otonomi. Karenanya komposisi program inovatif harus berbanding lurus dengan kewenangan yang makin besar. Idealnya, dengan kebebasan yang dilimpahkan maka tujuan kemajuan akan berjalan beriringan. Inilah cita-cita mulia otonomi daerah, menjadi jalan tengah yang membawa ranah kebebasan seiring sejalan dengan kemajuan yang didambakan.

Mengapa inovasi sesuatu yang penting dalam otonomi? Sebab inovasi merupakan cara baru dalam praktik tata kelola pemerintahan. Inovasi yang merupakan daya guna segala potensi dalam mengatasi masalah dengan cara cerdas, kreatif, dan berkesinambungan adalah gambaran kemajuan yang terupaya secara bebas. Menilai kemajuan otonomi dalam ukuran inovasi, berarti menilai seberapa jauh kebebasan yang dimiliki daerah mampu mendorong munculnya program, kebijakan serta gagasan lokal yang cerdas dalam menyiasati segala keterbatasan dengan mengoptimalkan segala bentuk keunggulan yang dimiliki daerah. Dengan kata lain, inovasi merupakan tolok ukur paling efektif menilai kemajuan.

Kemajuan itu pada dasarnya harus dikabarkan, sebagai motivasi dan penghargaan bagi mereka yang berbuat agar menjadi pelecut semangat untuk berbuat lebih. Selain itu, pemberitaan program inovatif sekaligus sebagai diseminasi informasi bagi yang belum berbuat, agar menjadi motivasi untuk terus maju berkembang. Diseminasi informasi juga menjadi pembanding, dimana otonomi tidak melulu menghadirkan berita kemerosotan pembangunan daerah. Otonomi dengan segala kelebihan dan kekurangannya telah menjadi pintu gerbang kemajuan dengan lahirnya beragam program inovatif dari daerah.

Program inovasi yang selama ini masih terkebiri dengan massifnya pemberitaan negatif tentang pemerintah daerah, harus mendapat penjelasan sekaligus praktik nyata. Di tengah zaman yang berkembang melesat dari perkiraan, pemberitaan kemajuan memerlukan wadah yang berimbang.

The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) memiliki posisi strategis mengambil peran untuk ikut serta menjadi salah satu corong penyampai kemajuan kabupaten/kota. Hal ini karena, FIPO terbentuk atas prakarsa Harian Fajar sebagai pelopor media surat kabar terbesar di Sulawesi Selatan (Sulsel). Melalui medium Otonomi Awards (OA) program inovasi daerah di Sulsel diapresiasi secara proporsional dan disebarluaskan dengan harapan mampu memotivasi, menginspirasi, dan memacu kreasi serta inovasi yang lebih baik.

Otonomi Awards lahir, diinisiasi dengan optimisme bahwa keberhasilan pembangunan dicapai melalui karya kreatif dan inovatif, dilandasi pondasi bahwa setiap proses keberhasilan pembangunan itu mutlak untuk terus dikabarkan. Otonomi Awards sebagai sebuah rekayasa sosial hadir sebagai suplemen penyeimbang akan kemajuan-kemajuan daerah, terlebih inovasi merupakan sebuah terobosan. Terobosan yang menggambarkan paduan kreativitas dan kecerdasan untuk keluar dari masalah yang dihadapi, baik karena masalah keterbatasan sarana ataupun kecenderungan keluar dari kungkungan program yang biasa-biasa saja. Mengabarkan kemajuan melalui

medium festival inovasi, akan meminimalkan distorsi informasi kemajuan daerah yang sering dipandang sebelah mata.

Inovasi, Festival Para Pemenang

Otonomi Awards hadir sebagai stimulan daerah agar mengembangkan karya kreasinya. Inilah mengapa metode yang diusung adalah kompetisi. Daerah diarahkan untuk terus berkembang dengan menempatkan dalam ruang yang beratmosfer persaingan. Bukankah sudah menjadi siklus hidup, bahwa dengan persaingan (yang berlandas norma-norma positif tentunya) akan menumbuhkan semangat belajar dan bergerak maju yang lebih terbuka dan progresif.

Ruang yang dikonstruksi The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) lebih dari sekadar perlombaan. Sebuah festival tepatnya. Otonomi Awards adalah festival bagi penyelenggara pemerintahan daerah pada 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Festival untuk memberikan rewards atas upaya dan kinerja yang telah dicapai kabupaten/kota. Dikategorikan festival karena menjadi ajang pertemuan seluruh bupati/wali kota dan para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) se-Sulsel.

Ajang yang menghadirkan lebih dari iklim kompetitif semata, karena juga membawa daerah dalam ranah kebersamaan yang dilandasi semangat berkemajuan. Semangat mengkomunikasikan kemajuan satu sama lain. Semangat yang membawa daerah menjadi pembelajar. Oleh karenanya, pada dasarnya setiap daerah yang berpartisipasi adalah para pemenang.

Otonomi Awards memang ditujukan tidak hanya sebagai ruang munculnya beragam inovasi, akan tetapi juga mengarahkan agar tercipta diskursus antar sesama pelaku pembangunan. Pertukaran informasi, transfer pengetahuan dan terciptanya efek penularan yang dianggap baik adalah substansi dari setiap rangkaian kegiatan. Terlebih jika terjadi penumbuhkembangan program menjadi sesuatu yang lebih baik.

Monitoring dan Evaluasi Otonomi Daerah

Program utama Otonomi Awards adalah monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan otonomi dan kemajuan daerah. Ini bukan monev biasa karena pemeringkatan yang dilakukan bukan semata untuk mendapatkan daerah yang berhasil atau yang belum berhasil meraih trofi. Lebih dari itu, Otonomi Awards adalah suatu cara memantau pelaksanaan otonomi khususnya yang terkait dengan perencanaan, pembahasan, dan pelaksanaan program pemerintah daerah.

Esensi monev adalah sebagai masukan demi menyempurnakan program atau kegiatan yang sedang berlangsung. Bagi para pengambil kebijakan, hasil monev akan menjadi gambaran pencapaian atas kerja keras mereka dan menjadi masukan yang berharga untuk perbaikan dan penyempurnaan program-programnya. Dengan demikian, keberadaan monev sangat penting karena menyediakan informasi yang relevan bagi para pembuat kebijakan (*policy makers*) tentang suatu program baik dari sisi kualitas operasional dan efektivitas anggaran maupun sisi potensi pengembangan di masa yang akan datang.

Dalam konteks implementasi otonomi daerah, monev dilakukan untuk menilai sejauh mana konsep tersebut dijalankan secara baik oleh kabupaten/kota sebagai lokus otonomi daerah. Pemantauan ini akan mencari tahu bagaimana pemerintah daerah menerjemahkan otonomi bukan semata dari tafsir konvensional bahwa otonomi adalah kewenangan politik. Monev dalam kegiatan Otonomi Awards FIPO akan menggali pemahaman pemerintah daerah tentang otonomi sebagai kewenangan administrasi daerah untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan sendiri.

Objek monev FIPO kaitannya dengan kinerja pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi daerah adalah segala bentuk kebijakan dan program yang sedang berlangsung. Misalnya, apakah program layanan publik telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat, apakah pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan program, atau apakah pemerintah daerah dalam merencanakan program berupaya memaksimalkan potensi yang dimiliki, baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia.

Karena itu untuk mendapatkan hasil maksimal yang akan mendorong perbaikan implementasi otonomi daerah di Indonesia, lebih khusus lagi di Sulawesi Selatan, maka metodologi monev yang digunakan juga harus menilai persepsi masyarakat sebagai penerima manfaat dari otonomi daerah. Secara substantif, pelibatan masyarakat untuk menilai program pemerintah daerah memiliki efek ganda seperti munculnya kepedulian dan daya kritis masyarakat untuk terlibat secara aktif mengajukan, melaksanakan, dan mengawasi suatu program. Sikap proaktif masyarakat tersebut tentu saja akan memengaruhi budaya kerja penyelenggara pemerintahan daerah untuk lebih bertanggung jawab.

Monev FIPO mengembangkan sistem monitoring evaluasi kompetitif partisipatif atau disingkat Simonev Komparatif. Kata komparatif untuk menjelaskan bahwa sistem ini menilai banyak entitas yang satu sama lain diperbandingkan untuk mendapatkan yang terbaik. Oleh karena itu, Otonomi Awards yang dilaksanakan FIPO dikemas sedemikian rupa untuk menjadi

ajang kompetisi bagi penyelenggara pemerintah kabupaten/kota, sedangkan partisipatif berarti masyarakat dilibatkan dalam memberikan penilaian.

Desain Otonomi Awards memang secara sengaja dirancang agar tumbuh sikap inovatif dari masyarakat dan pemerintah. Dengan memberikan ruang bebas untuk seluruh kabupaten dan kota untuk berkompetisi dalam ajang ini secara otomatis merangsang berkembangnya gagasan-gagasan baru di kabupaten dan kota. Namun demikian, dengan sistem monev kompetitif-partisipatif yang digunakan niscaya tidak akan melahirkan para pemenang trofi yang cepat berpuas diri, juga tidak akan melemahkan daerah yang belum berhasil meraih trofi. Dalam sistem ini, setiap daerah yang sukses meraih trofi akan terus didorong melakukan inovasi program dalam rangka mempertahankan prestasi sebelumnya. Sedangkan yang belum berhasil juga akan dimotivasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan program. (*)

Metodologi

The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) dibentuk untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota melalui penganugerahan Otonomi Awards. Layaknya pemberi penghargaan lainnya, FIPO dalam menentukan nilai akhir dan ranking kabupaten/kota peraih Otonomi Awards (OA) menggunakan metode atau acuan yang telah didesain berdasarkan porsi penilaian.

Pelaksanaan penilaian OA melalui monev terdiri atas beberapa tahapan yang mesti dilakukan, mulai dari pencarian program inovasi hingga perankingan. Tahapan-tahapan tersebut merupakan proses berkesinambungan yang saling berkaitan satu sama lain dan merupakan bagian yang terintegrasi dalam satu bagian sistem penilaian. Adapun komponen utama penilaian FIPO, yaitu inovasi, survei publik, dan eksisting data. Ketiga komponen inilah yang menjadi dasar penentuan *ranking*.

Inovasi

Otonomi daerah membawa pengaruh mendasar bagi penyelenggaraan pemerintahan. Pengaruh tersebut adalah pada kemandirian dan kebebasan

yang serta merta dalam genggamannya kabupaten/kota.

Kemandirian, terutama kabupaten/kota dengan modalitas kecil, berkonsekuensi pada timbulnya beban penyelenggaraan pemerintahan. Namun, beban yang timbul itu dapat diatasi dengan kebebasan yang dimiliki. Kebebasan akan mendorong kabupaten/kota menyusun program dan kebijakan cerdas berbasis potensi lokal. Sasarannya, program inovatif bisa lahir sehingga kabupaten/kota mampu menyiasati keterbatasan sekaligus keluar dari permasalahan yang dihadapi.

Bagaimana FIPO menemukan program inovasi? Tahap wawancara mendalam (*in-depth interview*) menjadi awal pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berfungsi sebagai pembuka informasi sekaligus pintu masuk untuk mengetahui program-program inovasi daerah. Dikatakan mendalam karena menggali informasi yang sedetail-detailnya melalui informan kunci, seperti bupati/walikota, kepala SKPD, staf, terutama penanggung jawab program daerah. Informasi yang disampaikan harus didukung dokumen-dokumen terkait program itu sendiri. Dokumen dapat meliputi surat keputusan (SK) perancangan program, laporan penganggaran, peraturan daerah, dan data hasil program yang sekaligus sebagai payung hukum dan menjadi pegangan yang valid.

Peneliti FIPO akan berada di daerah selama beberapa hari untuk melakukan penggalian informasi secara mendalam dan menyeluruh. Pengertian mendalam karena peneliti tidak sekadar menggali inovasi program, peneliti juga melakukan verifikasi melalui observasi lapangan atas informasi yang disampaikan para informan. Dilaksanakannya observasi menjadi satu rangkaian informasi yang utuh, baik dari segi latar belakang program, teknis pelaksanaan, hasil, dan yang terpenting kesinambungan program itu sendiri.

Program inovasi yang dipilih untuk diikuti dalam penilaian OA merupakan program yang mempunyai korelasi dengan tiga parameter utama FIPO yakni kehidupan ekonomi, pelayanan publik, dan performa politik lokal. Parameter-parameter tersebut mencakup beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, serta pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan pada parameter kehidupan ekonomi (Tabel.2). Parameter pelayanan publik mencakup indikator layanan pendidikan, layanan kesehatan, serta layanan administrasi kependudukan dan perizinan (Tabel.3). Sedangkan untuk parameter performa politik lokal mencakup indikator partisipasi publik dan akuntabilitas publik (Tabel.4). Masing-masing indikator memiliki isu strategis yang mencerminkan titik berat program.

Selain parameter utama tersebut, pada OA 2013 terdapat dua parameter khusus yakni layanan air minum dan layanan sanitasi. Masalah sanitasi dan air minum adalah masalah global. Dalam tujuan pembangunan milenium 2015

(*millennium development goals*/MDGs) telah ditetapkan salah satu targetnya yakni akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak. Parameter khusus layanan air minum, menitikberatkan pada pengelolaan air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sedangkan pada layanan sanitasi, fokus penilaian FIPO adalah sanitasi air limbah rumah tangga.

Setiap daerah tentunya berupaya untuk menyukseskan tercapainya tujuan tersebut, tidak terkecuali kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. FIPO berupaya membantu Pemerintah Indonesia pada umumnya dan pemerintah kabupaten/kota Sulawesi Selatan pada khususnya meraih kemajuan untuk mencapai target MDGs. Penjelasan lebih detail mengenai parameter khusus ini, dibahas tersendiri pada Bab 5.

Menilai program dari sejumlah indikator dan parameter khusus di atas, dalam kata kunci inovasi tentu memiliki kriteria dan standar tertentu. Dalam bingkai FIPO, terdapat empat tingkatan dan standar inovasi, yaitu kreatif, strategis, produktif, dan berkelanjutan. Artinya, inovasi adalah buah dari proses kreatif yang semakin bermakna jika memiliki nilai strategis, berpotensi produktif serta menjamin keberlanjutan.

Tabel 1.

Tingkatan Inovasi Program Pembangunan Pemerintah Daerah					
Tingkatan Inovasi	Range Nilai	Baik		Baik	
		Ide Cerdas	Implementatif	Efek Jangka Pendek	Efek Jangka Panjang
Kreatif	21-40	V	-	V	-
Strategis	41-60	V	-	V	V
Produktif	61-80	V	V	V	-
Berkelanjutan	81-100	V	V	V	V

Standar inovasi kreatif adalah adanya gagasan yang cerdas meski belum menunjukkan praktik nyata di lapangan, namun berpotensi menghasilkan efek jangka pendek yang positif. Inovasi yang dianggap strategis bila dari segi gagasan tergolong cerdas dan memiliki kemungkinan untuk dikembangkan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, meski demikian masih belum implementatif di lapangan. Inovasi dikatakan produktif karena gagasannya telah dilaksanakan di lapangan sesuai harapan, memberi dampak secara jangka pendek meski belum cukup meyakinkan untuk jangka panjang. Sedangkan inovasi yang berkelanjutan adalah inovasi dengan ide cerdas yang implementatif, tidak hanya berefek jangka pendek tetapi juga jangka panjang.

Survei Publik

Penilaian tidak hanya difokuskan pada program inovasi saja, tetapi juga ingin melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap program daerah. Saat ini survei merupakan alat ukur paling terpercaya untuk memberikan gambaran nyata persepsi masyarakat. Survei publik menjadi bentuk konfirmasi kepada publik/masyarakat atas program yang dijalankan pemerintah daerah.

Dalam bingkai FIPO, publik dilibatkan dalam menentukan nilai program melalui skema survei publik. Alasannya, publik sebagai penerima manfaat langsung tentunya memiliki pandangan yang paling nyata dari program yang dijalankan pemerintah daerah. Jika publik merasa puas, berarti kinerja pemerintah sudah berjalan pada koridor yang semestinya, begitu pula sebaliknya.

Masyarakat yang menjadi responden survei adalah masyarakat kalangan *well-educated* dan *well-informed*. Artinya, mereka yang menjadi responden harus kalangan yang memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup. Jumlah responden adalah 2.400 orang di mana masing-masing kabupaten/kota diwakili 100 responden, berusia minimal 17 tahun, dan dipilih secara purposif. Responden mewakili beragam latar belakang profesi, seperti asosiasi profesi kesehatan dan pendidikan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, mahasiswa dan pelajar, investor/pebisnis/IKM, petani dan nelayan, anggota legislatif/partai politik, serta kelompok perempuan. FIPO tidak melakukan langsung survei publik ini melainkan bekerja sama dalam sebuah kontrak dengan lembaga survei independen. Nilai survei yang dihasilkan lembaga survei tersebut tidak diutak-atik oleh FIPO.

Eksisting Data

Eksisting data merupakan identifikasi data-data sekunder yang dirangkum dalam satu desain yang saling berhubungan. Data-data tersebut meliputi data terkait kategori penilaian, diantaranya:

- a. Data sosial ekonomi meliputi, indeks kesehatan hidup, indeks pendidikan, indeks PPP (daya beli), indeks pembangunan manusia (IPM), persentase kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan perkapita, produk domestik regional bruto (PDRB) baik ADHB maupun ADHK, jumlah koperasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kesempatan kerja.
- b. Data demografi meliputi, luas wilayah, jumlah kecamatan dan desa, serta jumlah penduduk.
- c. Data anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dijabarkan secara rinci.

- Selain itu jumlah dana pendidikan, kesehatan, ekonomi yang terdapat pada tiap-tiap anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di dokumen APBD.
- d. Data Bank Indonesia (BI) terkait data kredit umum, kredit usaha kecil dan mikro, dan tabungan umum.
 - e. Data tenaga kesehatan meliputi, tenaga medis dan paramedis di rumah sakit, puskesmas dan dinas kesehatan.
 - f. Data kategori kesehatan meliputi, angka harapan hidup (AHH), angka kematian bayi (AKB), prevalensi balita kurang gizi, dan persalinan tenaga medis.
 - g. Data pendidikan meliputi, jumlah sekolah, guru, murid pada tingkatan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA.
 - h. Data kategori pendidikan meliputi, jumlah angka partisipasi sekolah (APS) usia 7–12 tahun, 13–15 tahun, 16–18 tahun, dan angka buta huruf/melek huruf umur 10 tahun ke atas.

Beragamnya data sekunder yang diinput dalam satu bagian menjadi satu pengayaan data tersendiri, sehingga memungkinkan untuk melakukan kajian-kajian atau analisis-analisis tertentu. Analisis ini dapat menggambarkan bagaimana upaya daerah dalam pembangunan ekonominya, pengelolaan anggarannya, perbaikan indikator kesehatan dan pendidikan, serta beragam data analisis lainnya.

Ketiga komponen penilaian, yaitu inovasi, survei publik, dan eksisting data digabung dengan memberikan komposisi pembobotan untuk tiap indikator dalam parameter masing-masing. Ketiga komponen nilai mempunyai bobot yang berbeda-beda. Pada tahapan ini sudah dapat diketahui nilai akhir secara keseluruhan peringkat/ranking kabupaten/kota tiap indikator. Nilai tertinggi dari tiap indikator berhak mendapatkan trofi OA.

Proliferasi Inovasi

Program inovasi akan mendapatkan apresiasi tertinggi bila menjamin adanya asas manfaat bagi masyarakat, menjamin adanya kolaborasi seluruh stakeholders pembangunan, dan menjamin adanya kesinambungan program. Khusus menyangkut jaminan kesinambungan program, FIPO memiliki alat ukur untuk melihat konsisten dan perkembangan program dari waktu ke waktu. Alat ukur tersebut berada dalam bingkai proliferasi inovasi. Kurun waktu yang menjadi standar penilaian proliferasi inovasi adalah satu tahun. Artinya, program baru yang ditambahkan pada program yang telah ada hanya bisa dinilai jika program baru (proliferasi) tersebut telah berlangsung/berjalan selama satu tahun.

Proliferasi inovasi adalah pengembangbiakan inovasi. Artinya, inovasi yang sudah ada menjadi semakin berkembang, baik berkembang karena mengalami ekstensifikasi, developmentasi, diferensiasi, maupun diseminasi.

Ekstensifikasi diartikan adanya inovasi baru dalam program yang sama. Fokus dari upaya ekstensifikasi yakni pada pengembangan secara kuantitatif suatu program inovasi. Contohnya, program layanan jemputan pasien secara gratis selama 24 jam. Program ini dianggap terdapat inovasi tambahan/baru secara kuantitatif jika pasien cukup melakukan panggilan melalui call center yang dapat diakses secara gratis pula.

Developmentasi adalah peningkatan kualitas terobosan pada inovasi yang ada. Dalam hal ini penambahan inovasi baru atas inovasi yang telah ada tidak lagi pada kuantitas tetapi kualitas. Contohnya, program layanan jemputan pasien secara gratis selama 24 jam dikatakan mengalami penambahan program secara kualitas bila pasien, khususnya pasien yang trauma dengan suasana rumah sakit, dimungkinkan dirawat di rumah. Nilai inovasinya pada adanya kesamaan kualitas perawatan di rumah dan di rumah sakit. Misalnya, dokter melakukan kontrol rutin bagi pasien di rumah.

Diferensiasi yakni adanya program inovasi berbeda yang ditambahkan pada program yang telah ada. Contohnya, program layanan jemputan pasien secara gratis 24 jam dinilai mengalami diferensiasi jika Dinas Kesehatan sebagai leading sector program ini menggandeng Dinas Sosial, misalnya, dengan program pemberian bantuan bagi pasien dari keluarga miskin. Dalam banyak kasus, bila kepala keluarga (suami) yang sakit maka ekonomi keluarga dapat terganggu. Untuk mengatasi masalah dan gangguan secara ekonomi tersebut, maka bantuan dari Dinas Sosial akan sangat membantu.

Diseminasi/replikasi diartikan timbulnya efek menular dan efek berganda dari suatu program inovasi bagi wilayah/daerah lain. Program layanan jemputan pasien secara gratis 24 jam awalnya hanya mencakup wilayah perkotaan saja, dikatakan memiliki efek berganda jika pada perkembangan selanjutnya juga meliputi wilayah pedesaan. Atau, bisa juga program ini mulanya dijalankan oleh kabupaten A, kemudian kabupaten B tertarik mereplikasi kemudian menjalankan program yang sama. (*)

TABEL 2
PARAMETER KEHIDUPAN EKONOMI

Parameter	Indikator	Isu Strategis	Penekanan
KEHIDUPAN EKONOMI 	Pertumbuhan Ekonomi 	Pendapatan Daerah dan Masyarakat	Apakah pendapatan daerah juga diikuti dengan pertumbuhan PDRB dan pendapatan perkapita penduduk.
		Investasi	Apakah pertumbuhan investasi atau industri berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas.
		Kesempatan Kerja	Apakah kebijakan pertumbuhan ekonomi yang terjadi juga berkorelasi dengan meningkatnya kesempatan kerja.
		Suprastruktur – Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Sejauh mana memenuhi aspek kreatif, strategis, produktif dan sustainable, proyek pengembangan maupun pembangunan pusat pertumbuhan baru bagi perdagangan, industri dan jasa. Ketersediaan infrastruktur penunjang perekonomian seperti pelabuhan laut, bandar udara, ketersediaan fasilitas pergudangan, dan jaringan distribusi dan transportasi yang lancar.
	Pemerataan Ekonomi 	Distribusi Pendapatan	Sejauh mana pendapatan terdistribusi secara merata diantara kelompok-kelompok masyarakat (kebijakan penataan penciptaan kesempatan yang sama bagi usaha sektor formal maupun sektor nonformal).
		Akses Modal	Seberapa jauh masyarakat dari kelas sosial yang berbeda mendapatkan kemudahan akses bagi permodalan.
		Sarana Prasarana	Seberapa jauh upaya pemerintah kabupaten/kota mengatasi kesenjangan kemampuan usaha masyarakat akibat perbedaan ketersediaan sarana prasarana penunjang perekonomian.
	Pemberdayaan Ekonomi & Pengentasan Kemiskinan 	Potensi dan Problem Ekonomi Lokal	Menggali, mengembangkan, dan memberdayakan potensi/sentra ekonomi guna mengatasi problematika ekonomi lokal.
		Ekonomi Lemah dan Ekonomi Lokal	Mengatasi problem yang dialami pelaku ekonomi lokal yang memiliki keterbatasan penguasaan faktor-faktor produksi yang merupakan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM). Hal ini menyangkut pembekalan teknis keahlian, keterampilan, manajerial, akses pasar modal dan kemitraan usaha.
		Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Lokal	Pendirian atau pemberdayaan terhadap koperasi, lumbung desa, badan usaha milik desa, maupun institusi kolektif ekonomi lokal lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.
		Kapasitas Ekonomi Rakyat	Peningkatan kapasitas ekonomi rakyat yaitu peningkatan kemampuan produksi ekonomi rakyat lokal secara umum, atas mata pencaharian yang digelutinya, dengan berbagai fasilitas penunjang ekonomi lokal.

TABEL 3

PARAMETER PELAYANAN PUBLIK

Parameter	Indikator	Isu Strategis	Penekanan
PELAYANAN PUBLIK 	Layanan Pendidikan 	Aksesibilitas (murah, mudah, terjangkau dan merata)	Bagaimana pemerintah memberikan kesempatan yang sama atas pendidikan yang layak bagi seluruh warganya di semua wilayah yang ada. Pendidikan adalah hak dasar bagi setiap warga di negeri ini. Karenanya ketersediaan kebutuhan sarana prasarana pendidikan yang terjangkau, murah, berkualitas menjadi sangat bernilai artinya.
		Ketercukupan SDM, Sarana, Prasarana Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio tenaga pendidik dengan mengukur seberapa besar intensitas interaksi personal guru dan murid yang akan mempengaruhi kualitas proses belajar mengajar. • Rasio sarana dan prasarana, lebih melihat ketersediaan penunjang pendidikan dilihat dari sisi keterjangkauan dan pemerataan secara geografis kependudukan. Disisi lain, besaran anggaran pendidikan akan mencerminkan komitmen nyata pemerintah dalam menjalankan pelayanan pendidikan bagi masyarakatnya.
		Managemen dan Sistem Pendidikan (Quality)	Bagaimana upaya pemerintah kabupaten/kota menciptakan mekanisme pendidikan yang memiliki out put berdaya saing tinggi yang dapat mengakomodasi kecerdasan lokal. Di banyak daerah umumnya menggagas program sekolah plus, kelas akselerasi, atau pun sekolah unggulan.
		Komitmen Anggaran Pendidikan Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan	Alokasi anggaran pendidikan melalui APBD atau melalui sumber dari pendanaan lain. Pemerintah pusat telah mengubah sistem pendidikan dengan menawarkan pola yang lebih aspiratif seperti Manajemen Berbasis Sekolah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan sebagainya. Oleh sebab itu, pemerintah daerah semestinya mengapresiasikannya.
	Layanan Kesehatan 	Aksesibilitas (murah, mudah, terjangkau dan merata)	Apakah pemerintah kabupaten/kota berhasil memunculkan serangkaian inisiatif dan terobosan inovatif untuk membuat ketersediaan layanan yang semakin murah, mudah, terjangkau dan merata.
		Ketercukupan SDM, Sarana, Prasarana	Kebijakan dan strategi pemerintah kabupaten/ kota dalam mengatasi problem ketersediaan tenaga medis dan paramedis, sarana dan prasarana kesehatan, jaminan kesehatan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan.
		Sistem Perlindungan Kesehatan	Jaminan kesehatan masyarakat terutama kalangan bawah masih terbebani mahalnnya biaya kesehatan.
		Komitmen Anggaran Kesehatan	Komitmen anggaran di bidang kesehatan sedikit banyak bisa mencerminkan bantuan bagi masyarakatnya.
		Partisipasi Penyelenggaraan Layanan Kesehatan	Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan tentu banyak inovasi yang bisa ditampilkan pemerintah daerah. Sebagai contoh, optimalisasi sistem informasi kesehatan maupun optimalisasi sarana prasarana kesehatan bisa memunculkan varian inovasi yang ujungnya berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Parameter	Indikator	Isu Strategis	Penekanan
	<p>Layanan Administrasi Kependudukan dan Perizinan</p> 	<p>Aksesibilitas Layanan (cepat, mudah, murah, efektivitas, efisiensi)</p> <p>Jaminan Keadilan dan Sistem Pelayanan</p>	<p>Apakah program memunculkan serangkaian terobosan inovatif untuk membuat layanan administratif semakin cepat, mudah, dan murah.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Bagaimana jaminan keadilan akses pelayanan? Adakah jaminan transparansi yang terbebas dari distorsi pelayanan oleh birokrasi? ● Sejumlah langkah yang dilakukan pemda untuk membangun sustainability perubahan pelayanan administrasi publik. (a) langkah teknis, yaitu upaya menjaga kesinambungan perubahan pelayanan dari sisi keandalan teknis pelayanan administrasi dasar, baik untuk SDM yang menjalankannya maupun dari sisi fasilitas. (b) langkah customer input sustainability, berupa upaya pemda untuk tetap mempertahankan jumlah masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi dasar. (c) langkah yuridis, yaitu upaya pemda menjaga sustainability perubahan melalui dikeluarkannya produk hukum daerah untuk menjamin langkah teknis, maupun langkah customer input. (d) financial sustainability, yaitu upaya pemda untuk konsisten memberikan dukungan anggaran untuk menjalankan perubahan layanan.

TABEL 4

PARAMETER PERFORMA POLITIK LOKAL

Parameter	Indikator	Isu Strategis	Penekanan
PERFORMA POLITIK LOKAL 	Partisipasi Publik 	Proses Pembangunan (perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi)	Partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan menyoroti inisiatif program pemerintah yang secara aktif berusaha memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan.
		Proses Penganggaran Publik	Masyarakat didorong ikut dalam pemrograman pembangunan dan dalam penganggaran publik. Dalam hal ini disoroti inisiatif program pemerintah kabupaten/kota yang secara aktif berusaha memfasilitasi masyarakat dalam proses penganggaran publik. Partisipasi dapat diwujudkan dalam proses penganggaran APBD, dan atau hanya proyek tertentu saja.
		Proses Pembuatan Kebijakan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian difokuskan pada inisiatif/program pemerintah kabupaten/kota secara aktif berusaha memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan peraturan daerah dan kebijakan publik strategis lainnya. • Contoh: perda-perda dan regulasi lainnya
	Akuntabilitas Publik 	Transparansi	Transparansi merupakan perwujudan <i>good governance</i> dan <i>clean governance</i> menjadi bagian utama parameter pertanggungjawaban publik (tujuan: mendapatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat).
		Akses Informasi	Bagaimana upaya pemerintah daerah untuk memudahkan akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Akses informasi masyarakat ini menyangkut akses pasif dan akses aktif. Akses pasif dimaksudkan sebagai keterbukaan dan ketersediaan informasi, data, dan dokumen publik yang seharusnya disediakan pemerintah ketika masyarakat mencarinya. Sementara akses aktif diartikan sebagai upaya aktif pemerintah daerah atas inisiatif dan kesadaran sendiri (<i>good will</i>) dalam menyebarkan informasi publik.
		Sanitari Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Sanitari birokrasi diarahkan pada kualitas, integritas, dan akseptabilitas pejabat publik beserta aparatnya dalam melayani masyarakat. • Untuk mengukur hal ini dilihat bagaimana kebijakan pimpinan daerah dalam proses rekrutmen perangkat birokrasi baik proses penerimaan pegawai maupun penempatan pejabat-pejabatnya. Mekanisme tes kompetensi atau fit and proper test menjadi contoh upaya yang bisa terapresiasi, disamping upaya pemberantasan KKN.
		Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme pengaduan masyarakat yang diapresiasi tentunya mekanisme yang memberikan kemudahan bagi masyarakat, bersejajar dengan semangat kemudahan akses informasi, memberikan tekanan profesionalisme aparat untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. • Mekanisme pengaduan masyarakat ini tentu akan sangat inovatif dengan standar baku yang implementatif yang digariskan (berbingkai hukum jelas) dan dijalankan secara tegas oleh daerah.
		Responsivitas dan Responsibilitas Aparatur	Perlunya transparansi di daerah, sehingga semua pihak baik masyarakat maupun jajaran birokrasi bisa saling mengawasi manakala ada gejala terjadinya KKN dalam proses pemerintahan.

Bab 2

Refleksi Otoda di Sulawesi Selatan dalam Lima Tahun Monev FIPO



Kemajuan Berkebebasan

Referensi Kemajuan Baru

Mungkin terdapat cara pandang berbeda terhadap setiap ajang penganugerahan yang dilakukan oleh setiap lembaga, termasuk pelaksanaan Otonomi Awards (OA). Ajang bergengsi yang dilakukan The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) sekali dalam setahun ini bukanlah sebuah festival bagi-bagi penghargaan. Otonomi Awards lebih lanjut merupakan bagian tak terpisah dari upaya mengintrodusir dan mengawal sekaligus mengarahkan kemajuan baru.

Tidak hanya menjadi referensi kemajuan baru, Otonomi Awards hadir bersama referensi kemajuan baru. Otonomi Awards adalah bagian dari rekayasa sosial yang mengintrodusir, mengawal, dan mengarahkan perubahan melalui agenda setting wacana. Bedanya dengan proyek rekayasa sosial lain, dalam Otonomi Awards, agen perubahannya adalah publik, mekanisme perubahannya adalah kompetisi, dan sifat rekayasanya adalah alamiah-sukarela.

Melalui OA, suatu kondisi ideal mula-mula diperkenalkan sebagai aturan main. Barang siapa yang mencatat prestasi kemajuan sesuai aturan main akan

diberikan penghargaan. Kredibilitas pemberi penghargaan yang terjaga memberikan nilai tambah bagi penerimanya. Nilai tambah penghargaan bagi penerimanya mendorong lebih banyak peserta untuk meningkatkan kemajuan programnya. Lebih banyak peserta yang berupaya meningkatkan kemajuan berarti lebih banyak pihak yang menyesuaikan diri bergerak ke arah lebih ideal yang dipersyaratkan. Jika secara bertahap kualitas aturan main ditingkatkan sementara agenda setting dimodifikasi, guna memberi penekanan lebih pada agenda-agenda luhur yang lebih strategis, maka perubahan secara bertahap ke arah yang diharap diniscayakan terjadi.

Dalam skema FIPO, OA sesungguhnya disetting sebagai “referensi kemajuan baru”. Sebagaimana acuan kebijakan umumnya, aturan main dan agenda setting wacana OA memberi arah kemajuan dan referensi bagi jalannya otonomi ideal. Namun berbeda dengan acuan kebijakan umumnya, OA hadir sebagai jenis acuan kebijakan alternatif yang berorientasi publik dan senantiasa progresif.

Acuan kebijakan dan referensi kemajuan seringkali menjadi monopoli pemerintah beserta instansi terkait. Publik yang seyogianya erat terlibat seringkali hanya dijadikan objek dan bukan subjek. Melalui OA, sebuah arah baru kebijakan diusung, dikawal dan diarahkan oleh publik. Karenanya, menjadi keharusan yang tidak dapat ditolak, bahwa dalam setiap acuan dan referensinya, OA dituntut senantiasa bergerak dalam koridor bagi sebesar-besarnya kemaslahatan publik. Dari sini bentuk yang lebih nyata dari partisipasi publik dalam *monitoring* otonomi diwadahi, sementara pada saat yang sama kualitas kebijakan publik pemerintahan daerah otonom secara terus-menerus diuji.

Otonomi Awards, selain hadir sebagai referensi kebijakan alternatif juga diwajibkan hadir dalam definisi kemajuan yang senantiasa progresif. Dalam menentukan apa-apa yang dianggap ideal, OA senantiasa selangkah lebih maju dibanding pemerintah. Ini penting demi kukuhnya peran sebagai agen perubahan.

Dapat dikatakan bahwa OA tidak hanya menjadi referensi kemajuan baru, tetapi juga hadir bersama referensi kemajuan baru. Berbeda dengan tafsir umum kemajuan yang sebagaimana besar linier, kemajuan dalam OA adalah kemajuan yang berkebebasan. Ini adalah jenis kemajuan yang mendefinisikan progresivitas sebagai perluasan kebebasan manusia dari belenggu ketidakbebasannya yang substantif maupun prosedural.

Isi dan inti dari tiap-tiap kemajuan, dengan demikian adalah kebebasan. Ada dua jenis kebebasan; yakni substantif dan prosedural. Kebebasan dari kemiskinan, kebodohan, atau rasa takut, misalnya, adalah kebebasan substantif sementara kebebasan untuk berusaha, memperoleh informasi, dan mendapatkan

perlindungan hukum adalah contoh kebebasan prosedural. Tiap-tiap kemajuan haruslah mencakup secara keseluruhan sekaligus langkah maju dalam dua jenis kebebasan itu. Suatu jenis kemajuan yang membawa kebebasan di satu pihak namun tidak bagi jenis kebebasan yang lain tidak bisa dikategorikan sebagai kemajuan. Laiknya pertumbuhan otonomi yang tidak membawa kemajuan demokrasi, partisipasi publik meningkat yang tidak membawa kemajuan kesejahteraan, tidak dapat dikatakan sebagai kemajuan. Dari sini, apapun ukurannya, kemajuan menjadi wajib untuk didefinisikan dalam parameter-parameter komprehensif, yang di dalamnya tercakup sekaligus kebutuhan akan kebebasan substantif maupun prosedural.

Pembangunan Berkebebasan, Otonomi Solusinya

Kebebasan berkemajuan, dua kata yang bukan hanya berbeda kata, melainkan memiliki makna yang dalam. Kebebasan dan kemajuan adalah dua sisi dalam keping mata uang otonomi yang tidak terpisah. Keduanya merupakan semangat yang membidani kebangkitan kembali otonomi daerah dalam era reformasi. Tampil dalam usungan keranda kegagalan model pembangunan otoriter-terentral Orde Baru di satu sisi, serta gelombang pasang reformasi demokrasi di sisi yang lain, otonomi daerah sesungguhnya merupakan kompromi ideologis atas kebutuhan untuk maju di satu sisi dan kebutuhan untuk bebas di sisi yang lain.

Akan terjadi kesalahan besar jika otonomi daerah hanya dipahami dalam semangat kebebasan atau kemajuan semata. Otonomi daerah adalah kompromi keduanya. Fakta bahwa eksistensi otonomi daerah ditemukan kembali dalam resistensi publik atas usulan federalisme yang masih kuat, justru di tengah gelombang pasang anti sentralisme-otoritarianisme Orde Baru yang meningkat yang sesungguhnya mengkonfirmasi eksisnya semangat tersebut. Secara fitrah, semangat yang melahirkan otonomi daerah adalah agar kemajuan nantinya senantiasa diupayakan secara bebas, serta agar kebebasan nantinya senantiasa mendatangkan kemajuan yang lebih bermakna. Dalam bahasa yang sloganistik, semangat dasar otonomi adalah kemajuan berkebebasan, kebebasan berkemajuan.

Dalam perkembangannya, semangat untuk bebas tumbuh melampaui dan bahkan tidak menghiraukan semangat untuk maju. Tampilah kemudian sebuah desentralisasi masif yang berjalan sekadar “asal-mau-daerah”, “ogah-subordinasi”, dan “anti-sentralisasi”. Di tingkat pusat ketiadaan semangat untuk maju juga ditunjukkan melalui ketidakseriusannya dalam mempersiapkan perangkat pendukung yang *sophisticated*, keyakinannya yang maju mundur terhadap arti penting otonomi, serta curi-curi celah resentralisasinya melalui rencana revisi.

Semua itu menorehkan kontribusi dalam buruknya performa otonomi di tahun-tahun awal implementasi. Dari sini kemudian muncul pemikiran untuk merekonstruksi konsepsi dasar otonomi ke dalam keseimbangan dua semangat yang membidangi bangkitnya kembali semangat untuk bebas di satu sisi dan semangat untuk maju di lain sisi. Itulah sebab dalam OA, otonomi daerah tidak lagi didefinisikan sebatas, misalnya persoalan transfer wewenang dari pemerintah pusat ke daerah, melainkan sebagai jalan bebas memintas kemajuan di tengah kemajemukan.

Sebagai jalan bebas memintas kemajuan di tengah kemajemukan, otonomi daerah sesungguhnya bukan lagi sekadar solusi disintegrasi atau reformasi pemerintahan yang parsial-temporer, melainkan sebuah perubahan cara pandang dan paradigma dalam mengelola peri kehidupan berbangsa dan bernegara yang utuh berkelanjutan.

Ini berarti, secara konsep OA yang dilakoni FIPO tidak hanya memahami otonomi daerah sebatas persoalan desentralisasi yang praktis dan sempit melainkan persoalan pembangunan berbasis otonomi yang ideologis dan inklusif. Hal ini adalah konsep yang memahami otonomi dalam pengembangan lebih lanjut pemikiran pemenang Nobel Ekonomi 1998, Amartya Sen.

Dalam karya magnum opus, *Development as Freedom*, Sen menentang konsep baru pembangunan yang sesungguhnya merupakan konvergensi canggih kebutuhan akan kebebasan dan kemajuan. Menurut Sen pembangunan bukan kemajuan atau kebebasan semata-mata, tapi sebuah pembebasan manusia dari segala belenggu ketidakbebasan substantif maupun prosedural yang terus diperluas dan terus diupayakan secara bebas. Konsepsi pembangunan seperti ini menyumbang pemikiran berharga bahwa memadukan kebebasan dan kemajuan lebih dari mungkin adalah kebutuhan dalam tiap-tiap pembangunan.

Berkaca pada pemikiran Sen, konsep otonomi daerah sebagai pembangunan berbasis otonomi berusaha memahami otonomi daerah dalam kerangka kompromi komprehensif kebutuhan untuk bebas dan kebutuhan untuk maju. Sebagai kompromi kebutuhan untuk bebas, misalnya, diharapkan menjamin secara lebih baik, tidak saja kadar otonomi pemerintah daerah dari campur tangan tidak mendidik pemerintah pusat, melainkan juga kebebasan individu dari belenggu kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut yang bermakna substantif hingga kebebasan dari kesewenang-wenangan dan ketidakadilan yang bermakna prosedural. Sementara sebagai kompromi kebutuhan untuk maju ia diharapkan untuk, misalnya, menjamin secara lebih baik tidak saja tumbuhnya kemandirian daerah tetapi juga prakarsa dan kearifan lokal yang lebih berbobot dalam mengupayakan kemajuan.

Dalam kata lain, otonomi daerah sebagai persoalan pembangunan berbasis

otonomi adalah cara memahami dan menilai otonomi daerah dalam seberapa jauh ia mampu berperan sebagai “juru kunci”, sebagai jalan pintas bagi tumbuh-kembangnya kemajuan berkebebasan dan kebebasan berkemajuan.

Otonomi Awards yang diselenggarakan FIPO di Sulsel pada 2013 telah memasuki tahun kelima. Dalam monitoring dan evaluasi (monev), FIPO mengidentifikasi banyak temuan terkait dengan kemampuan daerah berinovasi dengan segala kreativitas yang dimiliki. Kebebasan dalam kerangka otonomi daerah merupakan referensi baru bagi daerah untuk berbuat menuju pembangunan yang terlepas dari setiap intervensi dan kekangan.

Inovasi adalah Kemajuan

Dalam bingkai FIPO, inovasi merupakan kata kunci bagi progresivitas pembangunan daerah. Inovasi menjadi ukuran konkret keberhasilan otonomi daerah dalam menumbuhkembangkan kemajuan berkebebasan dan kebebasan berkemajuan. Otonomi daerah bukan skema perlombaan di mana garis awal dan garis akhir untuk masing-masingnya bisa dianggap sama. Meski diselenggarakan secara serentak, otonomi daerah tidak beroperasi dalam kondisi awal, beban penyelenggaraan, dan kemampuan memproduksi hasil yang seimbang bagi tiap-tiap daerah.

Sebaliknya, otonomi daerah hadir dalam tingkat kesiapan, basis modalitas, kualitas tantangan dan pilihan prioritas yang beragam pada masing-masing daerah. Beberapa daerah dianugerahi kombinasi alamiah menguntungkan bagi peningkatan pendapatan daerah secara otonom. Namun di sisi lain dijumpai beberapa daerah yang secara kebetulan juga justru berada dalam kombinasi rumit, penuh dengan keterbatasan.

Situasi seperti ini, menjadi problem tersendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sebagai gantinya, kinerja antardaerah perlu diperbandingkan secara progresif, dalam arti seberapa jauh otonomi membawa kemajuan berarti. Di tengah keberagaman tingkat kesiapan, basis modalitas, kualitas tantangan dan keleluasaan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan otonomi, kemajuan memang menjadi indikator penting untuk dicermati.

Dalam mengusung perjalanan otonomi daerah, FIPO tampil sebagai lembaga yang mengawal perjalanannya. Inovasi yang dijadikan sebagai alat untuk mendorong kemajuan daerah menjadi tema sentralnya. Sebagai produk terpenting otonomi, inovasi bukan saja nama lain dari kearifan dan kejeniusan lokal yang terlembaga. Lebih jauh ia adalah gambaran sebuah kemajuan yang terupaya secara bebas. Selain terobosan, dalam tiap-tiap inovasi, terpendam senantiasa kreativitas. Jika terobosan mencerminkan kemajuan, kreativitas mencerminkan kebebasan.

Dalam menilai kemajuan otonomi dalam ukuran FIPO, inovasi berarti menilai seberapa jauh kebebasan yang dimiliki daerah mampu mendorong munculnya program, kebijakan serta gagasan lokal yang cerdas, khas dan *genuine* dalam menyiasati setiap bentuk keterbatasan atau mengoptimalkan setiap bentuk keunggulan yang daerah miliki.

Dalam konteks tersebut, tidak cukup sekadar inisiatif, inovasi adalah sebuah terobosan. Jika inisiatif menggambarkan suatu prakarsa awal yang jeli, terobosan atau *breakthrough* menggambarkan paduan kreativitas dan kecerdasan untuk keluar dari kebuntuan. Apakah itu kebuntuan karena keterbatasan sarana atau kebuntuan karena kecenderungan untuk mengupayakan segala sesuatu secara biasa-biasa saja.

Berbalik dengan cara pandang “ala kadar-isme”, baik inisiatif maupun terobosan, pada dasarnya, adalah gambaran komitmen kuat akan kemajuan. Itulah sebabnya selain cerdas, sebuah inovasi semestinya sarat dengan nuansa progresivitas.

Kesimpulannya, betapa pun bagus sebuah inovasi, ia tidak akan berguna jika tidak bermakna strategis, berpotensi produktif serta memberi efek sinambung. Sebuah inovasi dikatakan strategis manakala ia tampil sebagai jawaban atas kebutuhan daerah yang paling krusial. Dikatakan produktif manakala mampu beroperasi di lapangan sebaik yang diharapkan.

Mencermati hal tersebut, pada realisasinya, otonomi daerah di Sulawesi Selatan telah menunjukkan jati dirinya secara perlahan. Walau pun pada mulanya terkendala, namun akhirnya, jalannya otonomi daerah menjadi bagian yang terpenting dalam mendorong pembangunan di Sulsel. Pada saat yang sama, ditengah perjalanannya, FIPO lahir dan tampil mengawalinya. Otonomi Awards yang diusung FIPO bukan hanya ajang bagi-bagi penghargaan, melainkan mampu mendorong daerah untuk maju dengan segala atribut kreativitas yang dimiliki dengan mengusung inovasi. Tiada alasan untuk tidak maju karena keterbatasan. Tapi dengan inovasi, daerah mampu berbuat lebih kreatif tanpa adanya kekangan dalam menyiasati setiap bentuk keterbatasan dan mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki. Itulah kemajuan berkebebasan. (*)

Replikasi Inovasi Daerah

Lima Tahun Otonomi Awards, Adakah yang Berubah?

Otonomi Awards (OA) the Fajar Institute of Pro-Otonomi (FIPO) pada 2013 ini telah memasuki tahun ke lima. Sejak dimulai pada 2009 lalu, FIPO menemukan ratusan inovasi yang tersebar di 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan (Sulsel). Dalam skema FIPO, indikator yang ditawarkan dalam penilaian OA terdiri atas tiga parameter utama, yaitu Kehidupan Ekonomi, Layanan Publik, dan Performa Politik Lokal.

Ketiga parameter tersebut masing-masing mewakili beberapa indikator. Parameter Kehidupan Ekonomi terdiri atas tiga indikator, yaitu Pertumbuhan Ekonomi Lokal, Pemerataan Ekonomi Lokal, dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal/Pengentasan Kemiskinan. Parameter Layanan Publik terdiri atas tiga indikator, yaitu Layanan Pendidikan, Layanan Kesehatan, dan Layanan Administrasi, Kependudukan, dan Perizinan. Sedangkan Pada parameter Performa Politik Lokal terdiri dari dua indikator, yaitu Transparansi dan Partisipasi Publik. Selain parameter utama, FIPO juga menawarkan parameter

khusus, diantaranya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengentasan Kemiskinan, dan pada 2013 ditambah dengan parameter Air Minum dan Sanitasi.

Monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan FIPO selama 5 (lima) tahun pelaksanaan OA, melihat masih minimnya replikasi program antar-daerah. Kenyataan lain muncul di mana kebanyakan daerah di Sulsel justru melakukan studi banding ke Jawa dibanding ke kabupaten/kota di Sulsel. Padahal, temuan FIPO di Sulsel menunjukkan banyak program inovasi yang menarik dan layak direplikasi daerah tapi justru tidak mendapat perhatian dari daerah lain. Ironisnya, program inovasi tersebut lambat laun menjadi program linier belaka, yang tiap tahunnya muncul dalam APBD tapi tidak memiliki manfaat multiplier ke daerah lain.

Temuan-temuan FIPO terhadap program inovasi yang telah direplikasi daerah di Sulawesi Selatan sudah menunjukkan tren positif. Beberapa daerah telah melakukan studi banding ke daerah lain di Sulsel lantaran terprovokasi dengan penghargaan yang diterima daerah di ajang OA. Beberapa daerah sudah sadar, jika program inovasi yang diapresiasi FIPO layak untuk direplikasi karena program yang ditampilkan memang berkualitas.

Sulit terbantahkan bahwa eksistensi FIPO dalam mendorong kemajuan daerah setidaknya dapat diapresiasi. Katakanlah, dari lima tahun berkiprah sebagai satu-satunya lembaga yang konsen menyelenggarakan ajang bergengsi OA di Kawasan Timur Indonesia. FIPO memiliki tanggung jawab moral dalam mengawal jalannya otonomi daerah dan mendorong kemajuan melalui kompetisi pada pelaksanaan OA.

Dalam rentang lima tahun tersebut, secara bertahap daerah telah merasakan manfaat di balik pelaksanaan OA, yaitu kemajuan. Kemajuan yang dapat diukur dari progresivitas program daerah yang oleh UU No. 32/2004 disebutnya sebagai upaya penyesuaian. Dalam kerangka ini, program replikasi inovasi yang ditemukan FIPO pada beberapa daerah di Sulawesi Selatan, masih belum menggairahkan.

Daerah yang melakukan replikasi inovasi dijabarkan dalam parameter berikut.

1. Replikasi Inovasi Parameter Layanan Publik

Pada Parameter Layanan Publik, Program Perizinan Terpadu Kabupaten Takalar dianggap sebagai cikal bakal Program Layanan Perizinan Terpadu di Indonesia. Di Sulawesi Selatan, program yang dimulai pada 1999 itu mendapat apresiasi luas dari berbagai kabupaten dan kota. Banyak daerah melakukan studi banding ke Takalar untuk belajar mekanisme program. Kota Parepare adalah satu dari sekian banyak daerah yang menjadikan Takalar sebagai tempat belajar.

Pelaksanaan Program Perizinan Terpadu di Takalar awalnya berjalan

sukses. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kinerja Takalar mengalami penurunan. Di sisi lain, Parepare yang melakukan pembelajaran di Takalar melalui studi banding pada 2000 dan berhasil menerapkannya pada 1 Juni 2001, dalam perjalanannya justru mengalami dinamika yang lebih baik hingga saat ini.

Program Perizinan Paripurna yang dikembangkan Kota Parepare banyak mendapat apresiasi dari FIPO. Sejak Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare menyertakan ke ajang OA pada 2009 lalu, program tersebut langsung mendapatkan penghargaan OA. Penghargaan itu tidak hanya sampai di situ, pada 2010 dan 2011, program tersebut kembali meraih tropi OA pada indikator Perizinan.

Keberhasilan Kota Parepare meraih tropi OA tiga tahun berturut-turut telah membuka mata daerah lainnya. Tidak kurang 397 kabupaten dan kota serta NGO di seluruh Indonesia, melakukan studi banding tentang pelayanan perizinan dan penerapan sistem manajemen mutu ISO:2008 Parepare. Kebanyakan dari mereka telah mereplikasi pelaksanaan perizinan Kota Parepare. Keberhasilan yang dicapai Kota Parepare dalam membangun program perizinan merupakan prestasi spektakuler.

Program Perizinan Terpadu di Sulawesi Selatan sejak 1999 hingga 2013 telah mengalami evolusi replikasi inovasi. Jika dirunut berdasarkan replikasi daerah, maka Program Perizinan Terpadu di Sulsel terbagi dalam empat generasi. Generasi pertama adalah Kabupaten Takalar. Program Perizinan Kabupaten Takalar telah direplikasi beberapa daerah di Sulawesi Selatan termasuk Kota Parepare, dengan demikian generasi kedua dari program perizinan terpadu versi Takalar adalah Kota Parepare.

Kota Parepare merupakan satu dari sekian banyak daerah yang sukses mereplikasi program perizinan Takalar. Keberhasilan Kota Parepare bukan hanya sampai pada replikasi program semata, tapi yang tak kalah pentingnya adalah menampilkan beberapa inovasi baru yang jauh lebih maju dari asalnya. Diantaranya sistem antrean elektronik, pembayaran jenis perizinan melalui petugas Bank Sulsel (Bank Pembangunan Daerah) yang berada dalam kantor perizinan dan beberapa inovasi lainnya.

Generasi ketiga adalah Kota Palopo. Kota Palopo merupakan salah satu daerah yang terbilang inovatif dalam mereplikasi Program Perizinan Kota Parepare. Keberhasilan mereplikasi Kota Parepare, mengundang keingintahuan pemda lain di Sulsel. Salah satu di antaranya adalah Kabupaten Luwu Utara. Beberapa daerah lain pun pernah melakukan studi banding ke Kota Palopo yakni Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Timur.

Sejak efektif meluncurkan programnya pada 2007, Program Perizinan Terpadu Kota Palopo merupakan salah satu daerah yang sangat menonjol

dalam penilaian FIPO. Sejak keikutsertaannya pada ajang OA 2009, Palopo selalu berada di posisi *runner-up*.

Generasi keempat adalah Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pinrang. Kabupaten Luwu Timur berhasil meraih OA pada 2012. Salah satu kelebihan program perizinan Luwu Timur adalah “Layanan Jemput Bola” bagi pemohon yang tidak sempat ke kantor untuk mengurus perizinan. Sedangkan Kabupaten Pinrang berhasil meraih OA pada tahun 2013.

Kabupaten Pinrang melakukan studi banding ke Kota Parepare pada 2010. Pada tahun itu juga efektif meluncurkan programnya. Kendati terbilang baru, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang dapat memberikan berbagai produk layanan perizinan yang kualitasnya tidak kalah bagusnya dengan generasi sebelumnya.

2. Replikasi Inovasi Parameter Performa Politik Lokal

Salah satu program inovasi yang banyak mendapatkan perhatian serius dari daerah lain di Sulsel adalah *e-procurement*, Tender Barang dan Jasa Melalui Internet. Program pada indikator akuntabilitas tersebut diluncurkan Kabupaten Luwu Utara pada 2005 seiring dengan dimulainya persiapan *e-government*. Program tersebut diajukan pada OA 2009, 2010, dan 2011.

Ketika diajukan pada OA 2009, program tersebut hanya puas sebagai nominasi. Namun pada 2010 dan 2011, berhasil meraih penghargaan tertinggi OA. Keberhasilan ini mendapat perhatian serius dari daerah lain sehingga beberapa daerah melakukan studi banding ke Luwu Utara untuk mengetahui mekanisme program. Di antara daerah yang berkunjung ke Luwu Utara adalah Kota Palopo, Luwu, Luwu Timur, Toraja, Takalar, Barru, Soppeng.

Pada indikator partisipasi publik, program Sistem Dukungan Masyarakat (Sisduk) di Kabupaten Takalar menjadi perhatian serius beberapa negara dan daerah di Indonesia. Program tersebut memfokuskan pada pelibatan publik. Masyarakat dilibatkan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi jalannya program sehingga rasa kepemilikan menjadi lebih besar.

Anggaran yang muncul dari pelaksanaan program dibiayai oleh masyarakat, sedangkan pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat bertindak sebagai fasilitator. Beberapa negara telah berkunjung melihat pelaksanaan program diantaranya: Thailand, Malaysia, Afrika Selatan, Jepang, Kenya, Srilanka, Bangladesh, dan Vietnam.

Walaupun tidak secara gamblang daerah telah mereplikasi program tersebut, tapi setidaknya program tersebut telah mampu memberikan corak baru bagi pembuatan dan pelaksanaan program di kabupaten lain.

Harapan untuk menularkan inovasi dari daerah ke daerah lainnya memang cukup besar. Namun faktanya tidaklah demikian. Dalam bingkai FIPO,

masih ada berbagai kendala replikasi inovasi kabupaten/kota yang menjadi penghalang, yaitu:

a. Kapasitas kepemimpinan

Inovasi daerah mestinya digerakkan oleh pimpinan daerah, dalam hal ini bupati/walikota. Hanya saja hingga saat ini, pemerintah daerah sebagai pengendali daerah belum sepenuhnya mampu memanfaatkan kapasitasnya dalam melakukan replikasi inovasi.

b. Ego kedaerahan

Daerah tampak masih enggan mereplikasi program inovasi yang dimiliki daerah tetangganya, hanya karena faktor ego kedaerahan yang berlebihan. Masing-masing mereka mengaku memiliki program terbaik pada setiap indikator FIPO. Padahal harus diakui bahwa setiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau daerah mau menyadari hal ini, maka tentu mereka akan saling mencontoh praktik-praktik cerdasnya tanpa harus studi banding jauh ke Pulau Jawa, yang belum tentu secara kultur sama dengan daerah di Sulsel.

c. Komitmen daerah

Kurangnya komitmen pemerintah daerah turut menghambat terjadinya replikasi inovasi. Komitmen yang dimaksud berupa dukungan regulasi dan anggaran yang belum maksimal. Berdasarkan hasil monev FIPO pada program Inovasi kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, peneliti tidak banyak menemukan komitmen yang kuat dalam mereplikasi. Meskipun di beberapa daerah replikasi itu sudah berjalan, khususnya pada parameter layanan publik indikator perizinan.

d. Sumber daya manusia

Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah, menjadi hambatan pengembangan daerah. Termasuk dalam hal replikasi program inovasi di daerah. Persoalan SDM inilah menjadi pekerjaan rumah pemerintah kabupaten/kota agar mampu mengembangkan program replikasi inovasi yang ada. Meskipun jumlah SDM yang dimiliki daerah saat ini sudah cukup memadai, hanya saja belum merata pada berbagai bidang dan kurang pada aspek kualitas.

Tantangan tersebut dapat diatasi dengan melakukan pelatihan berupa seminar dan studi banding, memperkenalkan inovasi-inovasi daerah yang dimiliki kabupaten/kota lainnya.

Empat faktor di atas sesungguhnya bukanlah masalah sulit untuk diatasi.

Jika pucuk pimpinan, dalam hal ini pasangan bupati-wakil bupati sebagai pengendali kepemimpinan daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakatnya, lalu mendapat dukungan penuh dari parlemen, maka replikasi inovasi –terutama yang relevan dengan kebutuhan daerah, dapat dengan mudah dilaksanakan. Toh, penerapannya bukan lagi pada ranah uji coba, melainkan hanya mereplikasi serta menyempurnakannya. (*)

Keterbukaan dan Transparansi

Sebelum melangkah lebih jauh melakukan refleksi terhadap penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah di Sulawesi Selatan, juga berdasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan *The Fajar Institute of Pro Otonomi* (FIPO), perlu lebih dulu dipahami pengertian tentang apa itu keterbukaan dan transparansi. Mulai dari keterbukaan, berdasarkan pengertiannya.

Keterbukaan adalah memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk menggunakan haknya dalam memperoleh data/informasi ataupun keterangan yang benar, lengkap dan akurat (dapat dipercaya kebenarannya) tentang kejadian dan hasil-hasil yang dicapai oleh pemerintah. Selanjutnya, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan (*openess*) pemerintah dalam memberikan informasi, terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dimana transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat, sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Hal tersebut sejalan pula dengan prinsip-prinsip dalam negara yang menganut paham demokrasi dimana salah satu prinsipnya adalah ‘hak masyarakat untuk tahu’. Hak masyarakat untuk tahu memiliki makna yang benar-benar mengakar di masyarakat, dan terkait langsung pada hak masyarakat untuk mengetahui apa saja yang dilakukan pemerintah mereka sendiri. Pemerintahan yang demokratis seharusnya menjadi pemerintahan yang terbuka dan transparan secara luas. Akan tetapi, pemerintahan yang paling terbuka dan transparan sekalipun, dalam beberapa situasi dan kondisi, membutuhkan sejumlah upaya rahasia atau diam-diam agar dapat berfungsi secara tepat. Karena tak dapat di pungkiri semua pemerintah di mana pun dan kapan pun di sepanjang sejarah dunia, setidaknya memiliki sebagian kecenderungan untuk memberlakukan kerahasiaan-kerahasiaan tertentu dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut sudah merupakan naluri manusia yang lumrah adanya, yang juga merupakan naluri alamiah sebuah pemerintahan.

Itulah sebabnya, dalam memperjuangkan dan mengelola kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan tersebut, cukup perlu memfokuskan perhatian pada tiga masalah mendasar yakni: (1) akses terhadap catatan dan dokumen publik, yang memuat ‘urusan rakyat’ yang tersimpan dalam bentuk-bentuk kasat mata; (2) akses terhadap pembahasan antarlembaga pemerintah, seperti rapat dan forum di mana urusan publik diperdebatkan dan dicari pemecahannya; dan (3) akses terhadap tempat-tempat yang menyelenggarakan urusan pemerintah di luar pembahasan tersebut, seperti lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, atau sekolah yang dikelola pemerintah.

Masyarakat yang bertujuan mengadopsi keterbukaan sebagai sebuah nilai yang punya arti luas tidak sekadar memberi ruang kepada para warga untuk menggunakan hak kebebasan ekspresi individunya secara luas, akan tetapi maju satu langkah lagi ke depan dan secara nyata membuka proses-proses perdebatan di dalam pemerintahan itu sendiri ke depan mata dan telinga masyarakat. Dalam budaya keterbukaan yang sejati, aturan lumrah yang berlaku adalah pemerintah tidak melangsungkan urusannya di belakang pintu-pintu tertutup. Secara rutin, proses-proses legislatif, administratif, dan hukum haruslah terbuka untuk publik.

Adapun makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu; (1) salah satu wujud

pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, dan (2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Hal tersebut kemudian mengakibatkan transparansi menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam upaya mewujudkan *good governance* dan *clean government*. Isu akuntabilitas, terutama transparansi, memang menjadi isu populis yang banyak mewarnai performa politik di daerah seiring terbitnya Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan KKN. Oleh karena itu, dengan mendorong prestasi daerah di bidang transparansi, diharapkan kepercayaan dan kewibawaan pemerintah serta dukungan masyarakat akan dapat meningkat.

Namun dari hasil temuan FIPO selama ini, rupanya ada sesuatu hal yang masih mengganjal. Transparansi hanya dipahami sebagai mekanisme untuk memenuhi prosedur aturan yang ada, sehingga kecenderungan data yang dipublikasikan masih cenderung dangkal. Oleh karena itu, ketika berbicara mengenai keterbukaan dan transparansi tidak sekadar pada mekanisme prosedur, tetapi perlu juga kiranya memerhatikan kualitas dan respon umpan balik informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Sehingga ketika memadukan keduanya, maka akan menghasilkan suatu inovasi mengenai keterbukaan dan transparansi yang baik di mata publik.

Disisi lain, hasil temuan FIPO, ternyata masih sedikit sekali daerah yang melakukan terobosan dalam bidang transparansi. Indikasinya, tidak banyak daerah yang berani mempublikasikan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian hanya mempublikasikan garis besar APBD. Padahal dokumen APBD termasuk kategori dokumen yang dapat diakses oleh publik. Misalnya kasus di Provinsi Sulawesi Selatan, kota Parepare salah satunya berhasil melakukan program transparansi dokumen publik secara online.

Namun, pada dasarnya aturan mengenai transparansi terhadap dokumen publik sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam aturan disebutkan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi publik tersebut wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan tersedia setiap saat.

Hal tersebut pun sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Di Sulawesi Selatan sendiri, baru terdapat lima dari 24 kabupaten dan kota yang menerbitkan regulasi mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID). Diantara lima kabupaten dan kota tersebut adalah Kota Parepare, Kabupaten Tana Toraja, Pangkep, Bulukumba, dan Luwu Utara.

Salah satu tugas PPID adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Untuk memenuhi dan melayani permintaan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID melalui *desk* layanan informasi publik melakukan pelayanan langsung dan melalui media. Media *online* salah satunya. Melalui situs masing-masing pemerintah daerah, masyarakat seharusnya sebagai pemohon informasi tidak perlu lagi menunggu lama untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Melalui mekanisme tersebut, dampaknya tidak hanya mewujudkan transparansi pemerintah daerah, melainkan juga akses masyarakat terhadap informasi terpenuhi, bahkan mampu menjadi sarana untuk mengoptimalkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah.

Temuan FIPO lainnya pada tahun sebelumnya terkait akuntabilitas dan transparansi adalah melalui proses lelang elektronik di Kabupaten Luwu Utara yang menjadi syarat terciptanya *e-government*. Inisiatif program ini mengimplementasikan sistem tender berbasis internet atau dikenal dengan *e-procurement*. Sistem tersebut sama sekali tidak memungkinkan adanya *face to face communication* (komunikasi tatap muka) antara penyedia barang/jasa dengan pengguna barang/jasa. Sistem ini diyakini menjamin kegiatan tender berlangsung transparan, adil, tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Pada intinya terkait keterbukaan dan transparansi ini kembali kepada komitmen pemerintah daerah (Pemda) masing-masing untuk melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tidak hanya itu, Pemda dalam hal ini diharapkan melanjutkan aturan tersebut untuk membuat regulasi pada tingkat daerahnya, apakah dibuatkan unit tersendiri, atau dipimpin oleh satuan kerja yang membidangi informasi dan komunikasi, seperti Dinas Informasi dan Komunikasi (Disinfokom). Dengan adanya layanan informasi publik, sudah selayaknya keterbukaan dan transparansi terhadap informasi dokumen-dokumen penting tiap daerah menjadi mudah diakses publik, baik *via* internet, pamflet, papan pengumuman, dan lain sebagainya.

Pelaksanaan otonomi daerah pada prinsipnya adalah percepatan pertumbuhan dan pembangunan daerah, serta mendekatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat di daerah. Dalam sistem pemerintahan daerah yang bersifat desentralistik seperti sekarang ini, tanggung jawab lebih bertumpu pada kepala daerah; bupati/walikota. Mereka itulah, yang seharusnya menjadi tumpuan optimalisasi pemberdayaan segala sumberdaya daerahnya, termasuk diantaranya sumberdaya manusia secara berdaya guna dan berhasil guna. Untuk mencapai hal tersebut, seorang kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya harus demokratis, transparan, dan akuntabel, yang pada gilirannya birokrasi pelayanan publik akan berjalan secara optimal. (*)

Pelayanan Publik

Otonomi yang telah berlangsung satu dekade lebih, tengah memasuki fase yang penting. Jika pada fase-fase awal diasumsikan sebagai fase transisi, dimana masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah masih bergelut dengan kebutuhan-kebutuhan institusional untuk melembagakan otonomi, kini satu dekade lebih, fase transisi itu tengah memasuki apa yang disebut sebagai fase konsolidasi.

Sebuah fase konsolidasi seyogianya merupakan hasil dari refleksi insititusional yang akan mengarahkan prakarsa dan inisiatif para pelaku dalam strukturasi otonomi yang seharusnya memberikan ciri yang khas sebagai sebuah pelebagaan pemerintahan daerah. Refleksivitas insititusional ini pula yang akan memberikan *roadmap* tentang *consensus* pada praktik kelembagaan mana saja yang dapat dijalankan secara nasional dengan standar dan aturan mainnya. Demikian pula, pada praktik

kelembagaan mana saja yang dapat dilembagakan secara otonom oleh daerah. Sebab, hal terpenting dari proses reflektif dalam proses konsolidasi ini adalah bagaimana membangun kelembagaan otonomi di tengah tegangan dualitas struktural (nasional, lokal dan bahkan global) yang kian kompleks saat ini. Dinamika sentrifugal dan sentripetal (menasional dan melokal) dari dualitas struktural ini pada akhirnya akan memunculkan praktik otonomi yang khas.

Pada fase seperti ini, masyarakat tengah dengan sabar menanti apa dampak positif dari penyelenggaraan otonomi daerah. Esensi otonomi diselenggarakan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana pembangunan dan pelayanan publik dilakukan dan diselenggarakan atas sepenuhnya prakarsa lokal. Dengan demikian, kebijakan pembangunan diasumsikan tidak salah sasaran, karena rencana dan pemetaan kebutuhan dilakukan bersama oleh masyarakat di daerah. Begitupun dengan pelayanan publik, diasumsikan akan semakin meningkat, baik dari segi keteraksesan, kualitas, keadilan, partisipasi dan transparansinya, karena rentang kendali yang semakin pendek. Konsekuensi dari rentang kendali yang pendek tersebut adalah semakin tersederhanakannya urusan-urusan/aspek-aspek birokratik dalam pelayanan publik.

Faktanya, harus diakui otonomi daerah masih belum mampu menghasilkan perbaikan kehidupan yang berarti bagi sebagian besar masyarakat. Keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel masih belum sepenuhnya terwujud, karena reformasi politik yang digulirkan tidak diikuti upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Berbagai praktik buruk dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti: ketidakpastian pelayanan, pungutan liar, dan pengabaian hak dan martabat warga pengguna pelayanan, masih amat mudah dijumpai pada hampir setiap satuan pelayanan publik¹.

Pelayanan publik oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping abdi negara. Pelayanan publik oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk menyejahterakan masyarakat. Pelayanan umum oleh LAN (1998) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat atau daerah, dan lingkungan BUMN/ BUMD dalam bentuk barang maupun jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1 Tjokroamidjojo, 2001:107-108

2 Lovelock (1992) dalam Henri Ramayanti, Implementasi Pelayanan Publik dalam Era Otonomi Daerah, Jurnal Ilmiah Dinamika, Volume 2, Nomor 3, Juni 2009, Hal. 71-72

Lovellock² mengemukakan lima prinsip yang harus diperhatikan bagi pelayanan publik, agar kualitas layanan dapat dicapai, antara lain:

1. *Tangible* (terjamah), seperti kemampuan fisik, peralatan, personel dan komunikasi material;
2. *Reliable* (handal), kemampuan membentuk pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan memiliki keajegan;
3. *Responsiveness* (pertanggunganjawaban), yakni rasa tanggung jawab terhadap mutu pelayanan;
4. *Assurance* (jaminan), pengetahuan, perilaku dan kemampuan pegawai, dan;
5. *Emphaty* (empati), perhatian perorangan pada pelanggan.

Di samping itu, pihak pelayanan publik dalam memberikan layanan publik setidaknya harus mengetahui kebutuhan yang dilayani, menerapkan persyaratan manajemen untuk mendukung penampilan (kinerja), dan; memantau dan mengukur kinerja. Sebagai perwujudan dari apa yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh pelayanan publik agar kualitas pelayanan menjadi baik, maka dalam memberikan layanan publik seharusnya (a) mudah dalam pengurusan bagi yang berkepentingan (prosedurnya sederhana), (b) mendapat pelayanan netral; (c) mendapat pelayanan yang sama tanpa pilih kasih, dan; (d) mendapat perlakuan yang jujur dan terus terang (transparansi)³.

Review Program Inovasi FIPO Bidang Pelayanan Publik 2009-2013

Salah satu isu yang belakangan menjadi fokus penelitian tentang inovasi dalam pelayanan publik adalah tidak sekadar keberadaan infrastruktur dan prosedural atau mekanisme yang memberikan kemudahan dalam pelayanan, akan tetapi sejauh mana pelayanan publik itu juga lebih sensitif terhadap (kebutuhan) permasalahan dan kebutuhan masyarakat tentang pelayanan publik yang dibutuhkan. Habitus pelayanan publik adalah melayani karena kebutuhan masyarakat, tidak sekadar didorong karena keperluan dan keharusan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik, namun pelayanan publik itu muncul dari kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, isu teknokratis tentang pelayanan publik pun akan semakin menemukan dinamikanya seiring dengan rasa keterpenuhan, aksesibilitas, kepuasan, dan kualitas pelayanan publik itu sendiri. Dalam kaitan ini, seiring perkembangan otonomi daerah, rasa terlayani, aksesibilitas

2 Lovelock (1992) dalam: Herni Ramayanti, Implementasi Pelayanan Publik dalam Era Otonomi Daerah, Jurnal Ilmiah Dinamika, Volume 2, Nomor 3, Juni 2009, Hal. 71 -72

3 Ibid

dan kualitas pelayanan, tidak saja pada keberadaan dan kuantitas infrastruktur maupun mekanisme/prosedur pelayanan. Namun secara substantif adalah bagaimana pelayanan yang empatik dapat berlangsung. Karena empatisme inilah yang menandai sebuah transisi dalam kelembagaan pelayanan publik, yang sebelumnya *bureaucratic minded* menjadi *service minded*. Empatisme ini pula yang menjadi dasar bagi pelayanan yang bertanggung jawab, responsif dan inovatif. Keterbatasan infrastruktur dan mekanisme yang tidak memadai, akan teratasi jika transisi dari orientasi birokratik ke orientasi pelayanan telah dapat dilembagakan.

Meski diasumsikan bahwa pelayanan publik mencakup banyak aspek/ sektor, barang dan jasa, di-cover oleh berbagai institusi baik birokrasi atau yang disebut dengan pelayanan birokrasi dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), namun FIPO dalam lima tahun monitoring, secara konsisten fokus pada monitoring program di bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan administrasi perizinan dan kependudukan. Keempat sektor tersebut, merupakan barang publik yang tidak dapat diserahkan (begitu saja) kepada sektor swasta (*private*). Pemerintahlah yang harus menyediakannya agar kesejahteraan seluruh masyarakat dapat ditingkatkan.

Dalam beberapa asumsi, memang terdapat kemungkinan terjadinya pergeseran dari awalnya barang privat menjadi barang publik, atau sebaliknya barang publik pada titik/konteks tertentu dapat bergeser menjadi privat. Misalnya, kebakaran di perkotaan menjadi hal yang sangat penting sehingga berubah menjadi *public service*, atau dalam bidang kesehatan, yang meski dia adalah barang publik namun pada tingkat tertentu juga dapat berubah menjadi privat.

Pada kasus pertama, fenomena ini menunjukkan kompleksitas dan pertumbuhan urusan-urusan pemerintah. Sebaliknya pada kasus kedua, adanya urusan-urusan publik yang juga ditangani privat, menunjukkan adanya kelemahan dan bahkan kegagalan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan-urusan publik (*government failure*), sehingga mendorong prakarsa dan intervensi privat/swasta dalam menyediakan urusan publik yang lebih berkualitas. Pada urusan-urusan publik di bidang pendidikan dan kesehatan kita seringkali mendapatkan sektor swasta yang menyediakan pelayanan dengan standar-standar di atas standar pemerintah, seperti *private care centre* di bidang kesehatan, dan sekolah swasta terintegrasi dengan standar internasional.

Dalam beberapa pandangan tentang desentralisasi pelayanan publik terutama menyangkut tentang prinsip *reinventing government*, istilah ini kemudian dikenal dengan istilah privatisasi (debirokratisasi) atau *public – private partnership*⁴. Istilah privatisasi melambangkan suatu cara baru dalam

4 Osborn dan Gaebler; 1992.

memperhatikan kebutuhan masyarakat dan pemikiran kembali mengenai peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Pada perkembangan pemikiran tentang *public services* selanjutnya, terjadi perubahan peran pemerintah dalam penyediaan *public services*, pemerintah daerah tidak lagi menyediakan *public services* sendiri tetapi melibatkan kewenangan sektor privat/swasta dan masyarakat dengan *voluntary organisation* pada beberapa dimensi bentuk demokrasi. Berdasarkan dimensi tersebut berkembang menjadi empat model kewenangan dalam *public services*, antara lain: (1) *The Traditional bureaucratic authority*; (2) *The Residual enablment authority*; (3) *The market-oriented authority*, dan; (4) *The Community-oriented authority*⁵.

Ada kecenderungan kuat pemda untuk menggunakan instrumen penyediaan layanan langsung (*direct provision*). Hampir tiap dinas, sejauh mungkin dilengkapi dengan perangkat aturan, yang memungkinkannya menjalankan penyediaan layanan publik. Terdapat kecenderungan kuat, Pemda menyelenggarakan sendiri bidang pendidikan, kesehatan, informasi, kependudukan, dan pekerjaan umum⁶. Ini menandakan bahwa hingga satu dekade lebih pelaksanaan otonomi daerah, dalam penyelenggaraan urusan-urusan publik, pemerintah daerah kita masih berada kuat pada kecenderungan model pertama (*The traditional bureaucratic authority*)⁷.

Dalam aspek pelayanan, tampaknya model ini menaruh perhatian pada bagaimana pemerintah memberikan pelayanan secara langsung kepada publik, atau menetapkan regulasi yang akan mengatur perilaku individu atau organisasi. Lembaga-lembaga publik yang menganut paradigma ini cenderung melihat publik sebagai pihak yang harus dibantu dan pemerintah harus menyiapkan program-program publik secara jujur. Pelayanan publik merupakan suatu proses yang netral dan kewenangan administrator adalah kewenangan keahlian. Seperti dikatakan oleh Schubert, kepentingan publik akan ditemukan dalam rasionalisasi proses keputusan yang mana hal tersebut akan menghasilkan keinginan publik. Diskresi individu diminimalisasi atau dieliminasi; responsibilitas ada dalam perilaku yang otonomi. Perspektif ini sangat terkait dengan konsep netralitas dan efisiensi yang diusung dalam paradigma ini. Dalam pandangan administrasi publik tradisional, dengan berfokus pada netralitas pegawai, efisiensi, dan pemisahan yang tegas antara politik dan administrasi, maka dipastikan pemenuhan kepentingan publik

5 Baca Herni Ramayanti, Implementasi Pelayanan Publik dalam Era Otonomi Daerah, Jurnal Ilmiah Dinamika, Volume 2, Nomor 3, Juni 2009, Hal. 71.

6 http://www.bappenas.go.id/files/2813/5229/9027/8/pelayanan-publik-di-era-desentralisasi-studi-tentang-variati-cakupan-dan-peranan-pemerintah-daerah-dalam-pelayan_20081123185136_1261_7.pdf, hal.7

7 The Traditional Beureucratic Authority juga dikenal dengan The Old Public Administration atau Paradigma administrasi publik konvensional diusung oleh beberapa pakar serta teori yang mewarnai paradigma itu. Teori-teori ini menandai sekaligus memberikan karakteristik yang kuat bagi administrasi publik tradisional. Pakar yang dimaksud adalah Weber dengan teori birokrasi, Wilson dengan dikotomi politik/administrasi, serta Taylor dengan ajaran manajemen keilmuan (scientific management).

akan melalui cara-cara yang paling efektif dan efisien⁸.

Dalam konteks demikian, administrasi publik selalu bergulat pada persoalan bagaimana peran administrator dalam pengembangan kebijakan maupun persoalan tentang relasi antara administrator dan pembuat kebijakan yang lain. Pernyataan terdahulu yakni ada pemisahan yang tegas antara politik dan administrasi. Pejabat politik terpilih bertugas membuat kebijakan dan administrator berkenaan dengan implementasi kebijakan. Proses implementasi kebijakan menganut prinsip *top-down* dan hirarkis. Setelah kebijakan diformulasi, kebijakan diimplementasikan oleh administrator dengan padanya terdapat diskresi yang terbatas. Bahkan diskresi administrasi tidak dipandang sebagai suatu bagian penting dari pekerjaan-pekerjaan administrasi⁹.

Asumsi yang lain dari paradigma administrasi publik tradisional adalah bahwa proses implementasi bukan menjadi bagian dari proses kebijakan. Proses administrasi dan pembuatan kebijakan (seperti yang digambarkan dalam dikotomi politik-administrasi) sesungguhnya adalah dua proses yang terpisah. Dikaitkan dengan aspek akuntabilitas, yang ada adalah akuntabilitas formal, hirarkis, dan legal. Model akuntabilitas ini berdasarkan pada asumsi bahwa administrator tidak memiliki diskresi yang besar. Para administrator hanya mengimplementasikan hukum, peraturan, dan standar yang ditetapkan bagi mereka oleh pejabat politik terpilih.

Akuntabilitas berkaitan dengan melekatnya administrator pada standar dan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah dibangun untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Dalam pandangan ini, responsivitas atau akuntabilitas langsung kepada publik secara implisit dipandang sebagai sesuatu yang tidak perlu dan tidak tepat. Pejabat terpilih dipandang bertanggung jawab dan akuntabel untuk menerjemahkan keinginan publik ke dalam kebijakan yang dibuat. Seperti dikemukakan Goodnow, politik harus mengarahkan atau memengaruhi kebijakan pemerintah, sedangkan administrasi berkenaan dengan mengeksekusi kebijakan tersebut. Karenanya, pengaruh publik secara langsung terhadap eksekusi atau implementasi kebijakan sangat terbatas¹⁰.

Dikaitkan dengan aspek efisiensi, menurut administrasi publik tradisional, administrator tidak akan produktif dan bekerja keras kalau mereka tidak disediakan insentif moneter. Di sini kemudian ada sistem *punishment* yang diberlakukan ketika kinerja pegawai rendah. Efisiensi yang dimaknai sebagai rasio biaya dan *output*, memerlukan kontrol biaya dan produktivitas sebagai *tools* utama. Oleh karena itu, tantangannya adalah bagaimana mengatur dan menstrukturkan pekerjaan agar menjadi lebih minim biaya dengan

8 http://rhp_anfisip-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-69591-UmumParadigma%20Administrasi%20Publik%20Tradisional.html

9 *ibid*

10 *ibid*

produktivitas tinggi. Melihat model ini, menjadi relevan dalam konsepsi FIPO dalam menilai inovatif tidaknya pelayanan publik pada aspek-aspek teknokratik/birokratik itu di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Pelayanan Publik Bidang Pendidikan

Membuat review pelayanan di bidang pendidikan lima tahun monitoring FIPO di Sulawesi Selatan, tulisan ini akan dibagi dua periode. Yakni 2009-2010, dimana FIPO mulai melakukan monitoring pelaksanaan otonomi daerah di Sulawesi Selatan dan merupakan tahun keemasan kebijakan pelayanan pendidikan dengan adanya program pendidikan gratis yang tengah menjadi panglima saat itu.

Kemudian periode 2011-2013, dimana pada periode ini isu pendidikan gratis yang menjadi latar dinamika pelayanan pendidikan berada pada titik klimaks (2011) dan anti klimaks (2012). FIPO, pada survei publik terhadap pelayanan pendidikan setidaknya memonitor empat isu strategis; Peningkatan efisiensi pelayanan pendidikan, peningkatan kesesuaian antara kebijakan dan program pemerintah daerah, peningkatan kesetaraan mendapatkan pendidikan yang layak, peningkatan partisipasi dan transparansi pemerintah daerah dan atau sekolah-sekolah dalam menerapkan pelayanan pendidikan.

Pada 2009, berdasarkan survei publik yang dilakukan FIPO, publik memang lebih banyak menyoroti isu strategis pertama. Isu pendidikan gratis meningkatkan harapan masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan yang lebih terjangkau. Mayoritas daerah telah mengafirmasi/menerapkan pendidikan gratis dengan model *sharing* 40 persen dari pemerintah provinsi dan 60% dari pemerintah daerah. Dalam skema kebijakan ini, tidak sedikit daerah yang bergerak maju dengan menerapkan pendidikan gratis tersebut hingga ke tingkat sekolah lanjutan atas.¹¹

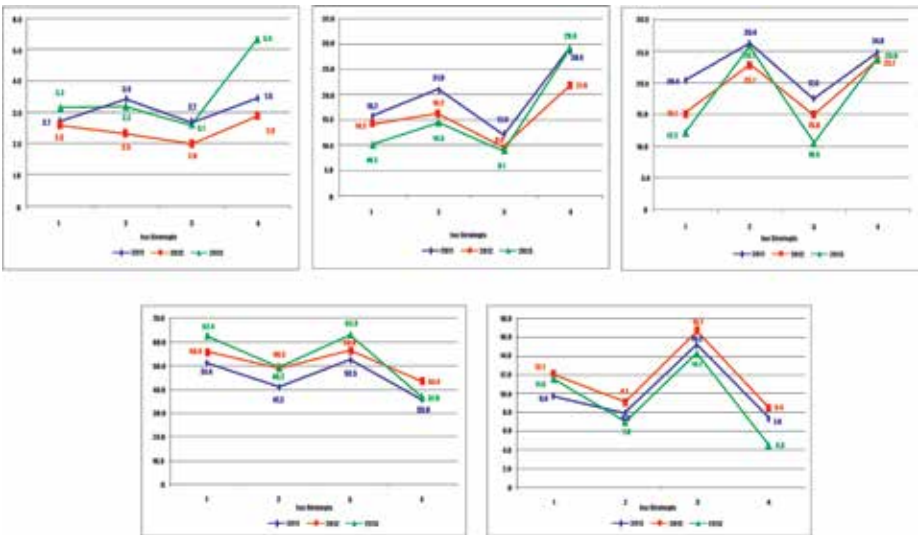
Selain pendidikan gratis pemerataan pembangunan sekolah juga mendapat perhatian publik. Pemerataan, keterjangkauan, bahkan pemberian pendidikan gratis menjadi kekuatan utama di Kabupaten Selayar melalui program pemerataan pendidikan, Kabupaten Gowa melalui peningkatan pendidikan gratis, Kota Makassar dengan program pendidikan bersubsidi penuh tingkat SD dan SMP, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Sinjai dengan pendidikan gratis.¹²

Sementara pada 2010, secara rata-rata untuk setiap isu di atas, responden mayoritas mengapresiasi positif dan memberi nilai yang tidak jauh berbeda.

11 Buku FIPO 2009, Menggali Potensi Menumbuhkan Inovasi, Hal. 76

12 Ibid, Hal. 77

Dari ke empat isu tersebut, isu peningkatan efisiensi pelayanan pendidikan memiliki nilai dengan skor tertinggi (9,025) disusul berturut peningkatan kesetaraan kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak (8.896), peningkatan kesesuaian antar-kebijakan dan program pemerintah daerah (8.132) serta peningkatan partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah daerah dan atau sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan (8.021).¹³ Dari 23 kabupaten/kota (minus Toraja Utara), 83,74% menyatakan kinerja pemerintah kabupaten/kota terkait dengan layanan pendidikan baik dan sangat baik. Sementara 16,26% menilai kinerja pemerintah kabupaten/kota tidak baik dan sangat tidak baik.¹⁴



Sumber: Olah Data Survey Publik FIPO 2011 – 2013

Pada 2011-2013, sebagaimana terlihat pada grafis di atas, sebagian besar responden mayoritas memberikan jawaban 4 (empat).¹⁵ Ini berarti pada rentang 2011-2013, responden menganggap bahwa kebijakan mengenai pelayanan pendidikan telah berjalan “cukup baik”. Grafis 4 (kiri bawah), memperlihatkan tren jawaban 4 tersebut pada isu strategis 1, 2, dan 3 yang terus meningkat. Sementara pada grafis 5 (kanan bawah), yang merepresentasikan jawaban sempurna “sangat baik” terlihat cenderung menurun dari tahun sebelumnya.

15 Lihat grafis 4 (kiri bawah)
 13 Buku FIPO 2010, Prkarsa Memintas Pembangunan, Hal. 78
 14 Ibid

Mencermati tren pada keseluruhan grafis di atas, apa yang dipersepsikan oleh mayoritas responden dengan “cukup baik” itu berarti bahwa program/kebijakan di bidang pelayanan pendidikan telah berjalan, namun belum cukup meyakinkan untuk menghasilkan dampak positif jangka panjang (pragmatis). Relevan dengan grafis 5 di atas, keyakinan publik akan dampak jangka panjang itu sangatlah rendah. Dalam rentang 2011-2013, tren tertingginya hanya 21,8%¹⁶, dan tren ini malah menurun pada beberapa isu, terutama pada isu strategis kedua (peningkatan kualitas pelayanan pendidikan) dan 4 (peningkatan partisipasi masyarakat dan transparansi).

Tampaknya publik masih menunggu komitmen dan kebijakan Pemda, terutama terkait dengan peningkatan kualitas, peningkatan partisipasi dan transparansi dalam pelayanan pendidikan. Afirmasi terhadap pendidikan gratis sejauh ini terlalu larut pada persoalan-persoalan pragmatis yang terkesan didominasi oleh imperatif birokrasi/teknokrasi pendidikan dan alpa terhadap kualitas dan pelibatan masyarakat dalam pelayanan. Padahal, isu peningkatan kualitas pelayanan tidak bisa dipisahkan dari upaya meningkatkan partisipasi dan transparansi dalam pelayanan pendidikan. Rendahnya kualitas pelayanan dan kurangnya partisipasi dan transparansi inilah yang menjadi anti klimaks dari kebijakan pendidikan gratis tersebut selama ini.

Merespons isu rendahnya kualitas pelayanan pendidikan ini, dalam seminar nasional yang diadakan FIPO pada tahun 2012, mengangkat tema tentang kesiapan daerah dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar. Tema ini menjadi relevan mengingat terdapat hubungan yang signifikan antara SPM dengan pelaksanaan pendidikan gratis. Dianggap perlunya SPM untuk naik kelas karena dalam banyak realitas melaksanakan SPM telah memberikan suatu kepuasan tersendiri. Dikaitkan dengan kualitas pelayanan pendidikan, maka yang diharapkan pada dasarnya bukan sekadar “minimum” akan tetapi persoalan yang harus dijawab adalah apakah pendidikan gratis pada waktu-waktu yang akan datang bisa naik kelasnya menjadi bukan sekadar SPM.

Rektor Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Arismunandar, M.Pd, merekomendasikan perlunya perbaikan standar pendidikan mulai dari hulu. Perbaikan tersebut menurutnya akan menentukan kualitas sumber daya yang akan mencetak tenaga-tenaga pendidik. Jika kualitas pendidik baik, maka kualitas hasil didikannya juga akan baik. Sementara itu, juga perlu melakukan perbaikan di bidang kurikulum. Di sini pemerintah daerah harus bisa merencanakan proses koordinasi kurikulum dalam tingkat satuan pendidikan, selama ini fungsi-fungsi koordinasi itu masih belum terjadi dengan cukup

16 Lihat grafis 5 (kanan bawah)

baik. Fokus program kita terlalu banyak untuk mencapai pendidikan gratis tapi kurang bisa mendorong substansi-substansi penting di dalam kurikulum pendidikan.¹⁷

Sementara itu, dari *National Advisor Program* USAID Kinerja, Prima Setiawan, memberikan review tentang beberapa kendala SPM dalam pendidikan dasar dan menengah. Pada 2013 dianggap sebagai puncak pencapaian SPM, tapi rupanya kesiapan pemerintah daerah terhadap SPM belum tercapai, maka dalam kerangka peningkatan kualitas pendidikan direkomendasikan adanya distribusi guru yang profesional dan biaya operasional satuan pendidikan. Hal ini dilakukan untuk menutupi kesenjangan terhadap proporsi tenaga pendidik yang profesional itu. Itulah sebabnya perlu dilakukan perekrutan guru baru, peningkatan kualifikasi guru menjadi S1 dan *redployment* guru yang telah S1.¹⁸

Pelayanan Publik Bidang Kesehatan

Dilatari oleh kebijakan kesehatan gratis yang imperatif dan inisiatifnya didorong oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, dimana kebijakan ini tengah dalam proses *endorsement* menjadi bagian dari kebijakan bersama dalam skema *sharing* 40% provinsi dan 60% kabupaten kota.

Pada 2009-2010 merupakan masa di mana kebijakan ini juga tengah menjadi panglima sebagaimana juga di bidang pendidikan, dan pada 2011-2013, dimana kebijakan ini mulai diperhadapkan pada dinamika dan problematika substansial yang kemudian mendorongnya pada klimaks dan anti klimaks di 2013. Dalam lima tahun monitoring FIPO, di bidang kesehatan juga memantau empat isu strategis; peningkatan efisiensi pelayanan kesehatan, peningkatan kesesuaian antara kebijakan dan program pemerintah daerah, peningkatan kualitas dalam pelayanan kesehatan, serta peningkatan partisipasi dan transparansi dalam pelayanan kesehatan.

Di 2009, mayoritas responden beranggapan bahwa program kesehatan yang diprogramkan pemerintah sudah berjalan namun belum cukup meyakinkan untuk menghasilkan dampak positif jangka panjang.¹⁹ Dari data yang ada, pada 2009, publik memberikan respons yang positif terhadap isu strategis pertama,²⁰ dan selanjutnya berurutan pada isu strategis kedua, ketiga, dan keempat. Beberapa inovasi yang ada terkait dengan respons positif pada isu aksesibilitas itu mencakup program pengobatan gratis untuk rawat jalan

17 Laporan Seminar Nasional Otonomi Awards FIPO 2012, Kesiapan Daerah Dalam Menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

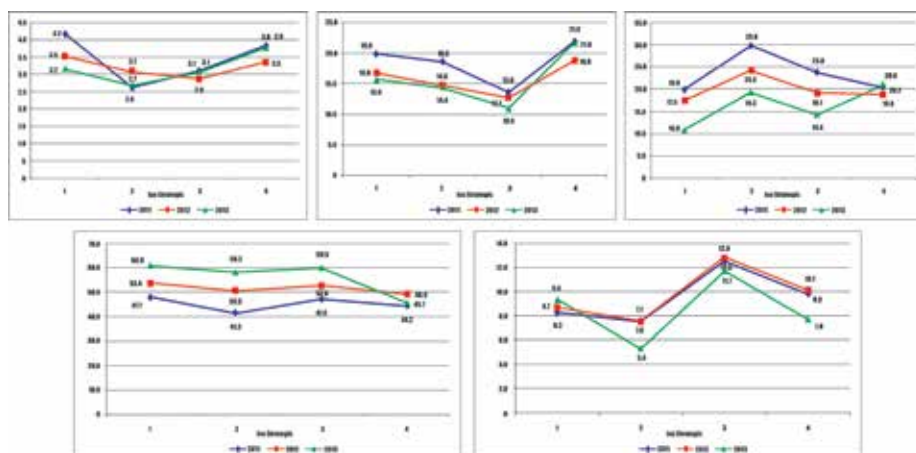
18 Ibid

19 Buku FIPO tahun 2009, Menggali Potensi Menumbuhkan Inovasi, Hal. 79

20 Ibid, Hal. 80, sekira 82% responden memberikan jawaban yang menanggapi positif dengan memberikan skor 4 dan 5.

dan rawat inap serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah, mempercepat dan mengefektifkan layanan.²¹ Namun, tantangan besar dari aksesibilitas itu justru pada isu kedua (kualitas layanan) dan ketiga (keadilan). Pelaksanaan program kesehatan gratis pada umumnya sudah berjalan dengan baik meski masih ditemukan adanya keluhan terkait persyaratan administrasi yang berbelit, dan masih adanya perbedaan pada kualitas pelayanan pasien gratis dengan yang berbayar.²²

Di 2010, dari keempat isu strategis, isu peningkatan kesetaraan kesempatan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak memiliki nilai tertinggi (8.6). Disusul berturut-turut peningkatan efisiensi pelayanan kesehatan (8.4), peningkatan kesesuaian antar-kebijakan dan program pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan (7.9), serta peningkatan partisipasi masyarakat dan transparansi penyelenggaraan pelayanan kesehatan (7.3). Dari 23 kabupaten/kota minus Toraja Utara, sebanyak 77 persen responden menyatakan kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelayanan kesehatan baik dan sangat baik. Sementara 23 persen menilai kinerja pemerintah kabupaten/kota itu tidak baik dan sangat tidak baik.²³



Sumber : Olah data Survey Publik FIPO, 2011 - 2013

Periode 2011-2013, sebagaimana terlihat pada grafis di atas, terdapat tren yang sama setiap tahunnya dimana mayoritas responden memberikan jawaban 4 (empat).²⁴ Program atau Kebijakan di bidang pelayanan kesehatan telah berjalan “cukup baik”. Sebagaimana terlihat pada grafis 4 (kiri bawah), tren yang ada adalah adanya peningkatan pada isu pertama (peningkatan efisiensi

21 ibid

22 ibid

23 Buku FIPO tahun 2009, Menggali Potensi Menumbuhkan Inovasi, Hal. 88

pelayanan kesehatan) dan kedua (peningkatan kesetaraan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak), namun turun dari tahun sebelumnya pada isu ketiga (peningkatan kesesuaian kebijakan dengan program pemerintah daerah) dan keempat (peningkatan partisipasi dan transparansi dalam pelayanan kesehatan). Sementara pada grafis 5 (kanan bawah) memperlihatkan tren yang menurun pada semua isu strategis.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa pelayanan kesehatan sudah terlaksana/ berjalan namun belum memberikan keyakinan untuk menghasilkan dampak positif jangka panjang (pragmatis). Jika memperhatikan grafis 5 di atas, keyakinan publik akan dampak positif jangka panjang itu juga sangatlah rendah pada semua isu strategis. Dalam rentang 2011-2013, tren tertinggi hanya 16,7 persen,²⁵ dan tren ini menurun pada semua isu.

Kolaborasi pemerintah provinsi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan melalui implementasi kebijakan kesehatan gratis dalam skema *sharing* 40:60 persen, sebagaimana halnya dengan pelayanan pendidikan meski baik-baik saja, kondisi dan problematikanya juga terjebak pada persoalan-persoalan birokratis dan teknokratik, yang lebih parahnya berimbas pada rendahnya keyakinan publik pada seluruh sektor strategis pelayanan kesehatan.

Sebagaimana kita ketahui, konsumen terbesar pelayanan kesehatan adalah masyarakat kurang mampu di perdesaan maupun perkotaan yang mengakses layanan kesehatan justru di titik-titik yang kritis dan rentan terhadap keempat isu strategis tersebut. Birokratisasi pelayanan kesehatan selama ini justru menjadi “borok” yang membuat masyarakat kita cenderung enggan mengakses layanan kesehatan (medis) di poskesdes, pustu, puskesmas, dan rumah sakit.

Di beberapa daerah, dalam rangka meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit, terdapat beberapa terobosan. Diantaranya, kemitraan bidan dan dukun di Kabupaten Bantaeng, Puskesmas ISO di Makassar dan Enrekang serta Puskesmas dengan Pelayanan Prima di Kabupaten Pangkep, hingga terobosan peningkatan kapasitas pada fasilitas puskesmas yang mampu melayani rawat inap dan gawat darurat di beberapa daerah, menjadi warna upaya peningkatan pelayanan kesehatan di Sulawesi Selatan. Namun, kesan birokratik dari terobosan-terobosan ini masih cukup kental. Terobosan-terobosan tersebut terkesan pragmatis dan tidak dalam pendekatan yang komprehensif, namun pendekatan yang berbasis masalah. Sehingga cenderung terlaksana setengah-setengah (sepotong-sepotong), sektoral dengan kesan koordinasi birokrasi yang rumit.

Grafis 5 di atas, lagi-lagi patut menjadi refleksi bersama akan rendahnya keyakinan publik atas layanan kesehatan kita dalam rentang waktu satu dekade

24 Lihat grafis 4 (bawah kiri)

25 Lihat grafis 5 (kanan bawah)

lebih ini berotonomi. Rendahnya keyakinan publik itu pula yang menjadi anti klimaks dari program kesehatan gratis yang berjalan selama ini.

Pelayanan Publik Bidang Administrasi Dasar Kependudukan dan Perizinan

Sejak diluncurkannya monitoring FIPO 2009, pelayanan publik bidang administrasi menjadi fokus yang strategis, dimana layanan ini menguji secara langsung kinerja birokrasi daerah yang karakteristik pelayanannya tidak sama dengan pelayanan pendidikan maupun kesehatan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan merupakan barang/jasa publik yang pada titik tertentu dapat bergeser menjadi barang/jasa privat ketika negara tidak bisa menyediakan pelayanan yang maksimal dan berkualitas.

Namun barang/jasa privat yang bergeser menjadi privat itu menjadi penanda konsumsi jasa yang elitis yang tidak sama dengan administrasi dasar dan perizinan. Administrasi dasar dan perizinan benar-benar hanya merupakan barang/jasa publik yang hanya bisa disediakan oleh negara/pemerintah. Seiring otonomi daerah, persoalan administrasi dasar kependudukan dan perizinan inipun kemudian didesentralisasikan. Belakangan, seiring dengan kompleksnya demokrasi daerah, juga dinamika politik pemilu dan pilkada, layanan dasar administrasi kependudukan dan perizinan ini pun menjadi ranah dan isu yang strategis.

Layanan administrasi dasar kependudukan yang baik akan mencerminkan tata dan tertib administrasi, data dan informasi kependudukan yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah hingga program-program pemerintah. Sementara tata perizinan daerah, menentukan bagaimana daerah mengelola tata dan ruang daerah dimana kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan budaya berlangsung. Artinya kedua aspek ini menjadi penentu bagi keber-adab-an tata sosial, politik dan ekonomi, juga budaya suatu kabupaten/kota yang otonom.

Layanan administrasi dasar kependudukan dan perizinan adalah semua jenis layanan kepada warga negara berupa surat-menyurat, perizinan dan pencatatan kependudukan. Layanan administrasi kependudukan dibedakan menjadi layanan perizinan dan non perizinan. Seiring dengan otonomi daerah, layanan jenis itu banyak yang didesentralisasikan ke daerah. Monitoring FIPO sejak 2009-2013 terhadap pelayanan publik di bidang ini mencakup 4 (empat) isu strategis; aksesibilitas, kualitas pelayanan, keadilan, partisipasi dan transparansi.

Di 2009, layanan perizinan satu atap baru terdapat di sembilan kabupaten/kota, yakni Bulukumba, Maros, Pangkep, Bone, Luwu, Makassar, Palopo,

Takalar, dan Parepare. Tiap daerah membentuk lembaga pelayanan perizinan satu atap itu dengan nama yang berbeda-beda, seperti SINTAP, KPTSA, KPTSP dan PTSP.²⁶ Selain itu, terdapat lima daerah yang justru menerapkan desentralisasi pelayanan non perizinan, yaitu pelimpahan urusan pelayanan administrasi dari kabupaten ke kecamatan yang saat itu tengah menjadi tren otonomi.

Kewenangan yang dilimpahkan itu, misalnya pengurusan KTP, KK, dan sertifikat kelahiran. Prosesnya pun berbeda-beda di tiap daerah, ada yang telah menerapkan sistem online, ada yang masih manual. Bagi daerah yang telah menerapkan sistem teknologi informasi, bahkan saling berlomba pada kecepatan pelayanan. Ada daerah yang mengklaim mampu memberikan layanan KTP dengan satu hari selesai, satu jam selesai, dan malah ada yang lima menit selesai. Secara umum terdapat kemajuan dalam hal kecepatan dan kemudahan.²⁷

Untuk layanan KTP dan KK ada dua daerah yang terpantau menerapkan sistem informasi administrasi kependudukan (SIK), yaitu Kabupaten Enrekang dan Tana Toraja. Sementara Kota Pare-Pare telah mendapatkan sertifikat ISO 9001-2000 khusus untuk layanan administrasi. Sedangkan Kabupaten Wajo, Sinjai, Bantaeng, dan Pangkep menggratiskan KTP, KK dan akte kelahiran yang berlaku untuk seluruh masyarakat. Selain itu, terdapat tiga kota yang menerapkan pelayanan prima untuk layanan administrasi, seperti Kota Palopo, Parepare, dan Kota Makassar.

Dalam pelayanan prima isu partisipasi menjadi utama, dimana jika terdapat ketidakpuasan dapat melakukan pengaduan langsung melalui SMS, *hotline* telepon, loket pengaduan, dan *website*. Ada juga kabupaten/kota yang menerapkan sistem jemput bola untuk pelayanan administrasi kependudukan. Model ini dilakukan dengan sebuah mobil operasional yang keliling ke pusat-pusat keramaian atau *door to door* dan membentuk petugas-petugas registrasi di desa dan kecamatan. Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Selayar, Luwu Utara, Luwu Timur, Pangkep, dan Takalar.

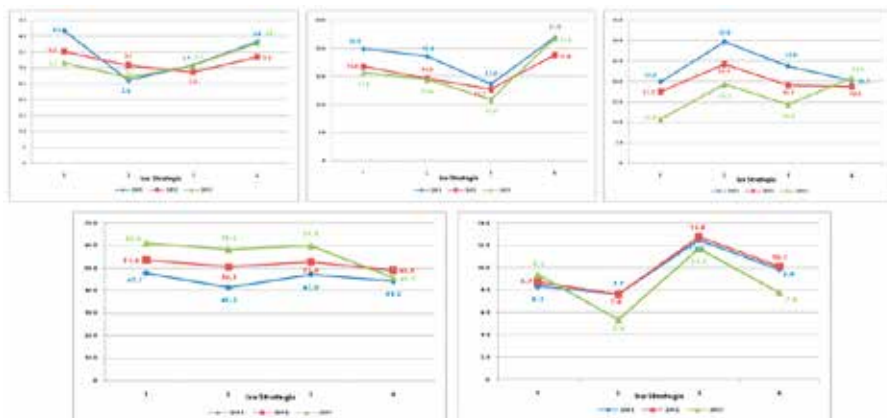
Secara umum dari hasil survei publik 2009 didapatkan bahwa, isu strategis kedua (peningkatan kesesuaian antara kebijakan dan program pemerintah daerah) mendapatkan respons yang cukup baik. Hal ini terlihat dari tingginya jawaban 4 (cukup baik) dari responden. Tren tertinggi malah mencapai 1.014 orang yang menjawab “cukup baik”. Jawaban yang cukup baik ini sekaligus mencerminkan masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan dengan memperbaiki sistem dan regulasi yang lebih meyakinkan, sehingga tidak dianggap sekadar kebijakan pragmatis.

26 Buku FIPO 2009, Menggali Potensi, Menumbuhkan Inovasi, Hal. 83
27 Ibid

Meski dianggap cukup baik pada kualitas pelayanan, terdapat tren yang sangat rendah pada partisipasi dan transparansi. Inilah salah satu aspek yang menyebabkan masih rendahnya keyakinan masyarakat akan keberlangsungan dan keberlanjutan kualitas pelayanan pada bidang ini di 2009. Desentralisasi pelayanan administrasi yang didukung oleh terobosan-terobosan daerah dalam pelayanan administrasi dan perizinan menjadi penentu rasa puas masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang (mungkin) dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya.

Pada 2010, bidang pelayanan non perizinan juga diwarnai layanan administrasi kependudukan yang sederhana dan cepat. Begitupun layanan perizinan, semakin antusias di daerah dengan beramai-ramainya daerah membentuk pelayanan perizinan satu pintu (*one stop service*). Ada yang berbentuk badan, dinas ataupun kantor. Namanya beragam seperti KPT (Kantor Pelayanan Terpadu), Kantor Pelayanan Administrasi, dan Perizinan (KPAP), SINTAP (Sistem Informasi Satu Atap), KPTSP (Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dan lain-lain. Daerah yang sudah memiliki layanan perizinan, tapi masih berupa layanan satu atap, mengubahnya menjadi pelayanan satu pintu. Ini berarti kewenangan menandatangani berkas perizinan berada di tangan kepala PPTSP. Daerah melimpahkan seluruh kewenangan ke instansi pelayanan perizinan yang sebelumnya ditangani oleh instansi teknis.²⁸

Hasil survei publik 2010, dari 23 kabupaten/kota minus Toraja Utara, sebanyak 72 persen menyatakan kinerja pemerintah kabupaten/kota terkait layanan administrasi dasar dan perizinan baik dan sangat baik. Sementara 28 persen menilai kinerja pemerintah kabupaten/kota masuk dalam kategori tidak baik dan sangat tidak baik.²⁹



Sumber: Olah Data Survei Publik FIPO 2011 - 2013

28 Ibid, Hal. 96

29 Ibid, Hal. 98

Pada 2011-2013, sebagaimana terlihat pada grafis di atas, pelayanan administrasi dasar dan perizinan, memang mayoritas responden memberikan jawaban 4 (cukup baik).³⁰ Pada grafis 1 dan 2 (atas kiri dan tengah) memperlihatkan jawaban 1 terlihat tren yang meningkat kecuali pada isu strategis 1. Dan sebaliknya pada grafis 2 terlihat menurun, kecuali pada isu strategis 4 (partisipasi dan transparansi). Jawaban 1 dan 2 adalah persepsi publik yang “sangat tidak baik” dan “tidak baik” terhadap pelayanan administrasi dasar kependudukan dan perizinan.

Pada grafis 3 (kanan atas) juga memperlihatkan tren yang sama, terjadi penurunan kecuali pada isu ke-4. Tren pada grafis 1,2, dan 3 di atas memperlihatkan bahwa persepsi publik terhadap kinerja pelayanan administrasi dan perizinan dalam kondisi yang cukup baik. Ini relevan dengan grafis 4 (kiri bawah) yang trennya terus meningkat kecuali pada isu strategis 4. Sementara pada grafis 5 (kanan bawah) justru memperlihatkan tren sebaliknya menurun hampir di semua isu kecuali isu 1.

Apa yang bisa disimpulkan dari keseluruhan grafis di atas adalah, kinerja pelayanan publik pada pelayanan administrasi dan perizinan dalam rentang waktu 2011-2013 dinilai oleh publik dengan kategori yang “cukup baik”. Namun jika dilihat dari sejauh mana keyakinan responden terhadap program-program Pemda, pada grafis 5 (kanan bawah) memperlihatkan tren yang rendah, terobosan-terobosan/program-program pemda tidak memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa program atau kebijakan itu akan memberikan dampak jangka panjang (*sustainable*).

Jika kita memerhatikan grafis 5 di atas, keyakinan publik itu juga sangat rendah kecuali pada isu aksesibilitas. Dalam rentang 2011 – 2013, tren tertinggi hanya 12,8 persen,³¹ dan tren ini malah menurun menjadi 11,7 persen pada 2013.

Rentang antara 2011 hingga 2013, memang merupakan titik balik desentralisasi pelayanan publik bidang administrasi dasar kependudukan dan perizinan. Diterapkannya KTP elektronik, membawa kondisi pelayanan administrasi dasar non perizinan menjadi sangat tidak jelas. Pelayanan seperti KK dan KTP yang sebelumnya sempat didesentralisasikan oleh beberapa kabupaten kepada kecamatan, ditarik kembali ke kabupaten dan menerapkan sistem terpusat melalui Dinas Dukcapil. Penerapan *single register* KTP mensyaratkan sebuah konsekuensi bahwa KTP dan berkas pengikutnya (KK dan Akte Kelahiran) harus dibuat dan dicetak secara terpusat di Kabupaten untuk menghindari terjadinya *double register*. Akibatnya peran kecamatan dan desa menjadi tidak begitu strategis dalam pelayanan KTP. Kecamatan

30 Lihat grafis 4 (bawah kiri)

31 Lihat grafis 5 (kanan bawah)

hanya berperan melakukan perekaman data kependudukan dan desa sebagai mobilisator penduduk untuk memperbarui KTP dan KKnya. Situasi ini menjadi semakin tidak jelas ketika KK dan KTP harus dikeluarkan secara terpusat oleh Dinas Dukcapil Daerah.

Dengan situasi yang demikian, di rentang 2011 – 2013 ini, inovasi-inovasi daerah bidang pelayanan administrasi dasar non-perizinan ini malah tidak begitu signifikan, meski terdapat beberapa daerah yang masih memberikan perhatian dengan melakukan layanan langsung *mobile* atau jemput bola.

Hal yang berbeda terjadi pada pelayanan administrasi perizinan, dimana hampir seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan telah menerapkan sistem satu atap dalam pelayanan perizinan, kecuali Kabupaten Luwu, Toraja dan Toraja Utara yang baru terbentuk. Tren penilaian publik yang “cukup baik” pada pelayanan publik di bidang administrasi dengan keyakinan publik yang stabil pada isu strategis satu sebagaimana terlihat pada grafis 5 di atas, dengan situasi yang tidak menentu dari penerapan administrasi kependudukan dan rendahnya persentase keyakinan publik, (mungkin saja) penilaian yang cukup baik itu dipengaruhi oleh apresiasi masyarakat terhadap efektivitas dan efisiensi pelayanan perizinan satu atap yang hingga 2013 ini telah hampir diterapkan oleh seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

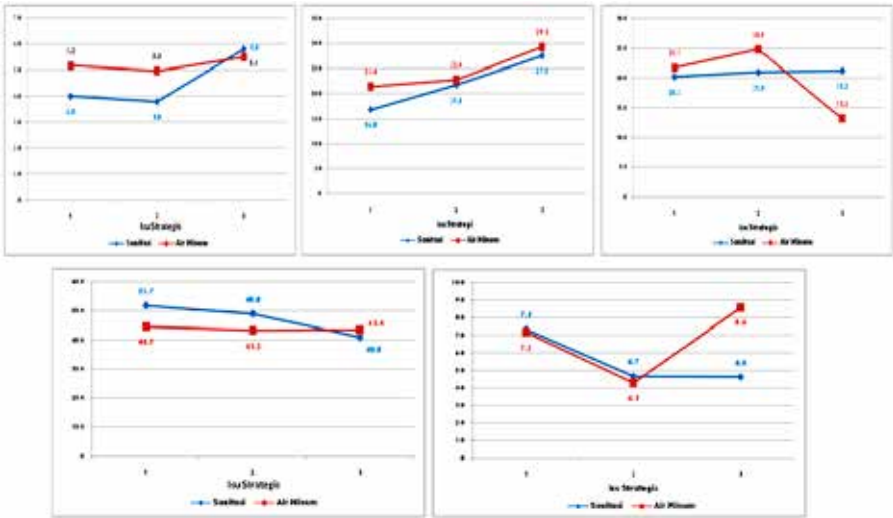
Pelayanan Publik Sanitasi dan Air Minum

Hal baru dalam monev FIPO 2013 adalah, Bidang Sanitasi dan pelayanan Air Minum. Isu sanitasi khususnya tentang akses terhadap jamban, dulunya terintegrasi dalam isu kesehatan karena dianggap relevan dengan Tupoksi yang ditangani Dinas Kesehatan. Begitu juga dengan air minum. Dalam monitoring FIPO tahun sebelumnya, air minum masuk dalam kategori bidang lingkungan. Namun, belakangan isunya bergeser seiring dengan semakin pentingnya perhatian terhadap sanitasi yang penanganannya tidak terpisahkan dengan keberadaan pelayanan air minum yang *leading sector*nya ditangani dan dikelola oleh PDAM. Isu ini menjadi semakin penting terutama di wilayah urban, yang memang semakin pesat seiring dengan dinamika dan pertumbuhan daerah selama otonomi berlangsung. Dalam monitoring FIPO terkait dengan bidang sanitasi dan air minum masing-masing terkait dengan tiga isu strategis: perbaikan kesetaraan akses, peningkatan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas dan transparansi.

Pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan disadari tidak hanya terkait pada satu aspek saja tetapi membutuhkan integrasi dari beberapa

aspek, yakni teknis air minum dan sanitasi, kelembagaan, pembiayaan, sosial, dan lingkungan hidup. Berdasarkan pemahaman itulah maka dibentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) di tingkat nasional terdiri atas sembilan kementerian/lembaga; Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Badan Pusat Statistik. Pokja ini dikoordinasikan oleh Bappenas³². Sementara di tingkat Kabupaten/Kota, Pokja AMPL terdiri dari Dinas Kesehatan yang diwakili oleh bidang P2PL, PU (Distarkim) dan PDAM. Keberadaan Pokja AMPL di Kabupaten Kota ini dikoordinasikan oleh Bappeda.

Di tingkat nasional, salah satu pencapaian penting dari keberadaan Pokja AMPL adalah tersusunnya Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL BM) dan konsep Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Lembaga. Kebijakan Nasional AMPL BM terdiri dari 11 prinsip Pembangunan AMPL BM yang dalam lima tahun terakhir telah dioperasionalisasikan dan diterapkan melalui berbagai program/proyek AMPL yang ada di Indonesia.³³ Sementara di tingkat kabupaten/kota, Pokja AMPL harus mempersiapkan dan atau menghasilkan Perda tentang Renstra AMPL yang kemudian menjadi acuan bagi pembangunan sanitasi dan air minum di kabupaten/kota.



Sumber : Olah Data Survey Publik FIPO 2013

32 <http://www.ampl.or.id/about/77-sejarah-pokja-ampl/19>
 33 Ibid

Berdasarkan hasil survei publik FIPO 2013, sebagaimana terlihat pada grafis 4 (kiri bawah) di atas, kinerja pemerintah kabupaten/kota di bidang sanitasi dan pelayanan air minum memperlihatkan bahwa, mayoritas responden memberikan tanggapan positif. Distribusi jawaban 4 ini di bidang sanitasi pada isu strategis (perbaikan kesetaraan akses) sebesar 51,7 persen, kemudian isu peningkatan partisipasi masyarakat, 48,8persen dan isu Akuntabilitas dan transparansi, 40,8 persen. Sementara pada bidang air minum, isu peningkatan kesetaraan akses 44,5 persen, isu peningkatan partisipasi 43,2 persen dan isu akuntabilitas dan transparansi 43,4 persen.

Dengan kata lain, mayoritas responden menganggap, kebijakan/program pemerintah daerah sudah berjalan (pragmatis) namun belum cukup meyakinkan untuk menghasilkan dampak positif jangka panjang (*sustainable*). Jika kita memperhatikan grafis 5 (kanan bawah) di atas, keyakinan responden untuk adanya program yang berdampak positif jangka panjang sangatlah rendah. Tren tertinggi hanya 7,3 persen untuk sanitasi dan 8,6 persen untuk air minum. (*)

Bab 3

Catatan Singkat Kemenangan Daerah



Otonomi Awards untuk Daerah Terbaik

Pada tahun kelima pelaksanaan tahapan monitoring dan evaluasi (monev) terkait hasil akhir penilaian program-program inovasi di 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, FIPO memberikan total 15 trofi Otonomi Awards (OA) kepada kabupaten/kota yang terpilih sebagai daerah yang berprestasi dalam mengembangkan program-program inovasinya dan daerah yang menjadi kategori dengan program inspiratif dan unik. Selanjutnya, dari hasil akhir penilaian OA 2013 ini, sepuluh daerah tersebut laik mendapatkan apresiasi dari FIPO, karena program yang diajukan memenuhi kriteria yang disyaratkan berdasarkan pada metodologi dan komponen-komponen penilaian OA.

Dalam *frame* FIPO, pelaksanaan OA merupakan bentuk apresiasi yang diberikan kepada daerah yang mampu membuat kemajuan. OA sengaja didesain untuk kompetisi di tingkat kabupaten dan kota. Tujuannya tidak lain adalah untuk mendorong sinergisitas pemerintah daerah agar mengupayakan

kemajuan secara bebas melalui otonomi.

Pada dasarnya, pelaksanaan OA bukanlah kejuaraan (*championship*), akan tetapi OA dirancang sebagai sistem ajang kompetisi yang menyerupai festival. Festival lebih mengedepankan karya, sementara kejuaraan lebih bersifat umum. Dalam OA tidak ada istilah juara umum tetapi hanya istilah program paling inovatif. Daerah yang menang adalah yang unggul pada suatu kategori bukan keseluruhannya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi daerah untuk mendapatkan lebih dari satu penghargaan di kategori lainnya.

Setelah tahapan penilaian rampung dan nilai telah terakumulasi seluruhnya, maka penetapan nominasi dalam tiap kategori diambil dari lima nilai tertinggi pada tiap kategori. Daerah yang memiliki nilai tertinggi dari tiap kategori tersebut laik mendapatkan penghargaan trofi OA. Sedangkan pemenang dari masing-masing *special category* merupakan kandidat atau nominasi peraih *grand category* atau *grand awards* di tiap parameter. Jadi, masing-masing parameter terdiri atas beberapa nominasi.

Sebagai contoh, pada parameter kehidupan ekonomi lokal terdapat tiga kategori, yaitu kategori pertumbuhan ekonomi lokal, pemerataan ekonomi lokal, dan pemberdayaan ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan. Jadi, kabupaten dan kota sebagai pemenang pada tiap kategori tersebut akan menjadi nomine peraih *grand category* atau *grand award*. Selanjutnya, daerah yang paling terbaik dan paling inovatiflah yang akan mendapatkan trofi *grand award*.

Pada OA 2013 ini, FIPO memberikan total lima belas trofi OA seperti yang telah disebutkan sebelumnya di atas. Masing-masing trofi tersebut terbagi dalam tiga parameter, yaitu kehidupan ekonomi lokal, pelayanan publik, dan performa politik. Parameter ekonomi lokal terdiri atas tiga trofi OA dengan masing-masing satu penghargaan tiap *special category* yang sekaligus akan menjadi *nominee* untuk mendapatkan satu trofi lagi yaitu *grand category*. Begitu pula untuk parameter pelayanan publik terdiri dari tiga trofi OA dengan masing-masing satu penghargaan tiap *special category* yang sekaligus akan menjadi nomine untuk mendapatkan satu trofi lagi yaitu *grand category*. Selanjutnya, untuk parameter performa politik hanya terdiri atas dua trofi OA dengan masing-masing satu penghargaan tiap *special category* yang juga sekaligus akan menjadi nomine untuk mendapatkan satu trofi lagi yaitu *grand category*.

Selain ketiga parameter tersebut di atas, FIPO juga mengangkat parameter khusus yaitu, air minum dan sanitasi yang juga mendapatkan dua trofi OA dengan masing-masing dari dua parameter khusus tersebut berhak mendapatkan satu penghargaan trofi OA. Namun pada parameter ini tidak terdapat trofi *grand category*. Selanjutnya, dua penghargaan lainnya adalah

program inovatif yang dianggap paling inspiratif dan kategori terunik/*distinguish* di setiap daerah.

Program inovatif yang dianggap paling inspiratif dan terunik tersebut merupakan program yang tidak dimiliki oleh daerah lain dan atau program yang memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari: 1) ide genius khas lokal, 2) asas manfaat jangka pendek dan jangka panjang, 3) administrasi atau jaminan payung hukum yang memadai, 4) komitmen anggaran, 5) jangkauan wilayah, 6) *multiplier effect*, 7) jumlah penerima manfaat, dan sebagainya. (*)

Tabel 5

Nominee dan Peraih OA 2013 Parameter Kehidupan Ekonomi Lokal

KATEGORI	NOMINEE	PROGRAM	PERAIH
Pertumbuhan Ekonomi Lokal	Bantaeng	Membangun Infrastruktur Pendorong Pertumbuhan Ekonomi	Bantaeng
	Kepulauan Selayar	Membuka Isolasi dari Suara Jangkrik menuju Suara deru Pesawat	
	Sinjai	Pengembangan Sejuta Irigasi	
	Pinrang	Bursa Kerja Online	
	Luwu	Pemanfaatan Bendungan untuk Optimalisasi Lahan Pertanian	
Pemerataan Ekonomi Lokal	Kepulauan Selayar	Tak Ada Bank, LKM Pun Bisa	Kepulauan Selayar
	Palopo	Penguatan Modal Melalui KUBE	
	Soppeng	Kucurkan Bantuan, Hidupkan Koperasi	
	Luwu Utara	Kakao Klon 45	
	Luwu	Menuju Mekanisasi Pertanian	
Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan Pengentasan Kemiskinan	Barru	Show Room Sapi	Barru
	Parepare	Pemberdayaan dan Pengembangan IKM	
	Pangkep	PUGAR KUGAR (Pemberdayaan Usaha Garam melalui Kelompok Usaha Garam)	
	Kepulauan Selayar	Fasilitasi Pengembangan UKM melalui Gema Karsa	
	Wajo	Peningkatan Kapasitas Ekonomi Rakyat	

Tabel 6

Nominee dan Peraih OA 2013 Parameter Pelayanan Publik			
KATEGORI	NOMINEE	PROGRAM	PERAIH
Layanan Pendidikan	Sidrap	Tuntas Tuna Aksara/ Calistung (Baca, Tulis, Hitung)	Sidrap
	Bone	"Tops Play" Program Pembangunan Pendidikan	
	Pangkep Kepulauan Selayar	Rakkala, Hand Traktor Lokal Versi SMK Pendidikan TK Merambah Desa	
	Luwu	Peningkatan Kualifikasi Guru	
Layanan Kesehatan	Luwu Timur Enrekang	Komisi Penanggulangan AIDS Mandiri Tingkatkan Layanan Kesehatan di Puskesmas ISO	Luwu Timur
	Luwu	Peningkatan Kualitas Dokter Spesialis dan Sarana Prasarana	
	Sidrap	Akupressure, Layanan Kesehatan Tradisional Berbasis Medis di Puskesmas	
	Takalar	"Home Care" Pelayanan Kesehatan di Rumah	
Layanan Administrasi Kependudukan dan Perizinan	Pinrang	Perizinan Terpadu yang Tidak Berliku	Pinrang
	Bantaeng	Program Layanan Terpadu	
	Palopo	Layanan Perizinan Prima	
	Sidrap Soppeng	Rapor Akseptabilitas Izin di SKPD oleh KPTSP Layanan Prima Perizinan	

Tabel 7

Nominee dan Peraih OA 2013 Parameter Performa Politik Lokal			
KATEGORI	NOMINEE	PROGRAM	PERAIH
Partisipasi Publik	Luwu Utara	Warung Demokrasi	Luwu Utara
	Bantaeng	Musrenbang Perempuan	
	Parepare	Forum Komunikasi Kelurahan Siaga	
	Luwu Timur	Kemitraan 3 Pihak (Pemerintah, PT. Vale, dan Masyarakat)	
	Bulukumba	Forum Multi Stakeholder	
Akuntabilitas Publik	Parepare Sinjai	Transparansi Dokumen Publik Secara Online Akomodasi Pengaduan Warga Melalui Radio Sinjai Bersatu	Parepare
	Luwu Timur	Tim Tuntutan Ganti Rugi	
	Maros	Lelang Jabatan/ Tes Kompetensi Terbuka Bagi Pejabat Eselon 2,3,4	
	Makassar	Audit Sosial Berbasis Masyarakat	

Tabel 8

Nominee dan Peraih OA 2013 Parameter Khusus			
KATEGORI	NOMINEE	PROGRAM	PERAIH
Air Minum	Palopo	"Bersama" PDAM, Air Bersih untuk Semua	Palopo
	Enrekang	Rekayasa Instalasi Pengolahan Air (IPA)	
	Takalar	Pasang baru sistem kredit PDAM	
	Parepare	Pelayanan Penanganan Pengaduan Pelanggan	
	Makassar	Peningkatan Layanan PDAM	
Sanitasi	Makassar	Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Sistem IPAL Komunal	Makassar
	Enrekang	Replikasi Pemicuan STBM	
	Selayar	Sanitasi untuk MBR berbasis masyarakat	
	Luwu Utara	Kampung ODF	
	Soppeng	Percepatan Pembangunan Sanitasi	

Tabel 9

Nominee dan Peraih OA 2013 Parameter Inspiratif/Unik		
KATEGORI	PROGRAM	PERAIH
Inspiratif/Unik	Peningkatan Produksi Madu Trigona Propolis Baebunta	Luwu Utara
Inspiratif/Unik	Mengubah Air Mata Menjadi Mata Air	Kepulauan Selayar

Tabel 10

Peraih Grand Awards OA 2013	
PARAMETER	PERAIH
Kehidupan Ekonomi Lokal	Bantaeng
Layanan Publik	Luwu Timur
Performa Politik Lokal	Luwu Utara

Ranking dan Peraih Otonomi Awards 2013

Penentuan peraih trofi Otonomi Awards (OA) 2013 didasarkan pada tiga komponen utama penilaian, yaitu inovasi, survei publik, dan eksisting data. Ketiga komponen inilah yang menjadi dasar pemeringkatan.

FIPO memberikan apresiasi pada tiga parameter utama, yaitu kehidupan ekonomi, pelayanan publik, dan kinerja politik. Pada penilaian OA 2013, FIPO menangkap isu baru yang kemudian dikembangkan menjadi parameter khusus, yaitu layanan air minum dan sanitasi (Bab 5). Berikut pemaparan peraih penghargaan dan nominasi dalam ajang OA 2013.

Parameter Pengembangan Ekonomi

1. Kategori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja pembangunan perekonomian suatu daerah. Keberhasilan pembangunan

jika diukur dengan indikator ekonomi mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian semakin tinggi pertumbuhan ekonomi biasanya semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam penilaian FIPO pertumbuhan ekonomi tidak hanya melihat angka statistik pertumbuhan ekonomi tetapi juga eksisting data. Berdasarkan komponen penilaian inovasi ada empat isu strategis dalam kategori ini, yaitu pendapatan daerah dan masyarakat, investasi, kesempatan kerja, dan suprastruktur-infrastruktur pertumbuhan ekonomi.

Keempat isu strategis inilah yang menjadi tolok ukur setiap program inovasi yang diajukan daerah. Setiap program harus mengusung minimal satu dari isu strategis tersebut, sehingga program yang diajukan dapat diketahui entry point penilaiannya.

Pemenang Otonomi Awards 2013

Kabupaten Bantaeng dengan program “Membangun Infrastruktur Pendorong Pertumbuhan Ekonomi”. Program yang menekankan pada isu strategis investasi ini, berhasil mengumpulkan nilai 561 mengungguli Kabupaten Kepulauan Selayar (533), Sinjai (517), Pinrang (493), dan Luwu (481).

Perkembangan ekonomi Bantaeng bergerak positif di segala bidang. Kabupaten yang memiliki karakteristik dan potensi daerah tiga dimensi ini, pegunungan, dataran, dan pantai, secara terus-menerus menggenjot pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menciptakan iklim investasi yang sehat dengan menyediakan infrastruktur dasar, seperti prasarana jalan dan pelabuhan adalah langkah strategis yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bantaeng. Kabupaten yang hanya memiliki wilayah daratan 395 km persegi ini berusaha memaksimalkan potensi dan peluang yang ada untuk membuka kran-kran investasi di segala sektor.

Membuat zonasi wilayah adalah hal pertama yang dilakukan pemerintah daerah untuk membuka sumbat kran investasi. Zonasi ini dimaksudkan agar potensi-potensi daerah di setiap wilayah, terpetakan, dan terinventarisasi secara baik. Perbaikan sistem pelayanan administrasi dan perizinan juga menjadi perhatian utama pemerintah dalam memajukan investasi.

Hal tersebut ditunjukkan dengan membuat peraturan perizinan investasi yang mudah dan transparan, dengan biaya nol rupiah serta berbagai kebijakan menguntungkan lainnya antara pemerintah dan investor. Hasilnya, dalam waktu singkat sejumlah investor, dari dalam dan luar negeri tertarik menanamkan investasinya di daerah berpenduduk sekira 178 ribu jiwa ini. Dari beberapa intervensi yang dilakukan pemerintah untuk mendongkrak

investasi bukanlah usaha yang sia-sia. Nilai investasinya mencapai Rp 30 triliun. Alhasil, Bantaeng pun melaju dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata provinsi dan nasional, tahun 2012 mencapai 8,49 persen.

Program Inovatif Daerah Nominasi

Kabupaten Kepulauan Selayar menawarkan program “Membuka Isolasi dari Suara Jangkrik Menuju Suara Deru Pesawat” dengan isu strategis suprastruktur – infrastruktur pertumbuhan ekonomi.

Berbagai kemajuan telah ditunjukkan oleh Kabupaten Kepulauan Selayar. Mulai dari pembangunan ekonomi, akses jalan, listrik, jaringan telepon seluler hingga jaringan internet. Oleh karena itu, kehidupan ekonomi masyarakat pun perlahan meningkat. Namun kendala yang sering dikeluhkan orang-orang yang hendak berkunjung ke kabupaten yang berada terpisah dari daratan Sulawesi ini adalah akses transportasinya. Kondisi inilah yang coba diatasi kabupaten yang dikenal dengan sebutan “Tanadoang” ini, dengan memanfaatkan peluang terbukanya jalur penerbangan.

Selama ini masyarakat menggunakan transportasi laut dengan memanfaatkan layanan kapal feri dari Bira Bulukumba ke Pamatata Selayar dan sebaliknya. Namun dianggap belum efektif untuk mengakses kabupaten seluas 903,50 km² ini. Terbukanya jalur penerbangan merupakan transportasi strategis yang dapat mengubah kesan Selayar sebagai kabupaten terisolasi menjadi lebih terbuka dan terakses.

Sejak 2000, Selayar pun menggalakkan transportasi cepat via pesawat udara dengan mengoperasikan dan mengembangkan Bandar Udara H. Aroepala. Pengoperasian Bandara H. Aroepala dapat menjadi bandara alternatif, sehingga jarak Selayar semakin dekat. Kemudahan transportasi ini pun mendorong mobilitas dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Selain itu, kebijakan pembukaan jalur penerbangan pun memudahkan investor untuk berkunjung serta sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat kunjungan wisata, khususnya ke kepulauan Taka Bonerate. Transportasi via kapal feri juga terus berkembang seiring dengan mobilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi.

Kabupaten Sinjai, dengan program “Pengembangan Sejuta Irigasi”. Isu strategisnya adalah suprastruktur – infrastruktur pertumbuhan ekonomi.

Luas Lahan sawah irigasi di Kabupaten Sinjai adalah 9.808 Ha, sedang sawah tanah hujan seluas 4.958 Ha. Sehingga total lahan sawah baku seluas 14.766 Ha. Untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan persawahan dibutuhkan irigasi yang sesuai. Selama ini jumlah jaringan masih terbatas

dan kondisinya sudah banyak yang rusak. Pada dasarnya, Kabupaten Sinjai memiliki potensi untuk mengembangkan jaringan irigasi, terdapat sungai-sungai kecil dan sungai besar dengan debit air yang cukup besar.

Hal inilah yang melatarbelakangi hadirnya program pengembangan sejuta irigasi, yaitu pengembangan sumber air sebanyak-banyaknya untuk mendukung usaha tani. Adapun sarana irigasi yang dibangun, diantaranya sumur tanah dangkal, embung (cekdam), pembangunan jaringan irigasi desa (JIDES), pembangunan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT), serta melakukan pompanisasi yakni pembangunan sistem pompa di daerah yang dekat dengan sumber air.

Berdasarkan data perkembangan infrastruktur pertanian Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Sinjai, sejak 2008 sampai 2012 telah dibangun 4.840 Ha JIDES dan 6.088 Ha JITUT dengan menggunakan APBD. Sedangkan yang bersumber dari bantuan sosial, telah dibangun 3.987 Ha JIDES dan 2.888 JITUT. Hasilnya, berdasarkan data perkembangan produksi komoditi padi, areal luas panen terus mengalami peningkatan, dari 19.994,75 Ha pada 2008 menjadi 24.036 Ha pada 2012. Indeks pertanian (IP) yang sebelumnya 100 menjadi 200. Produktivitas pertanian pun mengalami peningkatan karena ketersediaan air sehingga tanaman dapat bertahan sampai panen. Produksi yang sebelumnya 98.473,92 ton pada 2008, pada 2012 mencapai 116.154 ton.

Kabupaten Pinrang, dengan program Bursa Kerja Online. Isu strategisnya adalah Kesempatan Kerja.

Program bursa kerja online merupakan sarana (media) yang berisi mekanisme untuk mempertemukan pencari kerja dengan pekerjaan yang diinginkan dan pemberi kerja (pengusaha) dengan tenaga kerja yang dibutuhkan secara cepat dan tepat, dengan basis teknologi informasi (internet). Bursa kerja online merupakan program Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Kabupaten Pinrang, salah satu daerah yang merespons peluang tersebut.

Melalui program ini, membuka peluang bagi masyarakat pencari kerja untuk meraih peluang kerja. Memberikan informasi pencari kerja dan lowongan kapan saja, dimana saja pada semua masyarakat. Mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja, agar pencari kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, atau pemberi kerja memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Menciptakan pasar kerja yang luas guna menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Serta mampu mengembangkan sistem perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan permintaan pasar kerja.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai pelaksana program, tidak hanya memanfaatkan informasi kerja yang telah disediakan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dinas pun sudah menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan swasta yang siap menampung calon tenaga kerja yang ada di Kabupaten Pinrang. Selain itu, aktif memberikan informasi baik melalui pengumuman monitor info kerja yang ada di dinas terkait maupun melalui website www.infokerja.depnakertrans.go.id. Bagi pencari kerja yang melakukan pendaftaran di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, diberikan kemudahan akses internet dan bantuan atau arahan dari pegawai dalam melakukan pendaftaran.

Kabupaten Luwu, dengan program Pemanfaatan Bendung untuk Optimalisasi lahan pertanian. Isu strategisnya adalah suprastruktur – infrastruktur pertumbuhan ekonomi.

Latar belakang keberadaan program ini adalah minimnya sarana pengairan untuk kebutuhan lahan pertanian. Dalam rangka memenuhi kebutuhan air pemerintah daerah mengoptimalkan pengembangan air melalui pembangunan dan pemanfaatan bendungan.

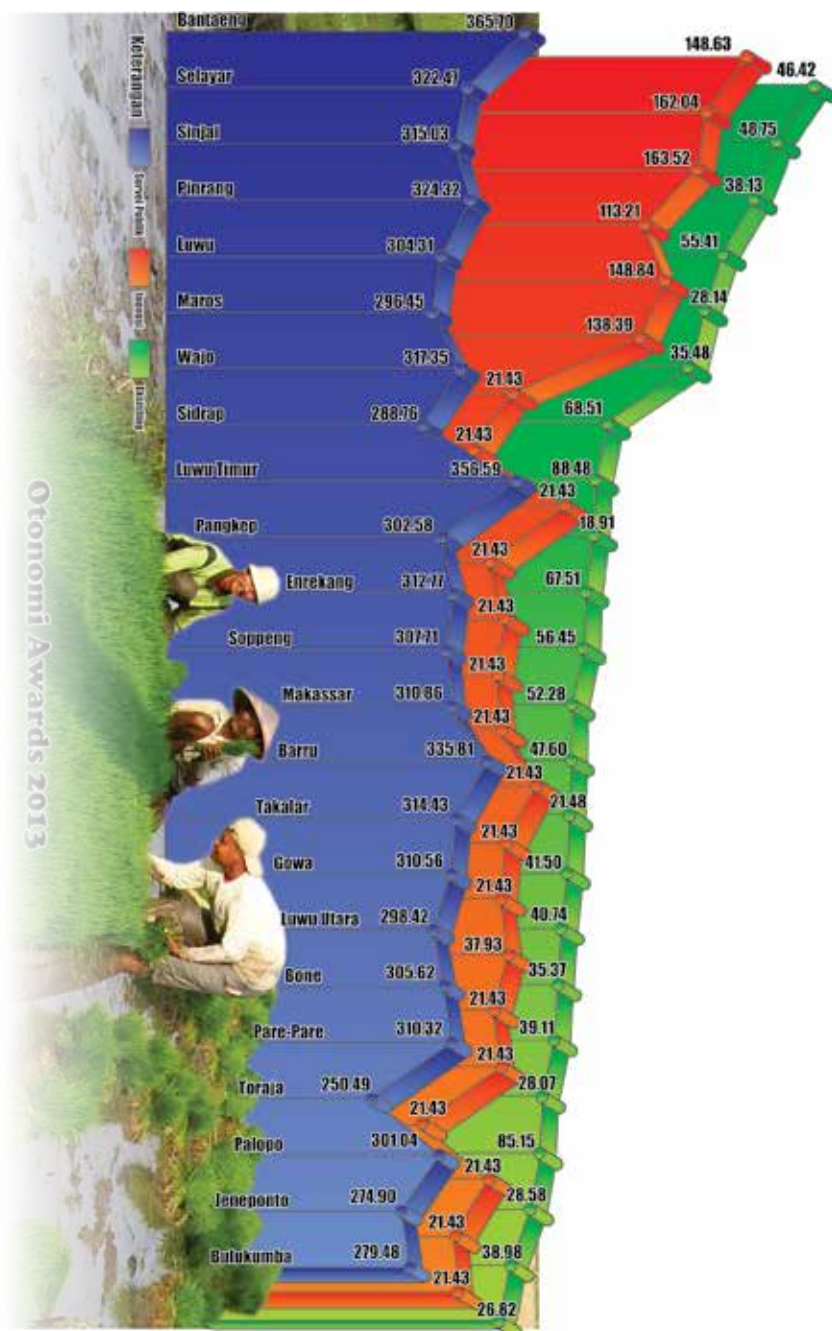
Bendung To Mattope salah satunya. Bendung ini dibangun pada 2010, dan diresmikan pada 2012. Pembangunan lengkap dengan jaringan menghabiskan anggaran Rp 116 miliar yang bersumber dari APBN. Bendung ini mengairi sawah dengan luas areal 5.829 Ha, yang tersebar di empat kecamatan yaitu Belopa, Kamanre, Belopa Utara, dan Bajo.

Bendung lainnya yang lebih dulu dimanfaatkan adalah Bendung Lamasi, yang terletak di Sungai Lamasi. Bendung ini memiliki dua pintu pengambilan (*intake*) yang merupakan sumber air irigasi bagi dua daerah irigasi yakni daerah irigasi Lamasi Kiri dan Lamasi Kanan, yang mengairi sawah dengan luas areal 9.122 Ha. Selain dua bendung dalam skala besar tersebut, terdapat beberapa bendung kecil lainnya yang dibangun untuk mengakomodasi kebutuhan air lahan pertanian di kecamatan lainnya. Hasilnya, areal luas panen mengalami peningkatan, dari 40.951 Ha pada 2011 meningkat menjadi 52.195 Ha pada 2012. Ketersediaan air yang memadai, sehingga tanaman dapat bertahan sampai panen, selain itu petani pun tidak perlu khawatir jika musim kemarau tiba. (*)

Tabel 11**I. KEHIDUPAN EKONOMI**

PERTUMBUHAN EKONOMI					
Kode	Kab/Kota	Sur. Publik	Inovasi	Eksisting	Total
1	Selayar	322.47	162.04	48.75	533.26
2	Bulukumba	279.48	21.43	26.82	327.73
3	Bantaeng	365.70	148.63	46.42	560.74
4	Jeneponto	274.90	21.43	38.98	335.31
5	Takalar	314.43	21.43	41.50	377.36
6	Gowa	310.56	21.43	40.74	372.73
7	Sinjai	315.03	163.52	38.13	516.68
8	Maros	296.45	138.39	35.48	470.33
9	Pangkep	302.58	21.43	67.51	391.53
10	Barru	335.81	21.43	21.48	378.72
11	Bone	305.62	21.43	39.11	366.17
12	Soppeng	307.71	21.43	52.28	381.41
13	Wajo	317.35	21.43	68.51	407.29
14	Sidrap	288.76	21.43	88.48	398.68
15	Pinrang	324.32	113.21	55.41	492.94
16	Enrekang	312.77	21.43	56.45	390.64
17	Luwu	304.31	148.84	28.14	481.29
18	Toraja	250.49	21.43	85.15	357.07
19	Luwu Utara	298.42	37.93	35.37	371.72
20	Luwu Timur	356.59	21.43	18.91	396.93
21	Makassar	310.86	21.43	47.60	379.89
22	Parepare	310.32	21.43	28.07	359.82
23	Palopo	301.04	21.43	28.58	351.04
24	Toraja Utara	271.74	43.93	4.45	320.12

Otonomi Awards 2013 KATEGORI PERTUMBUHAN EKONOMI



2. Kategori Pemerataan Ekonomi

Konsep pemerataan ekonomi menekankan pada pemberian kesempatan seluruh masyarakat dalam menerima dan mengelola akses ekonomi. Artinya, semakin banyak masyarakat yang merasakan hasil pembangunan dan berpartisipasi dalam proses penguasaan ekonomi maka akan berdampak pada kualitas taraf hidup masyarakat banyak secara menyeluruh.

Mendorong daerah dalam memberikan kesempatan yang sama di antara masyarakatnya dalam mengelola sumber dan potensi ekonomi secara merata yang mereka miliki, merupakan tujuan FIPO memberikan penilaian pada kategori ini.

Pemenang Otonomi Awards 2012

Kabupa ten Kepulauan Selayar menghadirkan program “Tak Ada Bank LKM Pun Bisa”, dengan isu strategis akses modal. Total perolehan nilai kabupaten yang terkenal dengan sebutan “Tanadoang” ini adalah 351, mengungguli Kota Palopo (350), Kabupaten soppeng (338), Luwu Utara (330), dan Luwu (328).

Kesulitan pelaku ekonomi mikro di wilayah pesisir dalam mengakses modal menjadi latar belakang hadirnya program ini. Keberadaan perbankan belum mampu menjadi solusi, karena ketatnya persyaratan administrasi dan mekanisme yang diberlakukan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memandang perlu ada solusi non-Bank yang mampu memberikan akses modal yang mudah dan terjangkau bagi para pelaku ekonomi mikro.

Pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, sejak 2005, telah menginisiasi dan secara konsisten memperkuat program Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai wadah bagi pelaku ekonomi mikro di wilayah pesisir dalam mengakses permodalan. Pelaku ekonomi pesisir ini biasanya didominasi oleh usaha skala mikro dengan pelaku para nelayan, buruh nelayan, pedagang sarana produksi dan hasil perikanan, pengolah hasil perikanan serta industri rumah tangga.

Dalam menjalankan program pemerataan melalui LKM tersebut, pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar memberikan kekuatan modal yang prosesnya dilakukan mulai dari tahapan pengembangan kelembagaan LKM hingga intervensi permodalan. Dinas Kelautan dan Perikanan memfasilitasi pembentukan kelembagaan LKM berdasarkan kesepakatan warga.

Kredit yang disalurkan LKM kepada peminjam berkisar Rp 2 juta hingga Rp 5 juta, dengan masa pembayaran 10 bulan dan bunga 1% – 2%. Monitoring dan evaluasi secara berkala pasca transfer/pengucuran kredit pun

dilakukan, untuk mengetahui daya serap modal dan mekanisme pengelolaan serta pengembalian dana dari peminjam kepada LKM.

Sejak digulirkan pada 2005, Pemerintah Kabupaten Selayar telah merealisasikan komitmennya dengan mengucurkan anggaran dari APBD untuk LKM yang mencapai sekira Rp 2,5 miliar. Dana ini dikelola oleh 52 LKM di 52 desa pesisir, dengan jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 2.091 pelaku usaha mikro.

Keberadaan LKM akan membantu masyarakat peisisir dalam melakukan pengembangan usahanya yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal yang penuh dengan persyaratan adminisitratif. Jika dikelola dan dilembagakan dengan baik, LKM dapat memberikan dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat pesisir dan memberi kontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan.

Program Inovatif Daerah Nominasi

Kota Palopo mengadakan program Penguatan Modal melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dengan isu strategis akses modal.

Potensi mengembangkan usaha kecil menengah Kota Palopo cukup besar. Pemerintah berkomitmen mendorong semangat berwirausaha dikalangan masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dengan melibatkan karang taruna di tingkat kelurahan, pendataan calon penerima manfaat pun dilakukan, kemudian dibentuk kelompok yang beranggotakan 10 orang tiap KUBE. Data kelompok calon penerima manfaat yang ada, dimasukkan ke Dinas Sosial. Selanjutnya diseleksi oleh dinas berdasarkan kesiapan anggaran pemerintah dengan rencana jenis usaha yang diajukan oleh setiap kelompok.

Pemerintah menyiapkan dana hibah sebanyak Rp 30 juta per kelompok. Jenis usaha yang dijalankan setiap anggota dan pengelolaan anggaran ditentukan dalam musyawarah kelompok. Ada beberapa jenis usaha yang dijalankan mulai dari usaha kios yang menjual barang campuran, menjual ikan di pasar, perbengkelan, dan jenis usaha lainnya.

Upaya pemerintah tidak berhenti sampai pada pemberian bantuan dana, pemerintah tetap melakukan pengawasan pada pembukuan yang dilaporkan oleh ketua kelompok setiap bulannya. Dengan adanya program KUBE, masyarakat tidak hanya mendapatkan akses modal untuk membuka usaha bersama, peluang kerja pun terbuka bagi masyarakat, memberikan keuntungan bagi tiap anggota kelompok melalui sistem bagi hasil dari laba penjualan yang diterima setiap bulannya, serta membangun pendidikan usaha di kalangan masyarakat.

Kabupaten Soppeng dengan program “Kucurkan Bantuan, Hidupkan Koperasi”. Isu strategisnya adalah akses modal.

Keterbatasan modal dan ketidakmampuan mengakses modal menjadi latar belakang hadirnya program ini. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah Kabupaten Soppeng kemudian memberikan bantuan modal kerja dan operasional kepada koperasi agar dapat berdaya kembali.

Bantuan dilakukan melalui beberapa tahap, pertama mengidentifikasi koperasi yang layak menerima bantuan, baik bantuan dana sosial (bansos) dari Kementerian Koperasi maupun melalui kredit usaha rakyat (KUR). Identifikasi yang dilakukan meliputi: pelaksanaan Rapat Anggaran Tahunan (RAT) minimal dua tahun dan kondisi kesehatan koperasi mulai dari organisasi atau kelembagaan dan administrasi. Setelah itu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Soppeng akan menerbitkan rekomendasi ke tingkat provinsi, dan selanjutnya ke pusat. Bagi koperasi yang memenuhi kriteria berhak untuk mendapatkan bantuan, yang akan ditransfer langsung ke rekening koperasi. Untuk bantuan melalui KUR setiap koperasi mendapatkan bantuan Rp22 juta.

Kabupaten Luwu Utara dengan program “Kakao Klon 45”. Isu strategisnya adalah distribusi pendapatan.

Cikal bakal Klon 45 berawal dari gerakan sambung samping yang dicanangkan Bupati pada 2005. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi kakao. Pembinaan yang diberikan secara terus-menerus kepada petani berdampak pada tumbuhnya minat untuk mengumpulkan dan mencari klon-klon unggul lainnya, baik dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lutra) maupun di luar, terutama klon-klon alami.

Pada 2007 Dinas Kehutanan dan Perkebunan kemudian mengadakan program Gerakan Rehabilitasi Massal Menuju Tanaman Kakao Berkualitas (Germas Takwa). Komitmen yang ditunjukkan pemerintah Kabupaten Lutra tersebut membuat para petani semakin gencar mencari klon-klon unggul. Alhasil, klon-klon unggulan lokal Lutra ditemukan, antara lain Seri M0-1 sampai dengan M0-7, Panther, dan akhirnya pada 2009 muncul Kakao Klon 45.

Salah satu upaya pengembangan klon 45 yaitu mengajarkan petani teknologi perbanyak bibit melalui sekolah lapang sambung pucuk. Hal ini dilakukan untuk membangkitkan animo petani yang selama ini ingin mengalihkan lahan kakao menjadi komoditas lain (kelapa sawit dan komoditas lainnya).

Sebagai dampak dari keberhasilan meningkatkan produksi kakao menyebabkan banyak orang yang tertarik untuk bercocok tanam. Klon 45

kini telah diminta oleh beberapa daerah untuk dikembangkan bahkan lintas provinsi. Produksi Kakao Klon 45 mencapai 3 ton per Ha per tahunnya. Jumlah petani yang terlibat 34.793 KK dengan jumlah produksi 32.691,51 ton. Pada 2012 Lutra menyumbang 37 persen dari realisasi 120 ribu ton produksi kakao Sulawesi Selatan.

Kabupaten Luwu dengan program “Menuju Mekanisasi Pertanian”. Isu strategisnya adalah sarana prasarana.

Pertanian merupakan sektor utama kehidupan di Kabupaten Luwu, oleh karena itu pemerintah daerah memberikan perhatian yang serius terhadap upaya peningkatan produksi pertanian, termasuk padi. Di sisi lain, semakin lama tenaga kerja pertanian sudah semakin berkurang, didukung keinginan masyarakat yang serba ingin praktis. Oleh karena itu, pemerintah kemudian menerapkan mekanisasi pertanian.

Pemerintah memberikan bantuan alat-alat pertanian yang dapat mempermudah pekerjaan petani. *Hand tractor* salah satunya, untuk percepatan pengolahan lahan penggunaan *hand tractor* sangat efektif. Mekanisme yang diterapkan adalah Dinas Pertanian terlebih dahulu melakukan pendataan luas lahan sawah di tiap kecamatan. Setiap 25 Ha lahan dibentuk 1 kelompok tani yang berhak mendapatkan bantuan 1 unit traktor.

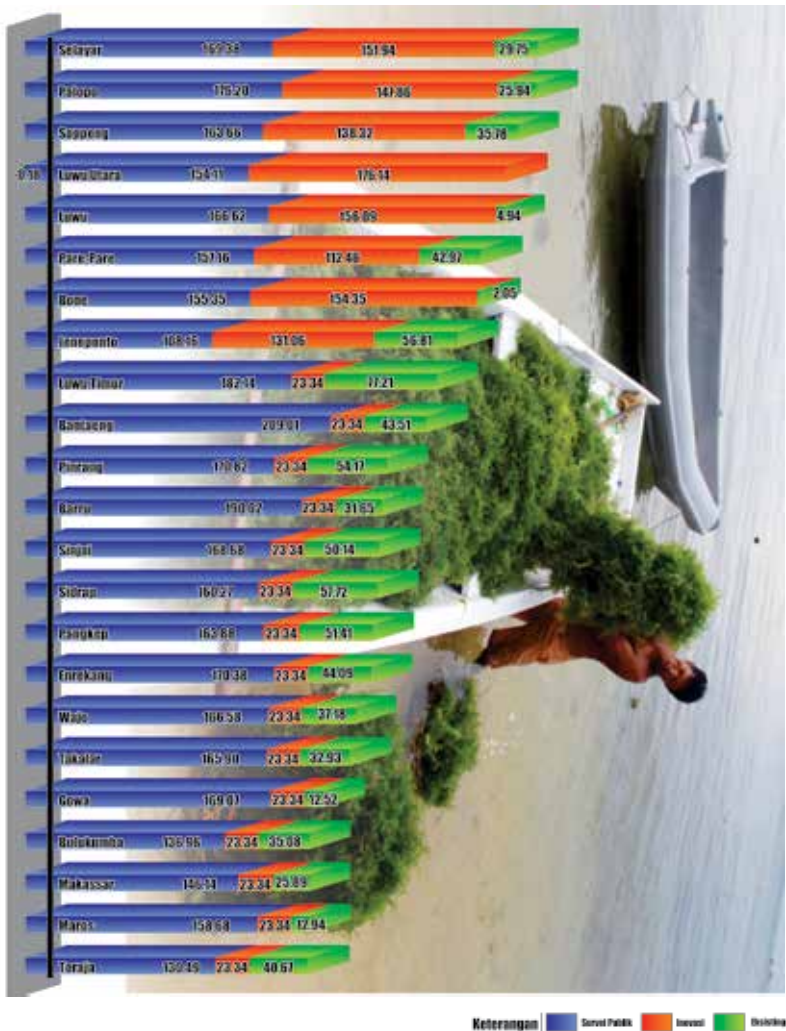
Aturan pemakaian *hand tractor* di setiap kelompok tani tergantung hasil kesepakatan kelompok. Dengan luas lahan sawah 36.299 Ha, maka kebutuhan handtraktor di Kabupaten Luwu adalah 1452 unit. Sejak tahun 2009 sampai 2012 jumlah *hand tractor* yang telah disalurkan mencapai 744 unit yang tersebar di 21 kecamatan.

Selain *hand tractor* pemerintah juga memberikan bantuan dua unit mesin panen padi (*combine harvester*). Dengan menggunakan mesin tersebut, panen 1 Ha sawah dapat diselesaikan dalam waktu 2 jam. Umumnya dengan tenaga manusia dibutuhkan 25 – 30 orang untuk menyelesaikan panen 1 Ha sawah dalam waktu satu hari. Dengan mekanisasi pertanian, produktivitas pertanian meningkat secara signifikan. (*)

Tabel 12**PEMERATAAN EKONOMI**

Kode	Kab/Kota	Sur. Publik	Inovasi	Eksisting	Total
1	Selayar	169.38	151.94	29.75	351.07
2	Bulukumba	136.96	23.34	35.08	195.38
3	Bantaeng	209.01	23.34	43.51	275.87
4	Jeneponto	108.16	131.06	56.81	296.03
5	Takalar	165.90	23.34	32.93	222.18
6	Gowa	169.07	23.34	12.52	204.94
7	Sinjai	168.68	23.34	50.14	242.17
8	Maros	158.68	23.34	12.94	194.97
9	Pangkep	163.88	23.34	51.41	238.63
10	Barru	190.02	23.34	31.65	245.02
11	Bone	155.35	154.35	2.05	311.75
12	Soppeng	163.66	138.32	35.78	337.76
13	Wajo	166.58	23.34	37.18	227.11
14	Sidrap	160.27	23.34	57.72	241.33
15	Pinrang	170.82	23.34	54.17	248.33
16	Enrekang	170.38	23.34	44.09	237.82
17	Luwu	166.62	156.09	4.94	327.65
18	Toraja	130.49	23.34	40.67	194.50
19	Luwu Utara	154.11	176.14	-0.18	330.07
20	Luwu Timur	182.14	23.34	77.21	282.70
21	Makassar	146.14	23.34	25.89	195.37
22	Parepare	157.16	112.46	42.97	312.59
23	Palopo	176.20	147.86	25.94	350.00
24	Toraja Utara	144.05	23.34	4.75	172.14

Otonomi Awards 2013 KATEGORI PEMERATAAN EKONOMI



3. Kategori Pemberdayaan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan

Pemberdayaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber-sumber ekonomi potensial melalui alih teknologi dan penerapan teknologi tepat guna. Pemberdayaan bukan hanya ditujukan pada individu semata tetapi juga kepada lembaga-lembaga yang eksis di masyarakat.

Titik sentral dari kategori pemberdayaan ekonomi terdiri dari empat isu strategis, yaitu potensi dan problem ekonomi lokal, ekonomi lemah dan ekonomi lokal, pemberdayaan lembaga ekonomi lokal, serta kapasitas ekonomi rakyat.

Pemenang Otonomi Awards 2012

Kabupaten Barru menginisiasi program “Show Room Sapi”, dengan isu strategis potensi dan problem ekonomi lokal. Kabupaten Barru mengumpulkan nilai 393, mengungguli Kota Parepare (377), Kabupaten Pangkep (370), Selayar (354), dan Wajo (349).

Sebagai daerah yang memiliki populasi ternak sapi yang terus meningkat dan sudah menjadi ternak unggulan, beternak sapi memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan masyarakat, baik dikelola secara mandiri maupun secara berkelompok. Pemerintah daerah Barru melalui Dinas Peternakan berinisiatif melakukan langkah praktis untuk lebih meningkatkan populasi dan pemeliharaan serta penertiban ternak sapi dengan melakukan perkandangan melalui program Showroom Sapi (SrS).

SrS merupakan perkandangan sapi dengan tujuan meningkatkan upaya peternakan sapi secara terintegrasi. *Showroom* adalah sebuah konsepsi, atau dapat dikatakan sebuah *branding* atau kemasan untuk menunjukkan bahwa ada pola dan standar yang berbeda dengan perkandangan biasa yang dilakukan masyarakat selama ini. Melalui SrS sapi dijadikan sebagai komoditas ekonomis yang dapat bernilai investasi.

Pola SrS merupakan solusi bagi masyarakat yang memiliki modal namun tidak mempunyai waktu untuk mengembangkan usaha. Sebagai sebuah program pemberdayaan dalam pelaksanaannya tentu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan potensi swadaya masyarakat yang ada, maupun potensi sumber daya alam.

Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator untuk pembentukan SrS. Hingga 2012, telah dibentuk 34 unit SrS dengan kapasitas rata-rata minimal 10 ekor sapi. Adapun sumber ternak terdiri atas pemerintah sebanyak 476 ekor sapi, dan 223 ekor sapi yang dikelola secara mandiri.

Program Inovatif Daerah Nominasi

Kota Parepare, dengan program Pemberdayaan dan Pengembangan IKM. Isu strategisnya adalah pemberdayaan ekonomi lemah dan ekonomi lokal.

Titik tolak dari program ini adalah keterbatasan industri rumah tangga (IKM), mulai dari sumber daya manusia yang kurang terampil, peralatan produksi masih tradisional yang berimbas pada terbatasnya produksi, dan pemasaran produk. Melihat kondisi tersebut, pemerintah daerah melakukan pemberdayaan dan pengembangan terhadap IKM yang ada.

Adapun bentuk pemberdayaan dan pengembangan yang telah dilakukan adalah mengikuti pelaku IKM dalam pelatihan-pelatihan, mulai dari menjahit (pembuatan pola), sablon, pembuatan makanan (kue tradisional, olahan jambu mete, abon ikan), bimbingan teknis home industri, penggunaan teknologi untuk peningkatan produksi, kerajinan tangan, pertukangan kayu, dan jenis pelatihan lainnya. Selain itu, memberikan bantuan peralatan kepada pelaku IKM sesuai dengan jenis industrinya. Dalam hal pemasaran, produk-produk IKM diikutsertakan dalam pameran pembangunan baik di daerah, provinsi, bahkan nasional. Pemerintah pun memfasilitasi IKM untuk promosi melalui internet dan majalah.

Komitmen pemerintah untuk melakukan pemberdayaan pun membuahkan hasil. Sumber daya semakin terampil dan jumlah produksi meningkat. Jumlah IKM pun semakin berkembang, tercatat 1.146 IKM pada 2008 dan meningkat menjadi 1.312 pada 2011.

Kabupaten Pangkep dengan inovasi “Pugar Kugar” (Pemberdayaan Usaha Garam dan Kelompok Usaha Garam). Isu strategisnya adalah potensi dan problem ekonomi lokal.

Program ini menitikberatkan pada upaya untuk memanfaatkan potensi produksi garam yang ada di Pangkep. Adanya bantuan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, membuka peluang untuk memberdayakan petani garam.

Dinas Kelautan dan Perikanan memfasilitasi pembentukan kelompok bekerja sama dengan pemerintah desa. Kelompok yang terbentuk kemudian mengajukan proposal yang akan diverifikasi kembali oleh dinas. Rata-rata tiap kelompok mendapatkan bantuan Rp23 juta untuk keperluan sarana dan prasarana produksi seperti mesin, gerabah, terpal, bahkan pembuatan gudang. Tidak hanya itu, dinas juga meningkatkan kapasitas petani melalui pelatihan teknik penggaraman yang baik, mengorganisasi kelompok, dan pengelolaan keuangan.

Sebelum adanya bantuan, melakukan penggaraman hanya merupakan

pekerjaan sampingan bagi para petani dan petambak. Saat ini, petani sudah mampu memperhitungkan kebutuhan untuk penggarapan ketika masuk musim kemarau. Persiapan untuk produksi pun sudah bisa dilakukan secara optimal karena tersedianya sarana yang memadai.

Kabupaten Kepulauan Selayar dengan program Fasilitasi pengembangan UKM melalui “Gema Karsa” (Gerakan Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan). Isu strategisnya adalah pemberdayaan ekonomi lemah dan ekonomi lokal.

Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Selayar selama ini hanya ditopang oleh upaya pemerintah, peran swasta dan masyarakat masih lemah. Hal ini didukung, minimnya pemahaman masyarakat akan dunia usaha. Oleh karena itu pemerintah memberikan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat, khususnya pemuda. Kegiatan ini sekaligus untuk mengubah *mindset* pemuda dari orang yang bekerja (pekerja) menjadi mempekerjakan orang.

Melalui pelatihan kewirausahaan, masyarakat diberikan pemahaman dan motivasi berusaha, perencanaan dan pengembangan usaha, serta berbagai permasalahan dan skema penyelesaian masalah tersebut. Untuk mendorong tumbuhnya pengusaha baru, pemerintah kemudian memberikan bantuan modal usaha dan peralatan/sarana usaha. Bantuan modal dilakukan bekerjasama dengan pihak bank, sehingga ada pengenalan antara wirausaha dengan perbankan. Selain itu, mendorong kepedulian dan keterlibatan perbankan, di sisi lain sebagai upaya untuk mendorong tumbuhnya ekonomi lokal.

Kabupaten Wajo, dengan program “Peningkatan Kapasitas Ekonomi Rakyat”. Isu strategisnya adalah kapasitas ekonomi rakyat.

Pertanian adalah sektor utama kehidupan masyarakat Wajo. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan produksi pertanian, dengan menyediakan berbagai fasilitas penunjang pertanian. Pemerintah mengupayakan membangun pertanian lengkap yaitu pembangunan agribisnis dan pabrik pengolahan.

Tanaman tebu misalnya, mulai di tanam sejak akhir \ 2009. Awalnya merupakan inisiatif dari kelompok tani yang melihat ada potensi untuk mengelola tebu di Wajo. Setelah melakukan studi banding ke Pabrik Gula Camming, dua kelompok tani mendapatkan bantuan bibit tebu (perintisan) untuk 20 Ha. Hingga 2011 (pembibitan) berkembang menjadi 49 Ha. Di tahun yang sama produksi gula merah dengan bahan baku tebu mulai dilakukan. Sudah ada dua pabrik milik kelompok tani yang dimanfaatkan

untuk mengolah tebu.

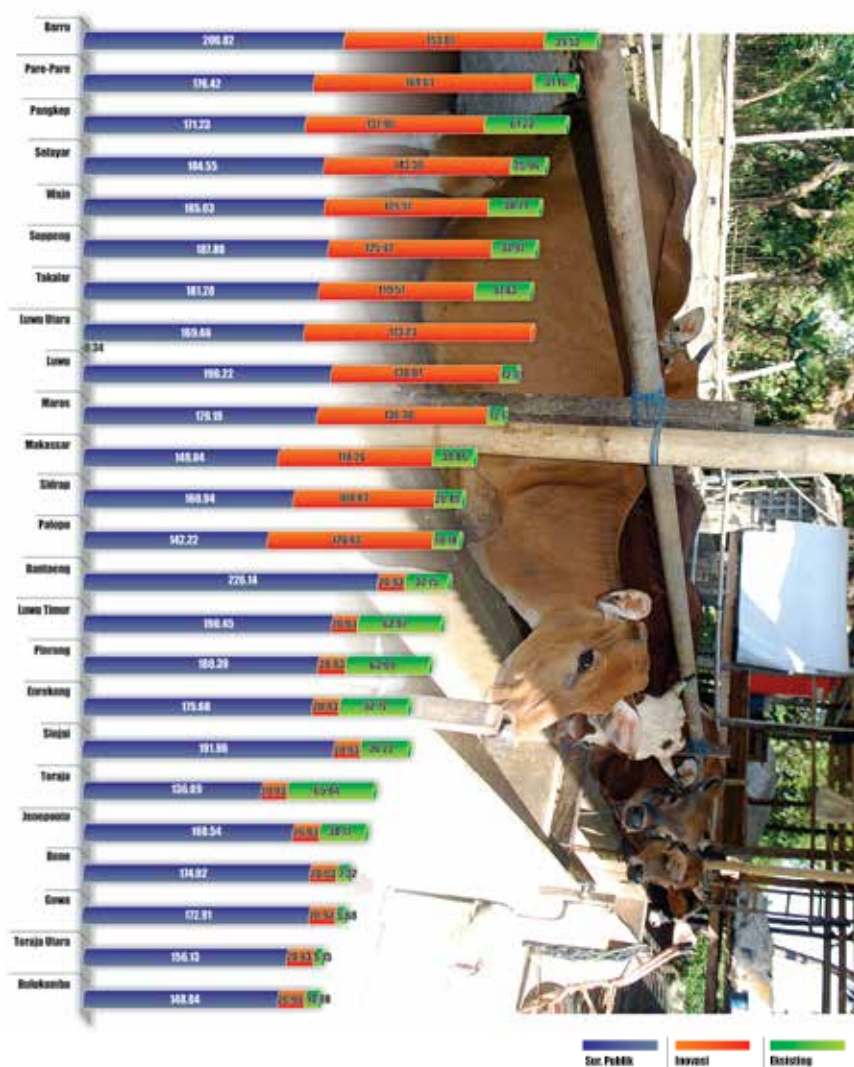
Dinas Kehutanan dan Perkebunan tetap memberikan pelatihan dan pendampingan kepada kelompok. Selain itu bantuan peralatan pun diberikan seperti 10 unit pompa dan mesin penggiling tebu. Petani tidak mengalami kesulitan untuk pemasaran produk karena permintaan cukup besar, bahkan konsumen yang datang sendiri. Produksi gula merah mencapai 14.545 ton dengan asumsi nilai produksi Rp 41.600.000/Ha (kapasitas 80 ton/Ha). Melihat peluang tersebut, pada 2012 pemerintah melalui dana bantuan sosial, memberikan bantuan bibit untuk 169 Ha kepada lima kelompok tani.

Selain tebu, tanaman kakao juga menjadi perhatian pemerintah. Fokus pemerintah pada pengembangan kakao adalah memutus siklus perantara. Pemerintah memfasilitasi adanya MoU (*memorandum of understanding*/nota kesepahaman) antara gabungan kelompok tani (Gapoktan) dengan pabrik pengolah (PT.Bumi Tangerang). Tercatat dua gapoktan telah memiliki MoU dengan pabrik, dimana satu Gapoktan terdiri atas 11 kelompok tani yang beranggotakan 25 orang/kelompok. Gapoktan menyediakan biji kakao yang telah difermentasi yang kemudian langsung dikirim ke pabrik. Untuk memaksimalkan hasil fermentasi kakao, pemerintah memberikan bantuan peralatan fermentasi dan mengikutkan petani pada sekolah lapang fermentasi. (*)

Tabel 13

PEMBERDAYAAN EKONOMI					
Kode	Kab/Kota	Sur. Publik	Inovasi	Eksisting	Total
1	Selayar	184.55	143.30	25.96	353.81
2	Bulukumba	148.84	20.93	10.98	180.75
3	Bantaeng	226.14	20.93	32.75	279.82
4	Jeneponto	160.54	20.93	30.17	211.65
5	Takalar	181.28	119.51	41.43	342.22
6	Gowa	172.91	20.93	5.68	199.52
7	Sinjai	191.96	20.93	36.22	249.11
8	Maros	179.19	130.38	12.77	322.34
9	Pangkep	171.23	137.96	61.23	370.43
10	Barru	200.82	153.01	39.52	393.34
11	Bone	174.02	20.93	7.32	202.27
12	Soppeng	187.80	125.42	32.97	346.19
13	Wajo	185.03	125.57	38.21	348.81
14	Sidrap	160.94	108.83	20.49	290.25
15	Pinrang	180.39	20.93	63.99	265.31
16	Enrekang	175.68	20.93	52.72	249.33
17	Luwu	190.22	130.07	12.01	332.29
18	Toraja	136.09	20.93	65.84	222.86
19	Luwu Utara	169.46	173.23	-0.34	342.36
20	Luwu Timur	190.45	20.93	62.97	274.35
21	Makassar	149.84	118.24	30.86	298.94
22	Parepare	176.42	169.61	31.16	377.19
23	Palopo	142.22	126.62	19.18	288.02
24	Toraja Utara	156.13	20.93	5.15	182.21

Otonomi Awards 2013 KATEGORI PEMBERDAYAAN EKONOMI



Parameter Pelayanan Publik

1. Kategori Layanan Pendidikan

Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses memanusiakan manusia, yaitu bagaimana meningkatkan harkat dan martabat manusia. Peran tersebut dapat diwujudkan bilamana lembaga pendidikan sebagai pencetak generasi penerus mampu mengatasi tantangan global sebagai konsekuensi dari berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, lembaga pendidikan dituntut mampu menghasilkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kreatif dan inovatif.

Merujuk pada pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa dunia pendidikan berperan penting sebagai pencetak generasi penerus, demi kemajuan suatu daerah bahkan suatu bangsa. Untuk itu sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian diantaranya, kesamaan akses mendapatkan pendidikan, kualitas SDM pendidikan, serta kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan. Atas dasar ini, penilaian inovasi FIPO pada kategori layanan pendidikan berpijak pada lima isu strategis yaitu, aksesibilitas (murah, mudah, terjangkau, dan merata), ketercukupan SDM, sarana prasarana pendidikan, manajemen dan sistem pendidikan, komitmen anggaran pendidikan, dan partisipasi penyelenggaraan pendidikan.

Pemenang Otonomi Awards 2013

Kabupaten Sidrap melalui program Tuntas Tuna Aksara/Calistung (Baca, Tulis, Hitung). Isu strategisnya adalah aksesibilitas (murah, mudah, terjangkau, dan merata). Total nilai Kabupaten Sidrap adalah 550, disusul Bone (545), Pangkep (521), Selayar dan Luwu (513).

Program ini diluncurkan awal 2012 dengan menelan anggaran Rp3,1 miliar. Tingginya angka buta aksara dari Badan Pusat Statistik Sidrap menjadi alasan kuat pelaksanaan program. Masalah ini dianggap penyebab indeks pembangunan manusia (IPM) masih bercokol di posisi sembilan. Sementara harapan pemerintah setempat agar IPM menembus posisi lima besar.

Melibatkan seluruh stakeholder, mulai dari pejabat setingkat bupati, jajaran SKPD, hingga masyarakat umum, program Tuntas Tuna Aksara/

Calistung (Baca, Tulis, Hitung) pun digalakkan. Memanfaatkan lokasi belajar yang tidak terlalu formal, rumah, sekolah, kantor desa, tempat ibadah, sarana umum lainnya, bahkan di lembaga pemasyarakatan. Peserta belajar tidak hanya diajarkan baca, tulis, dan hitung, tetapi juga dilengkapi dengan peralatan menulis, seperti buku dan alat tulis, tas, serta modul pembelajaran.

Setelah berjalan setahun, jumlah tuna aksara yang dituntaskan 8.000 orang atau 69 persen dari 11.540 orang. Sedang sisanya akan dituntaskan pada akhir program 2013. Harapan capaian itu agar IPM Sidrap akan meningkat. Karena IPM merupakan salah satu tolok ukur kemajuan pembangunan suatu daerah.

Program Inovatif Daerah Nominasi

Kabupaten Bone dengan program TOPs Play, Program Pembangunan Pendidikan. Isu strategisnya adalah manajemen dan sistem pendidikan.

TOPs Play merupakan program peningkatan olahraga untuk pembangunan pendidikan. Berawal dari hasil kerja sama antara The United Nation Children's Fund (UNICEF) dengan pemerintah Kabupaten Bone, yang di mulai pada 2011. Awalnya, diadakan pelatihan *master trainer* pendidikan jasmani TOPs tingkat kabupaten selama tiga hingga empat hari. Kemudian dilanjutkan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) pelatih *master trainer* pendekatan TOPs pendidikan jasmani tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang berlangsung selama dua hari.

Master trainer kabupaten yang telah mengikuti diklat, ditugaskan untuk membina dan menjadi pelatih guru-guru olahraga di tingkat sekolah. Guru-guru pendidikan jasmani diajarkan membuat sarana olahraga yang tersedia di alam sekitar, misalnya membuat modifikasi bola dari kertas dan plastik. Tujuannya, agar guru lebih kreatif sehingga keterbatasan sarana tidak lagi menjadi masalah. Selain itu, guru diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada siswa tentang cara (tahapan) dalam berolahraga. Termasuk meyakinkan semua siswa terlibat langsung saat praktik di mulai, misalnya dengan membagikan alat, sesuai kebutuhan siswa.

Pelaksanaan pelatihan guru di setiap sekolah dilakukan secara bertahap. Jika pada 2011 hanya di kecamatan Barebbo, target kedepannya adalah semua sekolah mulai tingkat SD, SMP dan SMA yang tersebar di 28 kecamatan.

Kabupaten Pangkep, dengan program "Rakkala, *Hand Tractor* Lokal versi SMK". Isu strategisnya adalah partisipasi penyelenggaraan pendidikan.

Program ini lahir untuk menjawab tantangan bupati Pangkep dalam rangka melahirkan produk yang sesuai dan mampu mendukung kebutuhan daerah dengan latar daerah kepulauan dan pertanian. Salah satunya adalah

dengan mendukung program pengadaan 800 *hand tractor* untuk petani.

Melalui mekanisme kolaborasi antarsiswa-siswa sekolah menengah kejuruan (SMK), yang ada di Pangkep. Siswa-siswa bekerja berdasarkan spesifikasi dan keahliannya masing-masing, yang didampingi oleh guru-guru sebagai tim ahli dan tim teknis. SMK Muhammadiyah Bungoro ditetapkan sebagai sentral operasional atau bengkel kerja pengadaan *hand tractor*. Terdapat 12 SMK yang dilibatkan baik negeri maupun swasta.

Pada 2012 telah lahir sebuah produk prototipe *hand tractor* Rakkala, yang masih dalam proses uji coba untuk mendapatkan lisensi produksi. Penjajakan untuk investasi pun sudah mulai dilakukan. Produksi mulai dilakukan pada 2013.

Kabupaten Kepulauan Selayar dengan program “Pendidikan TK Merambah Desa”. Isu strategisnya adalah aksesibilitas (murah, mudah, terjangkau, dan merata).

Pendidikan taman kanak-kanak (TK) penting agar peserta didik mudah beradaptasi ketika memasuki jenjang pendidikan wajib belajar (SD). Oleh karena itu, pemerintah mendorong adanya pendidikan anak usia dini sampai ke tingkat desa. Pembentukan sekolah TK sampai di desa pun telah diupayakan. Bekerja sama dengan unsur Dinas Pendidikan tingkat kecamatan, diinstruksikan pengangkatan guru TK dengan status honorer yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan pemberian tunjangan per semester dari Dinas pendidikan.

Untuk meningkatkan motivasi bekerja bagi guru TK, pemerintah mengalokasikan formasi guru TK dalam setiap penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru TK pun dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. Sampai 2012 telah terbentuk 102 TK yang tersebar di 83 desa.

Kabupaten Luwu, dengan program Peningkatan Kualifikasi Guru. Isu strategisnya adalah ketercukupan sumber daya manusia (SDM).

Program peningkatan kualifikasi guru (PNS/ non PNS) melalui pemberian tunjangan pendidikan untuk penyelesaian studi strata satu (S1), sudah dilaksanakan oleh pemerintah pusat sejak 2007. Sampai dengan 2009, di Kabupaten Luwu ternyata masih banyak guru PNS yang belum sarjana (S1), oleh karena itu Bupati mendukung program pemerintah pusat dengan mengalokasikan anggaran dari APBD untuk mensarjanakan semua guru yang berstatus PNS terlebih dahulu.

Untuk men-sarjanakan guru, Dinas Pendidikan bekerja sama dengan BKD memberikan tunjangan peningkatan kualifikasi guru (beasiswa) dalam

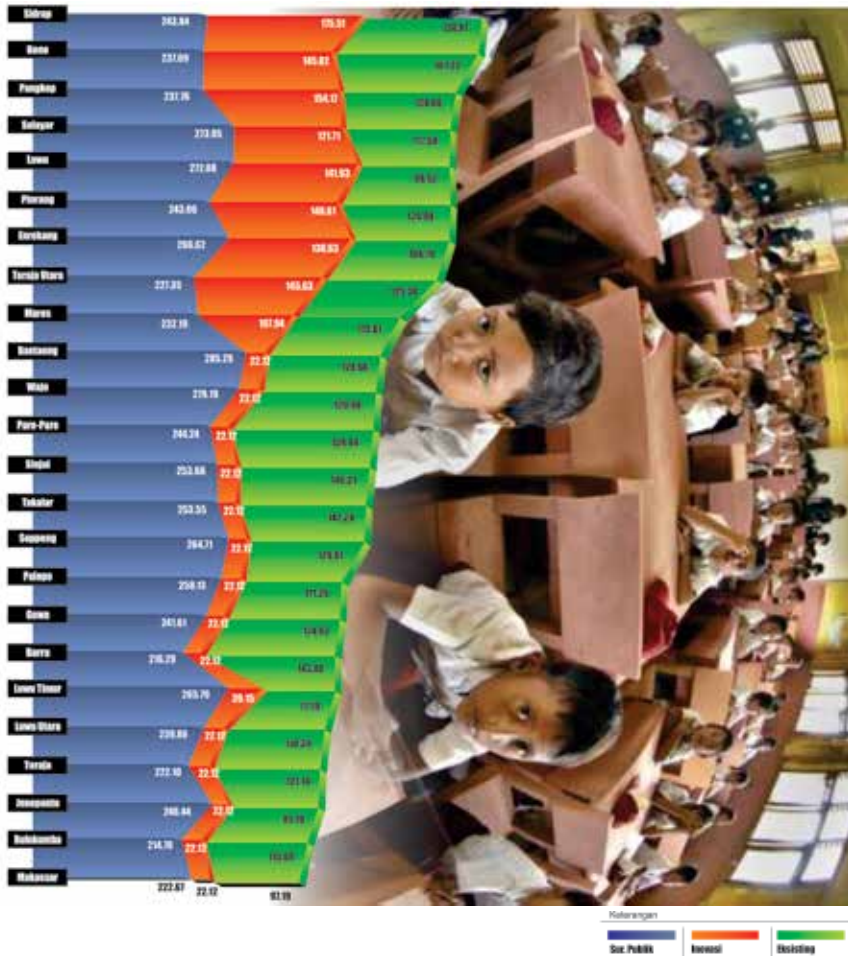
bentuk dana penyelesaian studi. Dinas Pendidikan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi berkas pemohon yang nantinya akan diberikan beasiswa, yang sumber anggarannya dari APBN sebesar Rp3.500.000,-/orang. Sedangkan beasiswa dengan sumber anggaran dari APBD Kabupaten Luwu sebesar Rp5 juta per orang, yang dikelola oleh BKD. Sejak 2009 hingga 2012, pemerintah daerah Kabupaten Luwu telah memberikan dana penyelesaian studi kepada 520 orang guru. (*)

II. LAYANAN PUBLIK

Tabel 14

LAYANAN PENDIDIKAN					
Kode	Kab/Kota	Sur. Publik	Inovasi	Eksisting	Total
1	Selayar	273.95	121.71	117.59	513.24
2	Bulukumba	214.70	22.12	115.69	352.51
3	Bantaeng	285.29	22.12	128.66	436.07
4	Jeneponto	246.44	22.12	95.10	363.66
5	Takalar	253.55	22.12	142.28	417.96
6	Gowa	241.61	22.12	124.93	388.66
7	Sinjai	253.66	22.12	146.31	422.08
8	Maros	232.19	107.94	115.61	455.73
9	Pangkep	237.76	154.17	128.80	520.73
10	Barru	216.29	22.12	143.80	382.21
11	Bone	237.69	145.82	161.22	544.73
12	Soppeng	264.71	22.12	129.61	416.44
13	Wajo	279.19	22.12	126.98	428.29
14	Sidrap	243.84	175.51	130.81	550.16
15	Pinrang	243.06	148.61	120.98	512.65
16	Enrekang	266.62	138.63	106.70	511.94
17	Luwu	272.08	141.93	98.52	512.53
18	Toraja	222.10	22.12	121.14	365.35
19	Luwu Utara	239.86	22.12	110.39	372.37
20	Luwu Timur	265.79	39.15	77.20	382.15
21	Makassar	222.67	22.12	97.19	341.97
22	Parepare	244.24	22.12	159.86	426.21
23	Palopo	258.13	22.12	111.26	391.51
24	Toraja Utara	227.35	145.63	125.38	498.36

Otonomi Awards 2013 KATEGORI LAYANAN PENDIDIKAN



2. Kategori Layanan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, tubuh yang sehat akan berimplikasi pada produktivitas seseorang maupun kelompok. Kesehatan tidak hanya menjadi indikator kesejahteraan penduduk, namun sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan program pembangunan suatu daerah. Adapun upaya untuk menilai keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan salah satunya adalah berdasarkan situasi derajat kesehatan.

Beberapa program pemerintah dalam mewujudkan derajat kesehatan bagi seluruh penduduk diantaranya adalah peningkatan pelayanan kesehatan secara mudah, merata, dan murah, yang didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan, serta penyuluhan kesehatan agar masyarakat dapat berperilaku hidup sehat. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, selain untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, secara luas pada gilirannya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pada kategori ini, ada lima isu strategis yang diajukan FIPO sebagai komponen dalam penilaian inovasi, yaitu aksesibilitas, ketercukupan SDM, sarana, prasarana, sistem perlindungan kesehatan, komitmen anggaran kesehatan, dan partisipasi penyelenggaraan layanan kesehatan.

Pemenang Otonomi Awards 2013

Kabupaten Luwu Timur menempati urutan pertama melalui program Komisi Penanggulangan AIDS Mandiri. Isu strategisnya adalah partisipasi penyelenggaraan layanan kesehatan. Luwu Timur mengumpulkan nilai 550, disusul Kabupaten Enrekang (539), Luwu (533), Sidrap dan Takalar (522).

Epidemi HIV/AIDS terus meningkat. Bukan hanya secara global, tetapi telah merambah hingga ke pelosok daerah di Indonesia. Tak terkecuali Kabupaten Luwu Timur. Posisinya sebagai daerah segi tiga emas pertemuan tiga wilayah provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara) membuat Kabupaten Luwu Timur rentan terhadap penyebaran HIV/AIDS melalui pola “barang baru stok lama”.

Penanggulangan HIV/AIDS di wilayah Kabupaten Luwu Timur diperparah lagi oleh adanya anggapan yang tabu dan perlakuan diskriminatif terhadap penderita HIV/AIDS. Kondisi ini membuat HIV/AIDS tidak sekadar mewujud sebagai masalah permukaan, tetapi merupakan masalah sosial yang fenomenanya seperti gunung es.

Pada titik inilah, keberadaan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dengan status mandiri menjadi strategis. Dalam Kerangka penanggulangan HIV/AIDS, Kabupaten Luwu Timur telah melakukan berbagai kegiatan

pengecahan, tindakan pengobatan bekerjasama dengan pihak Rumah Sakit PT. Vale hingga pengembangan SDM yang telah mampu melakukan *Voluntary Counseling Test* (VCT).

Program Inovatif Daerah Nominasi

Kabupaten Enrekang mengajukan program Tingkatkan Layanan Kesehatan di Puskesmas ISO, dengan isu strategis sistem perlindungan kesehatan.

Keberadaan puskesmas ISO merupakan salah satu upaya mengoptimalkan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk itu, pemerintah kemudian melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan agar puskesmas dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Meskipun Enrekang bukan daerah kota besar tetapi memiliki keseriusan dan komitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sampai ke pelosok.

Di 2010, tiga puskesmas Baraka, Maiwa, dan Anggeraja mendapatkan sertifikat ISO (*International Organization for Standardization*). Menyusul dua puskesmas pada 2011, puskesmas Sudu dan Kabere, dan Puskesmas Buntu Batu dan Kalosi pada 2012. Proses audit setiap enam bulan sekali oleh tim lembaga sertifikasi internasional (SAI) pun rutin dilakukan.

Sebagai syarat PKM ISO adalah pemenuhan SDM yang memadai misalnya penyediaan dokter umum, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya untuk membantu memaksimalkan pelayanan kesehatan. Selain kelengkapan SDM, pemerintah juga komitmen menganggarkan khusus untuk pembinaan puskesmas. Hasilnya, setiap puskesmas ISO terus berupaya melakukan terobosan. Puskesmas di Baraka misalnya, telah membuat terobosan yaitu melakukan program pendidikan (konseling) kesehatan ibu dan anak.

Kabupaten Luwu dengan program “Peningkatan Kualitas Dokter Spesialis dan Sarana Prasarana”. Isu strategisnya adalah ketercukupan SDM, sarana, dan prasarana.

Berstatus sebagai rumah sakit (RS) tapi memiliki keterbatasan mulai dari sarana dan prasarana, SDM, bahkan keberadaan dokter ahli, membuat RS Batara Guru masih disebut puskesmas plus pada 2005 lalu. Menyadari kondisi tersebut pemerintah daerah (Bupati) merencanakan pengembangan RS menjadi lebih baik. Bahkan Bupati berkeinginan untuk menjadikan Luwu sebagai tujuan kesehatan di wilayah Sulsel bagian utara (Luwu Raya dan sekitarnya).

Berbagai upaya pun dilakukan. Dimulai dengan melakukan akreditasi lima

pelayanan yang ada di RS Batara Guru, yaitu unit gawat darurat (UGD), rekam medik, administrasi keuangan, standar pelayanan minimum, dan perawatan. Hasil akreditasi tersebutlah yang menjadi acuan RS untuk melakukan pembenahan. Tahun 2010, pembangunan gedung baru di lahan seluas 6,5 Ha pun dimulai. Dibagi menjadi tiga gedung yaitu Gedung A (UGD), Gedung B (Poliklinik), dan Gedung C (ICU). Gedung-gedung ini pun efektif digunakan pada 2012.

Untuk meningkatkan jumlah dokter ahli yang ada di RS Batara Guru, Pemda menawarkan insentif yang cukup besar, fasilitas rumah dan mobil kepada dokter ahli. Selain itu, pemda pun menyekolahkan 15 dokter untuk mengambil spesialisasi. Cita-cita pemerintah adalah ingin menjadikan RS Batara Guru sebagai pusat rujukan penanganan stroke, hal ini juga dikarenakan untuk wilayah Luwu Raya kasus terbanyak adalah stroke dan kencing manis. Oleh karena itu, fasilitas dan SDM untuk penanganan stroke pun dilengkapi. Hasilnya jumlah pengunjung (pasien) terus meningkat setiap tahunnya baik pasien rawat jalan, rawat inap bahkan UGD.

Kabupaten Sidrap dengan program “Akupressur, Layanan Kesehatan Tradisional Berbasis Medis di Puskesmas”. Isu strategisnya adalah aksesibilitas (murah, mudah, terjangkau, dan merata).

Jenis layanan akupressur merupakan pengobatan tradisional yang dipraktekkan masyarakat setempat. Hanya saja, tidak memenuhi standar medis masih minim dan hanya berdasarkan pengalaman semata. Agar akupressur dapat dipertanggungjawabkan secara medis, Dinas Kesehatan mengutus beberapa tenaga kesehatan mengikuti pelatihan penanganan kesehatan secara tradisional yang memenuhi standar medis pada 2010. *Output*-nya pun sudah dirasakan. Sekarang ini, tiga puskesmas melayani pengobatan akupressur diantaranya Puskesmas Lawawoi, Pangkajene, dan Empagae.

Di puskesmas, layanan akupressur cukup diminati masyarakat. Di Lawawoi saja, jumlah kunjungan sejak 14 hingga 30 Desember 2011 sebanyak 16 orang. Kunjungan ini meningkat menjadi 108 orang hingga Mei 2012. Dari pengamatan lapangan, terdapat pasien yang sebelumnya lumpuh, kini dapat beraktivitas normal setelah mendapat pengobatan akupressur.

Kabupaten Takalar dengan program “*Home Care*, Pelayanan Kesehatan di Rumah”. Isu strategisnya adalah aksesibilitas (murah, mudah, terjangkau, dan merata).

Keberadaan puskesmas yang berperan sebagai pelayanan dasar masyarakat sangat dibutuhkan, khususnya pada tindakan promotif dan preventif. Meskipun tidak meninggalkan perannya sebagai kuratif (pengobatan dasar). Bidang perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) di setiap puskesmas,

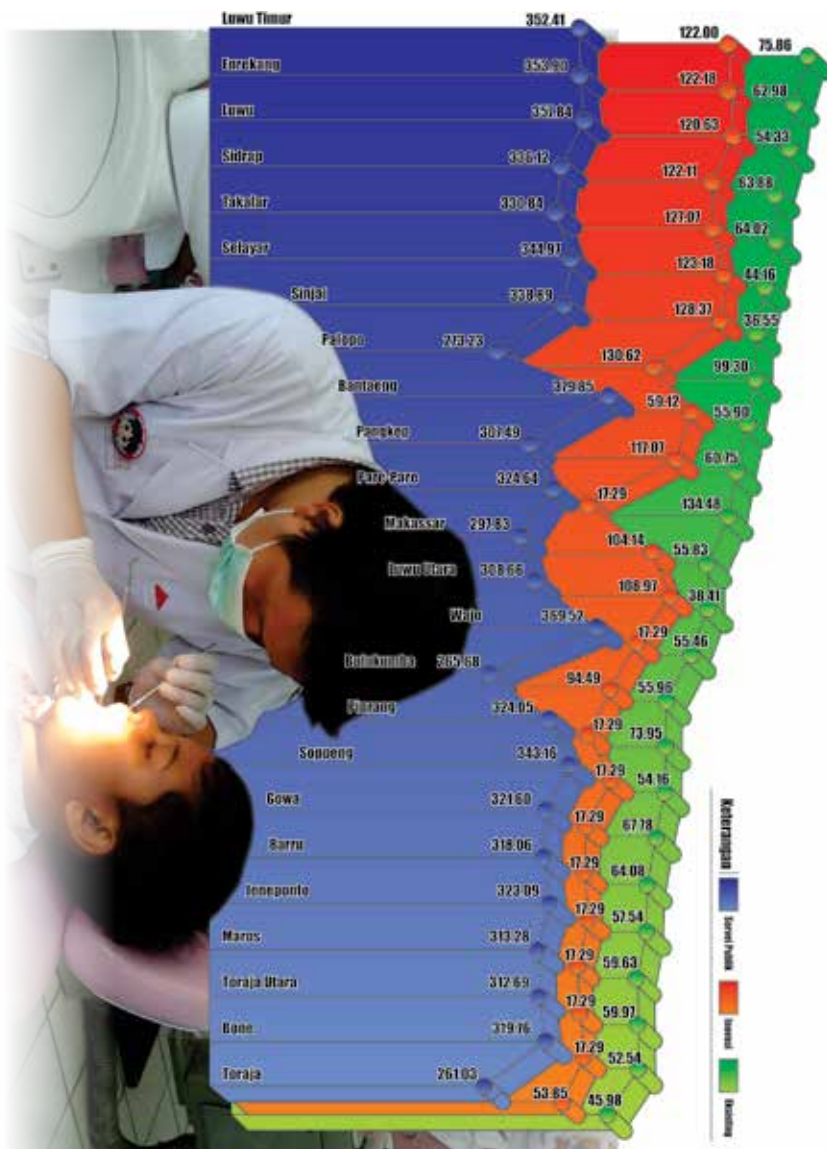
didorong oleh pemerintah melakukan tindakan pencegahan dini hingga bantuan pengobatan, baik yang telah dirawat (di rumah sakit/puskesmas) maupun yang belum pernah dirawat di rumah sakit/puskesmas.

Mekanisme *home care*, diawali dengan melakukan identifikasi di masyarakat melalui pendataan jenis penyakit sehingga dapat melakukan perencanaan, pendampingan, dan perawatan. *Home care* dianggap efektif karena suasana di rumah bersama keluarga, dapat memberi kenyamanan dan ketenangan yang diharapkan mampu memotivasi dan mempercepat, proses pemulihan kesehatan pasien. Petugas *home care* tidak hanya melakukan tindakan pengobatan tetapi juga melakukan bimbingan kepada keluarga pasien agar kedepannya dapat lebih mandiri menangani pasien. Kegiatan *home care* dilakukan tanpa pungutan biaya (gratis). (*)

Tabel 15

LAYANAN KESEHATAN					
Kode	Kab/Kota	Sur. Publik	Inovasi	Eksisting	Total
1	Selayar	344.97	123.18	44.16	512.30
2	Bulukumba	265.68	94.49	55.96	416.13
3	Bantaeng	379.85	59.12	55.90	494.87
4	Jeneponto	323.09	17.29	57.54	397.93
5	Takalar	330.84	127.07	64.02	521.93
6	Gowa	321.60	17.29	67.78	406.68
7	Sinjai	338.89	128.37	36.55	503.80
8	Maros	313.28	17.29	59.63	390.21
9	Pangkep	307.49	117.07	60.75	485.31
10	Barru	318.06	17.29	64.08	399.43
11	Bone	319.76	17.29	52.54	389.59
12	Soppeng	343.16	17.29	54.16	414.61
13	Wajo	369.52	17.29	55.46	442.27
14	Sidrap	336.12	122.11	63.88	522.11
15	Pinrang	324.05	17.29	73.95	415.28
16	Enrekang	353.90	122.18	62.98	539.05
17	Luwu	357.84	120.63	54.33	532.80
18	Toraja	261.03	53.85	45.98	360.86
19	Luwu Utara	308.66	108.97	38.41	456.04
20	Luwu Timur	352.41	122.00	75.86	550.27
21	Makassar	297.83	104.14	55.83	457.79
22	Parepare	324.64	17.29	134.48	476.42
23	Palopo	273.23	130.62	99.30	503.14
24	Toraja Utara	312.69	17.29	59.97	389.95

Otonomi Awards 2013 KATEGORI LAYANAN KESEHATAN



3. Kategori Layanan Administrasi Kependudukan dan Perizinan

Administrasi sebagai proses penyelenggaraan kebijaksanaan secara spesifik dioperasionalkan dalam konteks upaya mengurangi/menghilangkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pelayanannya. Administrasi yang baik akan mengoptimalkan tercapainya tujuan ataupun mewujudkan rencana/keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

Pada kategori ini, layanan administrasi dibedakan menjadi dua, yaitu layanan administrasi kependudukan dan administrasi perizinan. Secara umum, keduanya fokus pada kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus administrasi dengan tujuan terbentuknya manajemen pelayanan untuk keperluan perizinan dan kependudukan yang lebih efektif dan efisien. Penilaian inovasi yang dilakukan FIPO terhadap layanan administrasi kependudukan dan perizinan menekankan pada dua isu strategis yaitu, aksesibilitas layanan serta jaminan keadilan dan sistem pelayanan.

Pemenang Otonomi Awards 2013

Kabupaten Pinrang dinilai berhasil melalui program “Perizinan Terpadu yang Tidak Berliku”. Isu strategis program ini adalah aksesibilitas layanan (cepat, mudah, murah, efektivitas, dan efisiensi). Pinrang menempati urutan pertama dengan total nilai 514, diikuti Bantaeng (510), Palopo (506), Sidrap (500), dan Soppeng (499).

Komitmen pemerintah memberikan kemudahan pelayanan pada masyarakat khususnya pelayanan perizinan berbanding lurus dengan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan perizinan baik izin usaha maupun izin non usaha. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Pinrang merupakan leading sektor program pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang terletak di kantor Pusat Pelayanan Publik.

Sejak resmi dibentuk pada 2011, BP2TPM langsung berbenah. Petugas yang ramah, cepat, dan tepat melayani masyarakat menjadi pemandangan sehari-hari. Konsep pelayanan prima pun diterapkan secara maksimal. Semua tahapan memiliki standar operasional pelayanan (SOP). Tujuannya memberikan pelayanan publik sesuai harapan masyarakat.

Kemudahan mengurus perizinan merupakan upaya yang diwujudkan BP2TPM, sejalan dengan mottonya “Kepuasan Anda adalah Tujuan Kami”. Sentuhan program menfokuskan pelayanan terbaik bagi masyarakat, cepat, tidak berbelit-belit, dengan mengedepankan prinsip transparan dan akuntabel. Masyarakat cukup melengkapi berkas. Selanjutnya surat perizinan segera diterbitkan, sesuai SOP yang ditetapkan.

Selain itu, BP2TPM Pinrang saat ini telah memperoleh hak akses Sistem

Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Elektronik (SPIPISE). Perangkat SPIPISE terintegrasi antara BKPM dan kementerian/lembaga pemerintah non-departemen, terutama yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan di Indonesia. Hasilnya, ribuan surat perizinan dapat diterbitkan dalam waktu singkat. Pada 2012, BP2TPM telah menerbitkan 3.197 izin usaha dan 1.212 izin non usaha.

Program Inovatif Daerah Nominasi

Kabupaten Bantaeng mengandalkan program “Layanan Terpadu KPTSP Bantaeng”, dengan isu strategis aksesibilitas layanan (cepat, mudah, murah, efektivitas, efisiensi).

Pelayanan yang berbelit-belit sangat menyusahakan masyarakat. Oleh karena itu Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Bantaeng berupaya memberikan pelayanan maksimal dengan cara memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dan investor dalam pengurusan perizinan. Hadirnya KPTSP sejak 2009 yang melayani 10 jenis perizinan, sangat mendukung tumbuhnya iklim investasi di Bantaeng.

Mengusung prinsip transparan dan akuntabel, KPTSP memberikan jaminan pengembalian dua kali lipat kepada masyarakat yang dimintai pungutan liar. Sampai saat ini, belum ada kasus terkait hal tersebut. Selain itu, untuk memudahkan investor, KPTSP menerima berkas administrasi baik melalui email ataupun faks, staf bagian informasi yang akan melakukan pengecekan dan verifikasi berkas perusahaan untuk ditindaklanjuti. Pada 2011 KPTSP mengeluarkan 1.449 perizinan dan meningkat menjadi 1.901 perizinan pada 2012.

Kota Palopo mengajukan “Layanan Perizinan Prima”, dengan isu strategis aksesibilitas layanan (cepat, mudah, murah, efektivitas, dan efisiensi).

Keberadaan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Palopo sejak 2007 mendukung tumbuhnya iklim investasi di Kota Palopo. Jumlah perizinan yang dikeluarkan tiap tahunnya mengalami peningkatan. Jumlah layanan perizinan tahun 2011 sebanyak 8.174 perizinan. Sedangkan 2012 meningkat menjadi 8.542 perizinan. Bertambahnya jumlah perizinan yang dikeluarkan disebabkan penerapan layanan yang cepat, mudah, dan transparan.

Pengurusan perizinan di KPT semuanya berdasarkan SOP yang ditetapkan. Untuk memaksimalkan pelayanan perizinan, KPT membuka ruang publik untuk berperan dalam memberikan pengaduan berupa masukan/saran, ataupun kritikan sebagai upaya evaluasi dan perbaikan layanan. Hal tersebut dilakukan melalui kerja sama KPT dengan media cetak Palopo Pos.

Melalui MoU, ditetapkan bahwa Koran Palopo Pos menjadi salah satu wadah KPT untuk melakukan sosialisasi dan menerima pengaduan dari masyarakat. Pengaduan ini diterbitkan sekali dalam sepekan. Setelah pengaduan tersebut diterima oleh pihak petugas KPT, maka akan ditindaklanjuti hari itu juga. Bentuk tindak lanjutnya tergantung isi pengaduan, apakah hanya perlu klarifikasi atau evaluasi perbaikan layanan.

Kabupaten Sidrap dengan program “Rapor Akseptabilitas Izin di SKPD oleh KPTSP”. Isu strategisnya adalah aksesibilitas layanan (cepat, mudah, murah, efektivitas, dan efisiensi).

Kabupaten Sidrap sedang giat menerapkan layanan perizinan terpadu. Di bawah pengelolaan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP), jumlah layanan yang ditawarkan 21 jenis perizinan.

Mengusung motto “Semua Lebih Mudah”, membuat KPTSP memanjakan pemohonnya. Sebagai garansi mottonya, KPTSP menerapkan *SMS center*. Cukup menekan 082373499900, pemohon mendapatkan informasi posisi berkasnya, syarat tiap jenis perizinan, dan jawaban pengaduan. Masyarakat pun diberikan kemudahan untuk mendapatkan formulir permohonan perizinan karena disebarakan sampai ke kantor desa, kelurahan, dan kecamatan.

Hal yang berbeda pada KPTSP Sidrap adalah adanya rapor SKPD. Ketika KPTSP mengirimkan staf untuk meminta tim teknis di SKPD terkait, memverifikasi kelengkapan atau kelayakan perizinan yang akan diterbitkan, SKPD terkait akan memberikan verifikasi sesuai waktu yang telah ditentukan. Jika SKPD tidak memberikan balasan verifikasi, maka KPTSP akan memberikan rapor “Baik” atau “Buruk”. Hasil laporan ini dikirimkan kepada Sekretaris Daerah untuk ditindaklanjuti.

Pengiriman berkas pendaftaran untuk permohonan rekomendasi atau penilaian teknis, tim teknis SKPD berhak menolak secara teknis, atau menerima dengan alasan yang sesuai. Adanya rapor SKPD meminimalisasi lambatnya pelayanan karena persoalan teknis adminisitrasi.

Kabupaten Soppeng dengan program “Layanan Prima Perizinan”. Isu strategisnya adalah aksesibilitas layanan (cepat, mudah, murah, efektivitas, dan efisiensi).

Pemerintah daerah menyadari bahwa ada permasalahan dalam pelayanan publik khususnya layanan perizinan. Hal ini terkait belum adanya kepastian pelayanan. Oleh karena itu pada 2012, Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) mengadakan sosialisasi pelayanan perizinan pada 18 kecamatan di Soppeng, yang dihadiri oleh kepala desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, pengusaha, dan pengurus koperasi.

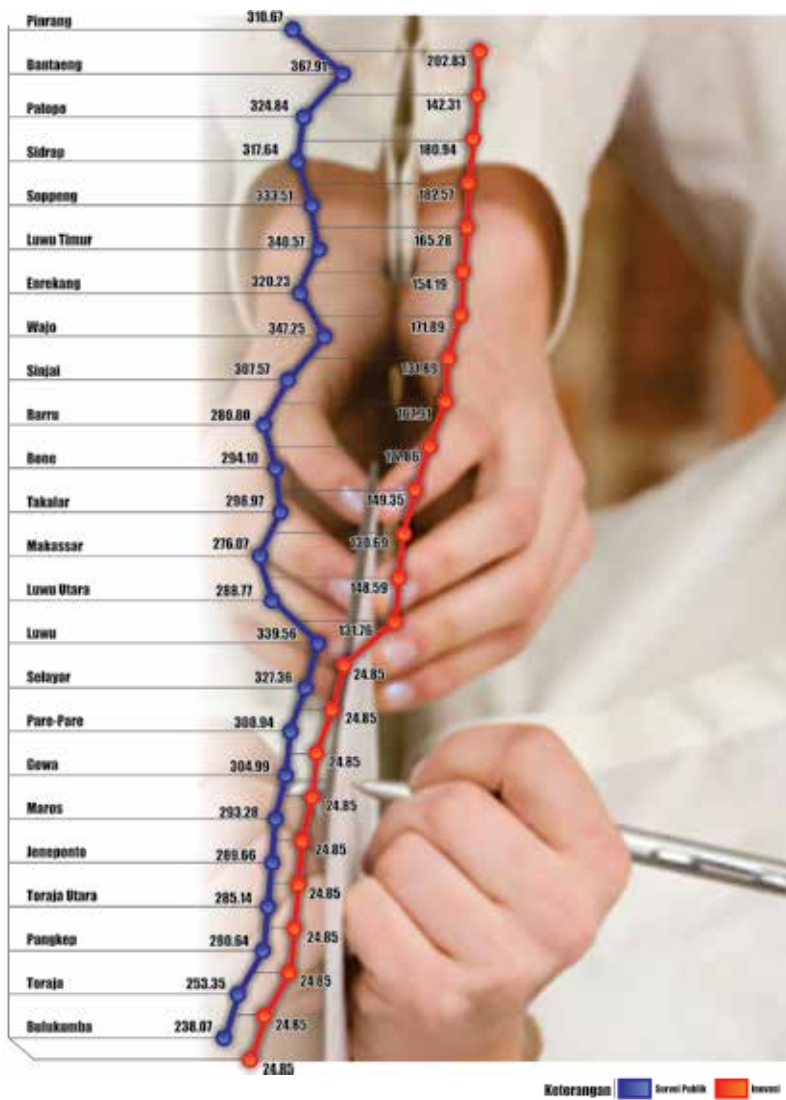
Untuk memaksimalkan pelayanan, KPT menyediakan sistem antrian elektronik, dan akses informasi melalui *website* www.kpt.soppeng.go.id. Melalui *website* ini, masyarakat bisa memperoleh informasi terkait jenis perizinan yang dilayani, retribusi yang dibebankan, serta rekapitulasi laporan penerbitan izin yang ter-update setiap hari kerja. Selain itu, masyarakat dapat mengambil formulir pendaftaran perizinan melalui *website*. Berdasarkan surat keputusan kepala KPT tentang petugas layanan gerak, KPT juga menyediakan layanan jemput bola yaitu mengantarkan izin yang telah diterbitkan yang belum diambil pemohon setelah lewat batas waktunya. (*)

Tabel 16

LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & PERIZINAN				
Kode	Kab/Kota	Sur. Publik	Inovasi	Total
1	Selayar	327.36	24.85	352.21
2	Bulukumba	238.07	24.85	262.92
3	Bantaeng	367.91	142.31	510.22
4	Jeneponto	289.66	24.85	314.51
5	Takalar	298.97	130.69	429.66
6	Gowa	304.99	24.85	329.84
7	Sinjai	307.57	167.91	475.48
8	Maros	293.28	24.85	318.13
9	Pangkep	280.64	24.85	305.49
10	Barru	280.80	177.86	458.66
11	Bone	294.10	149.35	443.45
12	Soppeng	333.51	165.28	498.79
13	Wajo	347.25	131.89	479.14
14	Sidrap	317.64	182.57	500.20
15	Pinrang	310.67	202.83	513.50
16	Enrekang	320.23	171.89	492.12
17	Luwu	339.56	24.85	364.41
18	Toraja	253.35	24.85	278.20
19	Luwu Utara	288.77	131.76	420.54
20	Luwu Timur	340.57	154.19	494.76
21	Makassar	276.07	148.59	424.66
22	Parepare	308.94	24.85	333.79
23	Palopo	324.84	180.94	505.78
24	Toraja Utara	285.14	24.85	309.99

Otonomi Awards 2013

KATEGORI LAYANAN ADMINISTRASI & PERIZINAN



Parameter Kinerja Politik Lokal

1. Kategori Partisipasi Publik

Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan maupun proses implementasi dan evaluasi merupakan isu yang masih sulit untuk terwujud dalam era otonomi. Pelibatan dalam berbagai level kebijakan itulah yang selama ini kita kenal dengan istilah partisipasi. Konsepsi ini tidak sekadar merupakan keterlibatan masyarakat dalam prosedural demokrasi yang hanya terdefinisi dalam pemenuhan hak politik untuk memilih. Tetapi, konsepsi partisipasi sejatinya juga menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintahan, terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan.

Konsep partisipasi sendiri telah dikenal sejak 1970-an, namun dalam pelaksanaannya, masih belum ditemukan sebuah format yang tepat. UU No.25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) menegaskan salah satu tujuannya adalah untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian secara yuridis, format partisipasi masyarakat telah mendapatkan ruang yang cukup memadai.

Terkait kategori partisipasi publik, FIPO menekankan pada tiga isu strategis, yaitu proses pembangunan (perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi), proses penganggaran publik, dan proses pembuatan kebijakan daerah.

Pemenang Otonomi Awards 2013

Kabupaten Luwu Utara, melalui program “Warung Demokrasi”, dengan isu strategis proses pembangunan, berhasil mengumpulkan nilai 505, mengungguli Kabupaten Bantaeng (497), Kota Parepare (478), Kabupaten Luwu Timur (450), dan Kabupaten Bulukumba (334).

Diskusi-diskusi yang berkembang di masyarakat, tidak mendapat respons dari pemerintah karena wadah untuk mempertemukan antara masyarakat dengan penentu kebijakan memang tidak tersedia. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Forum Masyarakat Luwu Utara (FAKTA). Melalui warung demokrasi, FAKTA menghadirkan berbagai narasumber mulai dari bupati dan wakil bupati, unsur SKPD, dan legislatif.

Kegiatan utama Warung Demokrasi adalah diskusi yang membahas isu-isu utama, baik skala lokal maupun isu nasional yang punya korelasi kuat dengan persoalan pembangunan di Lutra. Sebelum proses diskusi berlangsung narasumber memberikan materi pengantar sesuai dengan tema diskusi yang

dilaksanakan. Melalui forum inilah peserta/masyarakat bisa bertanya langsung berbagai hal terkait tema diskusi, selanjutnya pihak pemerintah menjawab atau mengklarifikasi pertanyaan atau tanggapan dari peserta diskusi.

Acara diskusi yang dihadiri hingga 50 orang ini, disiarkan live Radio Adira Masamba. Animo masyarakat berpartisipasi dalam diskusi cukup baik, karena keterbukaan dijamin. Masyarakat yang tidak sempat hadir pun diberikan kesempatan untuk bertanya melalui nomor 0811 460 9250 dan narasumber langsung menjawab.

Program yang hanya berawal dari diskusi di warung kopi, telah melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang menjadi masukan/rekomendasi dalam perencanaan pembangunan di Luwu Utara. Di antaranya program revitalisasi Sungai Masamba yang telah dianggarkan di APBD 2013.

Program Inovatif Daerah Nominasi

Kabupaten Bantaeng dengan program “Musrembang Perempuan”. Isu strategisnya adalah proses pembangunan.

Peran perempuan dalam proses perencanaan dan pembangunan masih sangat rendah. Akibatnya, aktor-aktor pembangunan didominasi laki-laki, dan program-program yang terakomodir dalam perencanaan jarang yang menyentuh pihak perempuan. Peran-peran perempuan pun setiap hari makin terdistorsi. Oleh karena itu, pemerintah bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) berusaha memaksimalkan peran perempuan dalam pembangunan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang biasanya berlangsung sehari ditambah porsi satu hari lagi, khusus untuk menampung aspirasi kaum perempuan. Pesertanya murni perempuan yang ada di desa, tapi tetap didampingi unsur BPD dan kepala desa. Hasilnya pun menggembirakan, tingkat partisipasi perempuan dalam musrenbang semakin tinggi, identifikasi kebutuhan program jauh lebih mudah dan merata, dan varian program di desa lebih variatif dan menyentuh sektor-sektor rumah tangga.

Kota Parepare dengan program “Forum Komunikasi Kelurahan Siaga”. Isu strategisnya adalah proses pembangunan.

Forum Komunikasi Kelurahan Siaga (FKKS) dibentuk untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan kelurahan siaga. FKKS bekerja sama Dinas Kesehatan melakukan upaya sosialisasi untuk merangsang replikasi kelurahan siaga Model Operasional Desa Siaga (MODS). Awalnya, program ini dibiayai oleh *Second Decentralized Health Service Project* (Proyek DHS-2), namun telah berakhir pada tahun 2011. Hal ini tentunya

menjadi kendala bagi pengembangan MODS ke depannya. Padahal keberadaan kelurahan siaga MODS sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dari segi pelayanan kesehatan dasar. Itulah sebab, dipandang patut dipertahankan dan dilanjutkan.

Hasil komunikasi pengurus forum kelurahan siaga kemudian menemukan peluang melalui Peraturan Daerah No. 1 tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Masyarakat. Hasilnya kelurahan siaga pun mendapatkan pembiayaan dari APBD Parepare 2012 yang melekat pada pagu wilayah Dinas Kesehatan sebesar Rp. 530.950.000,-.

Selain melakukan advokasi dan pendampingan intensif untuk mendapatkan dukungan kebijakan dan pembiayaan pemerintah daerah, FKKS pun berhasil menginisiasi terbentuknya tiga kelurahan siaga baru. Sehingga sampai dengan tahun 2012, total terbentuk 14 kelurahan siaga dari target 22 kelurahan yang ada hingga 2015.

Kabupaten Luwu Timur dengan program “Kemitraan Tiga Pihak”. Isu strategisnya adalah proses pembangunan.

Setiap tahunnya PT. Vale rutin merealisasikan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Besarnya dana yang terealisasi mencapai Rp50 miliar, namun dampak yang dirasakan tidak jelas, baik pada pembangunan dan pengembangan masyarakat maupun pada pembangunan infrastruktur publik. Bahkan menjadi bagian dari tingginya inflasi yang terjadi di Lutim terutama di daerah terdampak.

Tidak jelasnya dampak dan penerima manfaat/sasaran dari realisasi CSR tersebut, membuat Bupati Luwu Timur menginstruksikan untuk menghentikan sementara realisasi CSR PT. Vale sejak awal 2012. Dari hasil evaluasi program, lahirlah kemitraan tiga pihak antara PT.Vale, pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dan masyarakat dalam program pengembangan masyarakat melalui CSR PT. Vale. Kesepakatannya adalah, pemerintah turut serta sebagai elemen komplementer dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring terhadap realisasi CSR PT. Vale.

Tahapan sementara, melibatkan unsur pemerintah desa dan kecamatan dalam melakukan asistensi, seleksi, dan verifikasi terhadap proposal yang diajukan warga/kelompok. Setelah itu, dilakukan monev yang melibatkan unsur SKPD dan PT.Vale. Hasilnya, penerima manfaat lebih jelas dan daya serap anggaran lebih terukur. Kedepannya program yang diajukan oleh masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari PT.Vale tidak lagi dengan proposal, akan tetapi berdasarkan hasil perencanaan melalui musrembang, yang dampaknya lebih terukur dan transparan.

Kabupaten Bulukumba dengan program “Forum *Multi-Stakeholder*”. Isu strategisnya adalah proses pembangunan.

Forum *multi-stakeholder* merupakan kegiatan dialog dan diskusi mengenai berita-berita yang hangat di media (baik cetak maupun elektronik) terkait Kabupaten Bulukumba, baik itu pemerintahannya, birokrasi, maupun masyarakatnya sendiri. Tidak hanya mengundang organisasi kemasyarakatan, LSM, organisasi mahasiswa dan organisasi pemuda, forum ini juga menghadirkan unsur-unsur pemerintah sebagai narasumber.

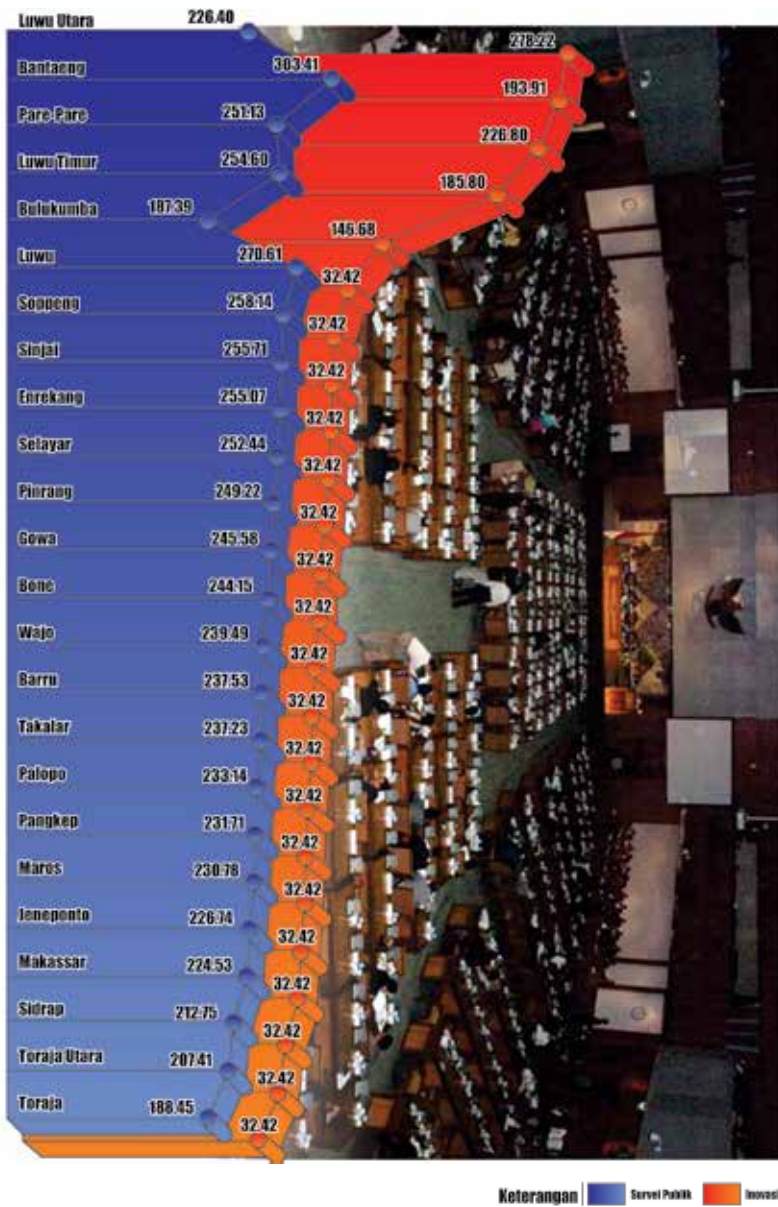
Melalui forum ini masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi yang ditanggapi langsung oleh narasumber. Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap minggu ini, juga terlibat aktif dalam upaya peningkatan pengetahuan dan wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda. Melalui mediasi Kesbangpol, kemudian dibentuk Pusat Pendidikan Kebangsaan berdasarkan keputusan Bupati Bulukumba Nomor 444/XI/2012 tentang kelompok kerja pusat pendidikan kebangsaan. (*)

III. PERFORMA POLITIK LOKAL

Tabel 17

PARTISIPASI PUBLIK				
Kode	Kab/Kota	Sur. Publik	Inovasi	Total
1	Selayar	252.44	32.42	284.86
2	Bulukumba	187.39	146.68	334.08
3	Bantaeng	303.41	193.91	497.32
4	Jeneponto	226.74	32.42	259.15
5	Takalar	237.23	32.42	269.65
6	Gowa	245.58	32.42	278.00
7	Sinjai	255.71	32.42	288.13
8	Maros	230.78	32.42	263.20
9	Pangkep	231.71	32.42	264.13
10	Barru	237.53	32.42	269.95
11	Bone	244.15	32.42	276.57
12	Soppeng	258.14	32.42	290.56
13	Wajo	239.49	32.42	271.91
14	Sidrap	212.75	32.42	245.16
15	Pinrang	249.22	32.42	281.64
16	Enrekang	255.07	32.42	287.49
17	Luwu	270.61	32.42	303.03
18	Toraja	188.45	32.42	220.87
19	Luwu Utara	226.40	278.22	504.62
20	Luwu Timur	254.60	185.80	440.40
21	Makassar	224.53	32.42	256.95
22	Parepare	251.13	226.80	477.92
23	Palopo	233.14	32.42	265.56
24	Toraja Utara	207.41	32.42	239.83

Otonomi Awards 2013 KATEGORI PARTISIPASI PUBLIK



2. Kategori Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang dimintai pertanggungjawaban meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Mekanisme yang akuntabel akan memperlihatkan sejauhmana pemerintahan berjalan, bagaimana perencanaan dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, bagaimana kebijakan, dan bagaimana penyusunan dan penggunaan anggaran publik diketahui secara terbuka dan dipertanggungjawabkan. Dengan demikian ciri-ciri pemerintah yang akuntabel adalah pemerintahan yang mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat, mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, dan adanya sarana publik untuk menilai kinerja pemerintah.

Akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme yang meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber publik dan perilaku kerjanya. Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program.

Dalam bingkai FIPO indikator akuntabilitas publik dikaitkan dengan beberapa isu strategis, yakni transparansi, akses informasi, sanitasi birokrasi, pengaduan masyarakat, serta responsivitas dan responsibilitas aparatur.

Pemenang Otonomi Awards 2013

Kota Parepare mengusung program “Transparansi Dokumen Publik secara Online”, sebagai inovasi pada kategori akuntabilitas dengan isu strategis akses informasi. Melalui program ini Kota Parepare berhasil menempati urutan pertama dengan perolehan nilai 421, disusul Kabupaten Sinjai (419), Luwu Timur (398), Maros (381), dan Kota Makassar (373).

Aturan mengenai transparansi terhadap dokumen publik sudah diatur

dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Menindaklanjuti undang-undang tersebut, pemerintah Kota Parepare mengeluarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 45 Tahun 2011, tentang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Kepala PPID. Dalam rangka menyediakan akses informasi publik, PPID Parepare menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendukung seperti desk layanan informasi dan layanan akses internet gratis.

Realisasi peraturan tersebut, dirasakan tidak lama setelahnya. Melalui website pemerintah kota pareparekota.go.id, masyarakat diberikan akses untuk mendapatkan dokumen publik yang dibutuhkan. Mulai dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), laporan keuangan, APBD, dokumen statistik, serta dokumen transparansi pengelolaan anggaran daerah lainnya.

Program Inovatif Daerah Nominasi

Kabupaten Sinjai mengajukan “Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Sinjai Bersatu (RSB)”, sebagai salah wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan akses informasi.

Hadirnya RSB merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik. Melalui penyiaran informasi di RSB, pemerintah berbagi berbagai kebijakan pemerintah, publikasi dan promosi potensi daerah, pelestarian budaya daerah, serta melakukan komunikasi dialogis dengan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bersama-sama memberikan kontrol dalam pemerintahan dan pembangunan.

Berbagai program yang dilaksanakan Radio SB FM, setidaknya telah mengakomodasi keluhan dan saran dari masyarakat dan mewujudkan transparansi kegiatan dan anggaran dari pemerintah. Misalnya program Ma’Ca (Mari Bicara), yang menghadirkan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai untuk memberikan informasi tentang program kerja instansinya. Setelah itu, masyarakat (pendengar) diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, saran, bahkan menyampaikan keluhan.

Selain Ma’Ca, program lain yang ditawarkan antara lain Penyuluh Berbagi, Ada Pak Desa Siaran (APDESI), Dokter Kita, Suara Masyarakat Suara Kita (SMS Ka), Jurnal Aspirasi Rakyat (Jas Rakyat), serta Dialog Hukum. Rentang

waktu siaran terkait program-program tersebut adalah pukul 11.00-12.00 WITA dan 13.00 – 15.00 WITA, mulai Senin – Kamis setiap minggunya. Radio SB FM pun telah menyediakan fasilitas radio digital yang dapat diakses melalui website www.sbfmsinjai.com, sehingga masyarakat yang berada di luar Sinjai tetap dapat mendengarkan siaran. Tidak hanya yang sedang *live*, siaran-siaran yang sudah lewat juga dapat diakses kembali.

Kabupaten Luwu Timur dengan program “Tim Tuntutan Ganti Rugi”. Isu strategisnya adalah responsivitas dan responsibilitas aparatur.

Tuntutan ganti rugi (TGR) bukan hal baru dalam program pemerintahan. TGR merupakan keharusan yang diatur dalam peraturan pemerintah tentang penyelesaian kerugian negara dan daerah terkait adanya temuan keuangan dalam pemeriksaan keuangan oleh aparat pemeriksa. TGR perlu untuk penyelesaian damai dalam penggantian temuan keuangan yang ditemukan dalam proses pemeriksaan keuangan oleh aparat pemeriksa.

Tim TGR Luwu Timur terdiri atas Tim Tindak Lanjut dan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR). Keberadaan MPTGR ini yang membedakan Tim TGR Luwu Timur dengan daerah lainnya. Jika Tim Tindak Lanjut bertugas menginventarisasi semua temuan keuangan dan melakukan langkah-langkah penyelesaian tindak lanjut temuan keuangan, maka MPTGR bertugas melakukan sidang upaya damai dalam hal penyelesaian temuan keuangan. Penanganan penyelesaian keuangan yang tidak bisa diselesaikan dalam persidangan MPTGR diserahkan kepada pihak yang berwajib berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Butuh komitmen dari pemerintah daerah untuk konsisten melaksanakan program ini. Penyelesaian temuan keuangan oleh Tim Tindak Lanjut mencapai 84,80 persen dari 290 rekomendasi temuan pada 2011, dan meningkat 92,77 persen dari 308 rekomendasi temuan pada 2012. Adapun pengembalian keuangan dari temuan yang diselesaikan oleh Tim Tindak Lanjut mencapai Rp 854 juta pada 2011, dan Rp 349 juta pada 2012. Sedangkan melalui MPTGR mencapai Rp 115 juta pada 2011, dan Rp 265 juta pada 2012.

Kabupaten Maros mengajukan program “Lelang Jabatan, Tes Kompetensi Terbuka Bagi Pejabat Eselon”, dengan isu strategis sanitari birokrasi.

Penentuan pejabat eselon di Kabupaten Maros tidak serta merta diputuskan oleh Bupati. Pemerintah daerah dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terlebih dahulu melakukan tes kompetensi terbuka atau lelang jabatan untuk mengisi jabatan/posisi yang kosong mulai dari level eselon IV, III, bahkan II.

Mekanismenya adalah pertama, BKD melakukan pengumuman secara

terbuka kepada seluruh PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Maros. Melalui surat pengumuman/edaran BKD mengumumkan posisi/jabatan yang lowong lengkap persyaratan yang dibutuhkan beserta prosedur untuk melakukan pendaftaran. Kelengkapan berkas pendaftar akan diverifikasi oleh panitia. Pendaftar yang dinyatakan lolos uji berkas, dipersiapkan untuk mengikuti tes kompetensi yang terdiri atas tes tertulis dan wawancara.

Tes tertulis terdiri atas tes pengetahuan umum, tes keahlian mengenai pilihan jabatan yang dipilih, dan tes psikologi (psikotes). Sedangkan tes wawancara dilakukan oleh Baperjakat. Tidak jarang tes wawancara ini dilakukan langsung oleh bupati. Seluruh skor kemudian akan diakumulasi berdasarkan hasil tes kompetensi, pengalaman dan golongan. Hanya tiga ranking teratas direkomendasikan kepada bupati untuk diputuskan. Khusus untuk pejabat eselon II diputuskan oleh gubernur. Setelah ada keputusan bupati, maka BKD mempersiapkan surat keputusan pengangkatan sebagai pejabat, kemudian dilakukan pelantikan dan sertijab.

Kota Makassar dengan program “Audit Sosial Berbasis Komunitas”. Isu strategisnya adalah pengaduan masyarakat.

Audit sosial adalah penilaian program pembangunan yang melibatkan masyarakat/komunitas, kelompok rentan/marginal/miskin, secara langsung untuk mencari hal-hal penting yang berkaitan dengan masalah pembangunan. Audit sosial melihat sejauh mana sebuah kebijakan dianggap dapat menyelesaikan masalah masyarakat secara substansial melalui cross check terhadap isi cakupan kebijakan, penyelenggaraan kebijakan oleh institusinya, persepsi penerima manfaat, hasil yang diharapkan secara faktual dan dampak sosial atas kebijakan.

Pemerintah Kota Makassar dan Yayasan Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk bekerja sama melakukan audit sosial, sejak 2011. Fokus audit adalah pada program pendidikan gratis Kota Makassar atau sekolah bersubsidi penuh dan pelayanan kesehatan gratis. Tujuan audit sosial diantaranya: pertama, mendorong pemerintah makassar agar dapat membangun partisipasi publik dalam pelaksanaan akuntabilitas pembangunan dan membuka ruang pengawasan publik. Kedua, mengintegrasikan penguatan kapasitas pemerintah dan komunitas dalam melakukan audit sosial sebagai instrumen penerapan akuntabilitas publik, dan menjadi gerakan sosial bersama antara pemerintah dan masyarakat. Serta, membangun kemitraan pemerintah Kota Makassar dengan masyarakat dalam pembelajaran audit sosial dalam melakukan kontrol bersama terhadap beberapa program pembangunan yang dijalankan oleh SKPD terkait TKPKD.

Proses audit dilakukan melalui mekanisme *focus group discussion* (FGD), dan wawancara mendalam. Awalnya audit hanya dilakukan di kawasan tertentu, namun sejak 2012 sudah melibatkan seluruh kecamatan (14 kecamatan) yang terbagi dalam lima wilayah komunitas. Setiap komunitas di wakili oleh 20 orang, yang melibatkan pihak sekolah dan puskesmas terkait. Hasilnya, terbentuk kelompok komunitas pengawas pembangunan yang melakukan audit sosial, yang menghasilkan rekomendasi langsung dari masyarakat terhadap program yang dilaksanakan oleh pemerintah kota. (*)

Tabel 17

AKUNTABILITAS PUBLIK				
Kode	Kab/Kota	Sur. Publik	Inovasi	Total
1	Selayar	224.82	26.68	251.50
2	Bulukumba	165.38	26.68	192.06
3	Bantaeng	270.69	26.68	297.37
4	Jeneponto	187.51	26.68	214.19
5	Takalar	204.32	26.68	231.00
6	Gowa	196.70	26.68	223.38
7	Sinjai	230.80	188.50	419.30
8	Maros	202.26	178.53	380.79
9	Pangkep	198.88	26.68	225.56
10	Barru	172.93	26.68	199.61
11	Bone	207.68	26.68	234.36
12	Soppeng	217.85	137.74	355.59
13	Wajo	177.84	26.68	204.52
14	Sidrap	167.46	47.22	214.68
15	Pinrang	210.15	26.68	236.83
16	Enrekang	205.85	26.68	232.53
17	Luwu	238.77	72.25	311.02
18	Toraja	160.90	26.68	187.58
19	Luwu Utara	206.05	163.03	369.08
20	Luwu Timur	211.11	187.01	398.12
21	Makassar	197.51	175.33	372.83
22	Parepare	208.35	213.05	421.40
23	Palopo	122.36	26.68	149.04
24	Toraja Utara	173.10	26.68	199.78

Otonomi Awards 2013 KATEGORI AKUNTABILITAS PUBLIK



Bab 4

Praktik Cerdas Otonomi Awards 2013



KABUPATEN BANTAENG

Peraih Otonomi Awards 2013 Kategori Pertumbuhan Ekonomi

Membangun Infrastruktur Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

ANDI MATTINGARAGAU T

Peneliti FIPO

Predikat sebagai kabupaten yang tumbuh pesat pantas disematkan kepada Kabupaten Bantaeng. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan per kapita penduduk meningkat. Penurunan penduduk miskin dan penurunan pengangguran terbuka, merupakan bukti keberhasilan daerah berjuluk Butta Toa ini.

Monitoring-evaluasi (money) The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) terkait penilaian Otonomi Awards (OA) 2013 menetapkan Bantaeng sebagai daerah dengan terobosan paling inovatif bidang pertumbuhan ekonomi. Raihan total pencapaian nilai sebesar 561 poin, masing-masing; inovasi 366 poin, survei publik 149 poin, dan *existing condition* 46 poin.

Torehan nilai ini mampu mengungguli empat kabupaten lainnya yang harus puas di posisi nominasi. Keempat daerah tersebut adalah Kepulauan Selayar dengan 533 poin, Sinjai 517 poin, Pinrang 493 poin, dan Luwu 481 poin.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantaeng beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan. Terhitung sejak 2008 hingga 2012 pertumbuhan ekonomi berturut-turut sebesar 5,73 persen, 7,32 persen, 7,9 persen, 8,43 persen, dan 8,49 persen. Tren peningkatan ini membuktikan kontribusi berbagai sektor ekonomi Kabupaten Bantaeng mengalami pertumbuhan.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah kabupaten Bantaeng telah menggenjot penambahan panjang jalan, baik yang beraspal, kerikil, maupun jalan dengan permukaan tanah. Pada 2009, jalan yang telah tersedia sepanjang 556,15 km meningkat menjadi 564,01 km pada 2010 dan meningkat tipis menjadi 565,79 km pada 2011. Komitmen pembangunan jalan tidak lain untuk mendukung mobilitas mutasi barang dan jasa dari sentra-sentra produksi ke konsumen. Sekaligus membuka isolasi daerah terpencil dan memperlancar akses transportasi antar-daerah.

Selain membangun sarana transportasi antar-daerah, Kabupaten Bantaeng juga mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru bernuansa wisata. Seperti pengembangan Pantai Marina, pusat jajanan Pantai Lamalaka, dan pusat jajanan Pantai Seruni.

Pengembangan pusat wisata pantai dan laut sangat memungkinkan karena ditunjang kondisi geografis Kabupaten Bantaeng yang memiliki pantai. Dalam zonasi pengembangan potensi unggulan, wilayah barat Kabupaten Bantaeng masuk dalam kategori zona klaster pesisir yang sangat memungkinkan pengembangan objek wisata pantai dan laut.

Posisi strategis objek-objek wisata yang berada pada poros Makassar-Bulukumba, tentunya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya juga meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kendaraan yang lalu lalang antara Makassar-Bulukumba, tentu akan menyempatkan waktunya beristirahat sejenak.

Mereka tak sekadar istirahat belaka, tetapi juga mengecek sakunya untuk membeli berbagai kebutuhan termasuk oleh-oleh. Bagi yang ingin menikmati suasana wisata keluarga, Kab. Bantaeng juga punya, apalagi didukung pusat jajanan yang disajikan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM). Wisata ini berdampak terhadap peningkatan pendapatan bagi para pelaku UMKM.

Inovasi ekonomi tidak hanya sampai di situ. Pemkab Bantaeng juga membangun pelabuhan Mattoangin sebagai sarana arus barang dan jasa antar-provinsi. Pembangunan kawasan industri Kabupaten Bantaeng, pembangunan pabrik pupuk SRF, industri perakitan mobil, dan perencanaan produksi industri nikel.

Dari berbagai program pembangunan ekonomi yang dilaksanakan Pemkab Bantaeng telah berbuah manis. Jumlah orang miskin kurun waktu 2007 hingga 2011 memperlihatkan tren penurunan. Tren penduduk miskin pada 2007 hingga 2011 berturut-turut sebesar 12,12 persen, 10,94 persen, 10,24 persen, 10,25 persen, dan 9,21 persen. Begitu juga dengan angka pengangguran terbuka yang cenderung turun.

Terhitung kurun waktu 2008 hingga 2011, angka pengangguran terbuka masing-masing 9,32 persen, 7,15 persen, 5,51 persen, dan 4,5 persen. Penurunan ini menunjukkan jika program ekonomi yang dijalankan selama ini mampu menyerap tenaga kerja sehingga jumlah orang yang menganggur dapat dikurangi dari tahun ke tahun.

Jika dilihat dari PDRB per kapita penduduk 2008 hingga 2011 juga mengalami peningkatan. PDRB perkapita penduduk 2008 hingga 2011 berturut-turut Rp 5,9 juta, Rp 8,9 juta, Rp 10,9 juta, dan Rp 12,2 juta. Peningkatan ini setidaknya memberikan gambaran jika masyarakat selama ini telah merasakan dampak positif dari pengembangan pembangunan ekonomi.

Prestasi bidang ekonomi yang dicapai sejalan dengan bingkai FIPO terkait dengan isu strategis yang diusung Kabupaten Bantaeng pada kategori pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah yang pada akhirnya berkorelasi terhadap peningkatan pendapatan bagi masyarakat luas.

Bukti keberhasilan pembangunan ekonomi dapat juga dilihat dari sisi PAD. Pada 2011 PAD mencapai Rp15,15 miliar meningkat 20,35 persen menjadi Rp18,23 miliar pada 2012. Peningkatan PAD menunjukkan sumber-sumber pendapatan daerah telah berdaya. Seperti objek pembayaran pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lalin yang sah.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantaeng meningkatkan pertumbuhan ekonomi merupakan komitmen untuk membangun daerah guna mencapai visi di bidang ekonomi. Mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi baru merupakan strategi ekonomi yang dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat.

Pada akhirnya, Kabupaten Bantaeng yang dikenal selama ini cenderung stagnan, kini menjelma sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang spektakuler melampaui pertumbuhan ekonomi tingkat nasional. (*)

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Peraih Otonomi Awards 2013 Kategori Pemerataan Ekonomi

Tak Ada Bank, LKM pun Jadi

IHSANUL AMRI

Peneliti FIPO

Kendala umum pelaku ekonomi mikro di wilayah pesisir adalah sulitnya akses terhadap modal. Kesulitan mengakses modal ini menjadi problem serius bagi sistem dan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada investasi dan pertumbuhan. Pemkab Kepulauan Selayar punya cara menyalurkan modal; melalui LKM bukan bank.

Ketatnya mekanisme dan persyaratan administrasi yang diberlakukan bank plus minimnya pengalaman perbankan dalam menyalurkan kredit mikro,

menjadi kendala tersendiri bagi pelaku ekonomi mikro dalam mengakses modal di perbankan. Oleh karena itu, perlu ada solusi non-bank yang mampu memberikan akses modal yang mudah dan terjangkau bagi para pelaku ekonomi mikro ini.

Ibarat pepatah tak ada rotan akarpun jadi, “Tak ada Bank LKM pun Jadi”, Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, sejak 2005 telah menginisiasi dan secara konsisten memperkuat program Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai wadah bagi pelaku ekonomi mikro di wilayah pesisir dalam mengakses permodalan. Pelaku ekonomi pesisir ini biasanya didominasi oleh usaha skala mikro dengan pelaku para nelayan, buruh nelayan, pedagang sarana produksi dan hasil perikanan, pengolah hasil perikanan serta industri rumah tangga.

Kemajuan yang positif dari upaya pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar ini mengantarkannya meraih penghargaan Otonomi Awards di bidang pemerataan ekonomi. Predikat terbaik ini didapatkan berdasarkan penilaian FIPO dari sejumlah komponen (inovasi 151,9; survei publik 169,38; eksisting 29) dengan total nilai 351,07. Nilai ini, bersaing dengan empat kabupaten lainnya sebagai nominasi, yakni Kota Palopo (350), Kabupaten Soppeng (337), Kabupaten Luwu Utara (330) dan Kabupaten Luwu (327).

Dalam menjalankan program pemerataan melalui LKM tersebut, pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar memberikan perkuatan modal yang prosesnya dilakukan mulai dari tahapan pengembangan kelembagaan LKM hingga pada intervensi permodalan. Dinas Kelautan dan Perikanan memfasilitasi pembentukan kelembagaan LKM berdasarkan kesepakatan warga. Setelah kelembagaan terbentuk, dinas selanjutnya memfasilitasi pembuatan rekening di Bank Pembangunan Daerah. Setelah itu dilakukan pelatihan SDM LKM dalam hal pengelolaan keuangan, administrasi, dan pelaporan.

Ketika LKM telah siap, dinas kemudian melakukan transfer dana untuk disalurkan kepada masyarakat pelaku ekonomi mikro. Para peminjam/kreditor mengajukan permohonan bantuan modal kepada LKM, yang kemudian diverifikasi oleh LKM. Setelah verifikasi itu dinyatakan lengkap administrasi, LKM kemudian menyetujui untuk memberikan komitmen kredit. Terakhir, LKM mencairkan kredit mikro kepada peminjam.

Adapun besaran kredit yang disalurkan LKM kepada peminjam minimal Rp2 juta dan maksimal Rp5 juta, masa pembayarannya 10 bulan dengan bunga 1 – 2%. Keseluruhan proses dari pasca- transfer dan pengucuran kredit, oleh dinas dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait dengan daya serap modal dan mekanisme pengelolaan serta pengembalian dana dari peminjam kepada LKM.

Sejak program ini digulirkan pada 2005, Pemerintah Kabupaten Selayar telah merealisasikan komitmennya dengan mengucurkan anggaran APBD untuk LKM telah mencapai total anggaran sekira Rp2,5 miliar. Dana ini dikelola oleh sekira 52 LKM pada 52 Desa pesisir dengan jumlah penerima manfaat telah mencapai 2091 pelaku usaha mikro. Dampak program tersebut relevan dengan data ekonomi Bank Indonesia (BI) terkait dengan kredit umum di Kabupaten Selayar yang mengalami peningkatan dari Rp128 miliar pada 2010 meningkat menjadi Rp203 miliar pada tahun 2011.

Program perkuatan modal UKM di wilayah pesisir melalui LKM, menjadi strategis mengingat beberapa keunggulan yang dimilikinya, yakni; LKM tidak menggunakan pola pelayanan keuangan perbankan konvensional, terutama tidak mensyaratkan kolateral dan tidak terdapat proses administratif formal yang menyulitkan, sehingga sangat aksesibel bagi para pelaku usaha mikro yang bergerak dalam pengolahan hasil laut dan perikanan. Lebih dari itu karena sasarannya adalah masyarakat miskin dan kelompok atau pengusaha mikro, dimana jasa keuangan yang diberikan dapat disesuaikan dengan karakteristik kelompok sasaran tersebut.

Keunggulan lain yang utama adalah dalam penyaluran kredit menggunakan pendekatan kelompok, mengedepankan pola hubungan kepercayaan dan kenal dekat sebagai landasan utama mengelola risiko.

Perkuatan modal UKM akan memberikan manfaat yang mampu mendorong dan membina pelaku usaha mikro di wilayah masyarakat pesisir agar tidak meminjam uang pada rentenir. Dengan demikian akan membantu masyarakat pesisir dalam melakukan pengembangan usahanya yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal yang penuh dengan persyaratan administratif.

Jika dikelola dan dilembagakan dengan baik LKM dapat memberikan dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat pesisir dan memberi kontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan. (*)

KABUPATEN BARRU

Peraih Otonomi Awards 2013 Kategori Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Showroom Sapi Sejahterakan Peternak

ABD. HAFID

Peneliti FIPO

Sapi sebagai salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Barru mampu memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga peternak. Melalui program Showroom Sapi (SrS), Barru dapat pula meningkatkan nilai ekonomi komoditi lainnya melalui sinergisitas para pengembangnya.

Monitoring dan evaluasi (money) The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) terkait penilaian Otonomi Awards (OA) untuk 2013 menetapkan Kabupaten Barru menjadi pemenang sebagai daerah dengan terobosan paling inovatif pada kategori bidang pemberdayaan ekonomi lokal. Total perolehan nilai yang dicapai sebesar 393 poin, masing-masing dengan nilai inovasi 153 poin, survei publik 201 poin, dan existing 39 poin.

Perolehan nilai ini mampu mengungguli empat kabupaten/kota lainnya. Yang harus puas meraih posisi nominasi yaitu Parepare dengan nilai 377 poin, Pangkep 370 poin, Kepulauan Selayar 354 poin, dan Wajo 349 poin. Kabupaten/kota lain pun ke depannya harus lebih mengenyot lagi program-program unggulannya untuk dapat bersaing dengan kabupaten/kota yang telah meraih penghargaan OA 2013 ini.

Sebagai daerah yang memiliki peningkatan populasi ternak sapi yang cukup bagus, Kabupaten Barru mengenyot peningkatan ekonomi peternak melalui program Showroom Sapi (SrS).

SrS merupakan perkandangan sapi dengan tujuan meningkatkan upaya peternakan sapi secara terintegrasi. *Showroom* adalah sebuah konsepsi, dapat pula dikatakan sebuah *branding* atau kemasan untuk menunjukkan bahwa ada pola dan standar yang berbeda dengan perkandangan biasa yang dilakukan masyarakat selama ini.

Awal terbentuknya SrS ini mula-mula berorientasi pada sistem penggemukan sapi, karena sulitnya mendapatkan bibit. Seiring perkembangannya, *showroom* ini kemudian menjadi tempat untuk melihat sapi yang akan dijual dengan harga bervariasi. *Showroom* dimaksud sebagaimana yang dikenal selama ini sebagai tempat display barang dagangan (seperti: mobil dan sepeda motor). Adapun pembagian hasil yang diberlakukan pada SrS adalah sistem bagi hasil antara yang memelihara induk sapi dengan pemilik induk sapi atas dasar saling menguntungkan.

Melalui SrS populasi dan produktivitas sapi potong yang standar dapat pula dicapai. Selanjutnya, pemanfaatan kotoran sapi atau limbah padat (faeces), digunakan sebagai pupuk kompos untuk pertanian. Limbah cair (kencing) sapi dapat pula dimanfaatkan sebagai biogas untuk kebutuhan memasak rumah tangga, dan bio urine yang bermanfaat untuk menyiram tanaman seperti cabe, tomat, dan lainnya.

SrS ini juga merupakan solusi dari model pemeliharaan, penertiban, dan keamanan ternak sapi berdasarkan Perda Kabupaten Barru Nomor 3 tahun 2012. Perda ini bertujuan melakukan penataan dan penertiban ternak, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan peternak.

Program ini sekaligus menciptakan rasa nyaman dan aman kepada pengguna

jalan poros dan masyarakat. Tak kalah pentingnya adalah ikut terjaganya kelestarian lingkungan sekitar. Pemeliharaan dengan model SrS yang memanfaatkan hasil sampingan pertanian, perkebunan, dan kehutanan untuk pakan, serta pemanfaatan ruang atau lahan yang tidak dimanfaatkan, berdampak baik bagi lingkungan.

SrS ini juga merupakan solusi bagi masyarakat yang memiliki modal namun tidak mempunyai waktu mengembangkan usaha. Sebagai sebuah program pemberdayaan, dalam pelaksanaannya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan potensi swadaya masyarakat maupun potensi sumber daya alam.

Program ini juga memberdayakan petugas-petugas pemerintah di lapangan melalui intensifikasi teknologi inseminasi, pengobatan, pengolahan limbah, dan teknologi pakan ternak. Optimalisasi program ini dapat menyerap tenaga kerja serta membangun silaturahmi antara pemodal-peternak melalui pola kemitraan usaha. Antara pemodal, pemerintah, dan pasar diintegrasikan dalam sebuah pola konsorsium, sehingga pemasaran ternak dan hasil lainnya menjadi lebih efektif.

Secara teknis operasional, SrS memiliki kriteria umum yakni, keberadaannya harus sesuai dengan Rancangan Umum Tata Ruang Daerah. Lokasi mudah dijangkau, yaitu mempunyai akses jalan yang dapat dilalui kendaraan. Tersedia pakan dan air sebagai sumber air minum bagi ternak. Tersedia sarana dan prasarana perkandangan, peralatan kandang, dan petugas teknis yang bertanggung jawab atas kegiatan dalam showroom.

Kriteria teknisnya, tersedia kandang koloni kapasitas minimal 10 ekor sapi. Lahan hijauan makanan ternak (HMT) minimal satu hektar. Tersedia tempat pengolahan limbah, sarana produksi ternak. Pemanfaatan limbah pertanian, penerapan teknologi dan manajemen peternakan. Terakhir, tersedianya jaringan informasi produksi dan pemasaran.

Program Srs ini merupakan salah satu inovasi daerah yang telah dilaksanakan sejak 2010 sampai sekarang. Pemda berperan sebagai fasilitator pembentukan SrS. Dari data yang dihimpun hingga 2012 lalu telah dibentuk 34 unit SrS dengan kapasitas rata-rata minimal 10 ekor sapi per kandangnya. Adapun sumber ternak terdiri atas pemerintah sebanyak 476 ekor sapi, dan 223 ekor sapi yang dikelola secara mandiri.

Informasi yang diperoleh dari Dinas Peternakan Barru, tiap rumah tangga di Kabupaten Barru memiliki minimal satu sampai dua ekor sapi. Atau dapat pula menggunakan perbandingan bahwa setiap 1 kilometer bujur sangkar luas kabupaten Barru memiliki 42 ekor sapi. (*)

KABUPATEN SIDRAP

Peraih Otonomi Awards 2013 Kategori Layanan Pendidikan

Tuntas Tuna Calistung Dongkrak IPM Sidrap

Andi Mattingaragau T

Peneliti FIPO

Era ilmu pengetahuan dan teknologi tidak menjamin masyarakat bebas dari buta baca, tulis, dan hitung (calistung). Kabupaten Sidrap salah satu di antaranya. Data BPS mencatat angka buta huruf umur 15 tahun ke atas terbilang tinggi, sehingga berdampak terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) dan angka melek huruf.

Monitoring dan evaluasi (money) FIPO terkait penilaian Otonomi Awards (OA) 2013 menetapkan Kabupaten Sidrap sebagai daerah dengan terobosan paling inovatif bidang layanan pendidikan. Raihan total nilai yang dicapai sebesar 550, masing-masing inovasi 175, survei publik 243, dan *existing condition* 130.

Nilai tersebut mampu mengungguli empat kabupaten lainnya yang harus puas di posisi nominasi. Keempat daerah tersebut adalah Kabupaten Bone 544, Pangkep 520, Kepulauan Selayar 513, dan Pinrang 512.

Nyaris lepas dari perhatian jika anggapan selama ini bahwa angka buta calistung di Kabupten Sidrap jumlahnya rendah. Ternyata faktanya tidak demikian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka buta huruf usia 15 tahun ke atas lebih dari 13 ribu orang sehingga berdampak terhadap IPM Sidrap yang cenderung stagnan.

Guna mendongkrak IPM, diluncurkanlah program tuntas buta calistung. Program ini diupayakan tuntas dalam waktu 2012 dan 2013. Setahun setelah pelaksanaan program, pada 2012 angka IPM Sidrap mengalami peningkatan. Pada 2007 IPM Sidrap 72,06 persen meningkat menjadi 72,36 persen pada 2012. Peningkatan tersebut juga diikuti dengan angka melek huruf yang pada 2011 sebesar 89,7 persen meningkat menjadi 89,9 persen. Prestasi tersebut menunjukkan jika program tuntas tuna calistung berhasil mencapai tujuan.

Komitmen kuat untuk mencapai tujuan bebas tuna calistung diwujudkan dengan penyediaan infrastruktur program. Mulai dari payung hukum, dukungan anggaran dan pelibatan seluruh stakeholder. Untuk mendukung program ini, Pemkab Sidrap menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 25/2012 Tentang Pembentukan Tuna Aksara Tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Menyusul SK No. 92/2012 Tentang Penetapan Tutor Penuntasan Tuna Aksara tingkat Kabupaten Sidrap. Lalu Keputusan Kadiknas Nomor 34/2012 Tentang Penetapan Pengawas Kegiatan Penuntasan Tuna Aksara Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Sidrap.

Selain itu, komitmen anggaran pun direalisasikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran yang dikucurkan untuk menyukseskan program ini sebesar Rp3,1 miliar yang terbagi dalam dua tahun. Pada 2012 jumlah yang dikucurkan sebanyak Rp1,5 miliar dan pada 2013 Rp1,6 miliar. Penggunaan anggaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan sesuai *time schedule* pelaksanaan program.

Begitu juga dengan pelibatan seluruh *stakeholder* dalam program. Mulai dari bupati, wakil bupati, kadis pendidikan dan jajarannya, kasi kesetaraan, kasi diknas dan kelembagaan. Agar program berjalan efektif dan efisien, maka pelaksanaan program dibagi empat wilayah kerja yang koordinatornya berdasarkan jumlah asisten yang ada, yaitu asisten satu hingga empat.

Sedangkan anggotanya melibatkan instansi terkait, yaitu kepala Bappeda, Kepala Dinas Pendidikan, kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP), kepala Dinas Sosial-Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), sekretaris Dinas Pendidikan dan staf pendidikan luar sekolah (PLS) Dinas Pendidikan.

Menariknya, pelaksanaan pembelajaran tidak mengenal tempat dan waktu. Tempat pembelajaran dapat dilakukan di mana saja sepanjang representatif. Seperti di kolong rumah, sekolah, kantor desa, tempat ibadah, posyandu, TPA, lembaga pemasyarakatan, dan sarana umum lainnya.

Sedangkan waktu pembelajaran pada pagi, sore, dan malam hari. Bertindak sebagai pengajar para guru taman kanak-kanak, SMP, dan SMA dengan durasi pembelajaran dua sampai tiga kali sepekan. Tiap pertemuan berlangsung hingga tiga jam dengan rincian membaca, menulis, dan berhitung masing-masing satu jam.

Facilities yang diberikan kepada peserta belajar meliputi peralatan menulis. Seperti buku, alat tulis, penghapus, modul, alat penajam pensil dan tas yang dikemas dalam satu paket. Paket peralatan tersebut diberikan kepada tiap peserta belajar. Variasi pertemuan kadang diselingi dengan pemberian keterampilan seperti memasak, kerajinan tangan, pengajian, dan berbagai kegiatan berdasarkan kondisi setempat. Mereka ini dibimbing oleh tim dari Dinsosnakertrans, pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), serta lembaga kursus dan pelatihan (LKP). Bahasa yang dipakai adalah bahasa ibu (daerah) dengan pendekatan sistem kekeluargaan.

Hingga 2012, *output* tuntas buta calistung mencapai 8000 orang dengan capaian 69 persen dan sisanya dituntaskan akhir 2013. Dari *monitoring* yang dilakukan di lapangan menunjukkan, umumnya warga yang telah mengikuti program pembelajaran telah dapat membaca dan berhitung sesuai dengan perkembangan yang diharapkan.

Jangkauan program meliputi seluruh wilayah Kabupaten Sidrap yang tersebar di seluruh kecamatan dan 106 desa dan kelurahan serta 1.143 kelompok kantong-kantong masyarakat. Dari sisi jangkauan program diharapkan tidak ada lagi warga yang buta calistung untuk tidak ikut dalam program.

Oleh karena itu, di tingkat kecamatan juga dibentuk panitia. Penanggungjawabnya adalah masing-masing camat, ketua pelaksana dipercayakan kepada kepala UPTD Dinas pendidikan, sekretaris adalah penilik PLS, koordinator tenaga lapangan diknas, kepala UPT BKBPP dan pengendali lapangan lurah/kades, Danramil dan Kapolsek. (*)

KABUPATEN LUWU TIMUR

Peraih Otonomi Awards 2013 Kategori Layanan Kesehatan

Komisi Penanggulangan AIDS Mandiri

IHSANUL AMRI

Peneliti FIPO

Epidemi HIV/AIDS saat ini menyebar dengan cepat. Persebarannya telah menjangkau hampir di seluruh pelosok kabupaten/kota. Prevalensi penularan HIV/AIDS diantara orang dewasa secara umum masih rendah, namun saat ini sudah mencapai tingkat yang cukup tinggi di kalangan tertentu. Pemkab Luwu Timur punya cara menangannya.

Penanggulangan HIV/AIDS di kabupaten/kota memiliki tantangan tersendiri. Penyakit menular dari perilaku menyimpang itu, masih dianggap tabu. Fenomenanya sangat tertutup. Kondisi yang tabu dan tertutup ini sebagai akibat dari stigmatisasi dan diskriminasi yang menyulitkan upaya penanggulangan. Oleh karena itu, HIV/AIDS seperti fenomena puncak gunung es. Fakta yang terlihat di permukaan seringkali relatif kecil dibanding jumlah sesungguhnya.

Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah segi tiga emas persebaran HIV/AIDS dengan pola “barang baru stock lama”. Hasil *zero survey* yang dilakukan Dinas Kesehatan hingga 2012, ditemukan sebanyak 58 kasus. Temuan ini seperti fenomena gunung es, bisa jadi yang tidak tampak jauh lebih besar dari jumlah itu.

Keluarnya Perda Kabupaten Luwu Timur No. 7 Tahun 2009 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, menandai awal upaya terkoordinasi dan multi-sektor penanggulangan HIV/AIDS. Perda tersebut sekaligus dasar bagi terbentuknya Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di Luwu Timur. Keberadaan KPA yang sejak 2011 diketuai Bupati Luwu Timur, pelaksana hariannya ditangani Wakil Bupati. Fungsi utamanya melakukan pencegahan, penanganan para Orang Hidup dengan HIV-AIDS (ODHA), dan *capacity building* SDM.

Upaya Pencegahan

Upaya pencegahan dilakukan melalui kampanye dan sosialisasi secara terintegrasi dengan SKPD lainnya. Dinas Kesehatan bertugas melakukan *zero survey*, yakni pemeriksaan darah pada populasi-populasi di daerah risiko tinggi. Hasil *zero survey* ini merupakan upaya mengetahui perkembangan up to date tentang penderita HIV/AIDS di daerah *hotspot*. Hasil dari *zero survey* ini kemudian direkomendasikan kepada KPA untuk penanganan lebih lanjut.

KBPP (Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan) memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah SMP dan SMU se-Luwu Timur terutama di daerah yang berisiko tinggi. Kegiatan kemudian dipertajam melalui pembentukan kelompok teman sebaya yang sekarang telah dikerjasamakan dengan PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling-Remaja) di sekolah. Dinas Pendidikan juga memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah dasar (SD), untuk memberikan pemahaman sejak dini tentang HIV/AIDS. Sementara untuk madrasah-madrasah dan ulama juga melibatkan Kementerian Agama.

Disnakertransos bertugas memberikan sosialisasi dan kampanye kepada perusahaan. Dinas mengadvokasi ODHA untuk mendapatkan perlakuan dan hak yang sama dengan karyawan lain, para ODHA tidak mengalami pemecatan. POKJA HIV ini telah berjalan di Rumah Sakit Inco PT. Vale.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) memberikan penyuluhan kepada kader posyandu. Kampanye ini juga dilakukan kepada ibu-ibu melalui Tim Penggerak PKK. Selain itu, kampanye VCT (*Voluntary Counseling Test*) juga digalakkan. Inisiasi VCT bahkan dilakukan oleh Ketua Pelaksana KPA (Wakil Bupati Luwu Timur) yang diikuti para pejabat di lingkungan Pemkab Luwu Timur.

Selama ini temuan-temuan HIV seringkali didapatkan secara tidak sengaja (melalui pemeriksaan darah karena malaria, demam berdarah, dll), bukan atas kesadaran dari masyarakat untuk memeriksakan diri secara sukarela. Pada sisi inilah, VCT dilakukan sebagai upaya kampanye mendorong masyarakat untuk secara sadar melakukan pemeriksaan HIV.

Masyarakat yang tahu dan sadar akan mengikis stigma dan diskriminasi terhadap ODHA. Hal tersebut terjadi akibat ketidaktahuan masyarakat tentang model penularan penyakit ini. Upaya kampanye secara terus-menerus diharapkan membuat masyarakat semakin terbuka, sehingga mampu mengikis stigma dan diskriminasi tersebut.

Penanganan penderita secara cepat dan terkoordinasi, telah dilakukan rapat koordinasi yang menyepakati bahwa apabila terdapat temuan baru HIV/AIDS, baik melalui VCT dan *zero survey*, maka lembaga-lembaga teknis Puskesmas, RSUD dan Rumah Sakit PT. Vale akan diarahkan ke RS PT Vale. Rumah Sakit PT Vale dengan fasilitas yang lebih lengkap kemudian melakukan verifikasi yang jika itu positif diteruskan untuk menjalani konseling. Jika ODHA bersedia, maka selanjutnya akan diberikan ARV (anti retrovirat) secara gratis.

KPA-Mandiri

Keberadaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di Luwu Timur, telah menjadi langkah maju dan strategis dalam penanggulangan HIV/AIDS. Dalam perkembangannya, KPA AIDS telah berstatus mandiri, ditandai oleh sumber daya manusia profesional, komitmen alokasi dana hibah tiap tahun di APBD, adanya sekretariat khusus dan program kerja yang terencana secara sistematis.

Dari Anggaran APBD Rp50 juta menjadi Rp75 juta per tahun. Ini merupakan peran dan komitmen besar daerah terutama dalam peningkatan anggaran bagi KPA. Tidak semua daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mengalokasikan anggaran memadai untuk menopang kebutuhan pelaksanaan program penanggulangan AIDS di wilayahnya. Oleh karena itu, komitmen penganggaran daerah terhadap KPA, menentukan status mandiri-tidaknya sebuah KPA.

Pada tahun-tahun mendatang, tantangan penanggulangan HIV/AIDS

semakin besar, rumit, dan kompleks. Dibutuhkan strategi komprehensif dan terintegrasi dari semua pemangku kepentingan. Akselerasi upaya perawatan, pengobatan, dan dukungan terhadap ODHA dijalankan bersamaan dengan akselerasi upaya pencegahan, baik di lingkungan berperilaku risiko tinggi maupun di lingkungan berperilaku risiko rendah dan masyarakat umum. (*)

KABUPATEN PINRANG

Peraih Otonomi Awards 2013 Kategori Layanan Perizinan

Perizinan Terpadu yang Tidak Berliku

DASMAN

Peneliti FIPO

Pemerintahan di era otonomi daerah diharapkan mampu memberikan pelayanan publik secara maksimal pada masyarakat. Sebagaimana dilakukan pemerintah kabupaten Pinrang, yang berupaya memudahkan akses layanan publik bidang perizinan. Bagaimana strategi pemerintah Pinrang mewujudkan hal tersebut, berikut laporannya.

Tahun ini, Pinrang berhasil meraih piala Otonomi Awards, parameter layanan publik indikator administrasi perizinan. Prestasi tersebut diperoleh dari hasil penilaian The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) yang dilakukan pada Maret-September 2013. Secara akumulatif, Pinrang meraih total nilai tertinggi yaitu 513 poin. Jumlah poin tersebut didapatkan berdasarkan dua indikator penilaian yaitu nilai inovasi dan survei publik.

Perolehan nilai ini sedikit lebih tinggi dibanding Bantaeng dan Palopo yang hanya memperoleh 510 poin dan 505 poin. Dua kabupaten ini adalah nominator pesaing terkuat pada indikator layanan perizinan. Nilai poin yang tipis menunjukkan bahwa kompetisi daerah dalam layanan perizinan sudah cukup bagus.

Keberhasilan Pinrang pada bidang layanan perizinan tampak jelas dari berbagai inovasi yang dilakukannya. Hasil monitoring dan evaluasi peneliti FIPO menemukan beberapa terobosan. Pemerintah melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) melakukan program layanan perizinan terpadu yang tidak berliku.

Dimulai sejak 2011, layanan perizinan terpadu ini diresmikan menjadi lembaga pemerintah dalam layanan publik. Tujuannya, memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap perizinan usaha dan non usaha. Meskipun kantor pelayanan perizinan terpadu juga dimiliki kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, tetapi BP2TPM Pinrang dilengkapi sarana prasarana memadai. Termasuk komitmen pemerintah memberikan kemudahan dan kedisiplinan kerja petugas yang patut dicontoh.

Keberadaan BP2TPM di Pinrang, memang memiliki tekad yang cukup besar. Dengan motto "Kepuasan Anda adalah tujuan kami dan siap melayani dengan hati", menjadi inspirasi bagi petugas untuk membangun budaya kerja secara profesional. Hal ini dapat dilihat dari kondisi pelayanan dengan petugas yang ramah, cepat, dan tepat melayani masyarakat.

Layanan BP2TPM difokuskan pada kantor pusat layanan publik. Berada dalam satu gedung dengan kantor unit pengadaan barang, dinas catatan sipil dan administrasi kependudukan, serta dinas tenaga kerja. Pemerintah sengaja menempatkan beberapa kantor dalam satu lokasi agar masyarakat yang berkepentingan mudah menjangkau layanan lain yang dibutuhkan. Sebagai tempat layanan publik yang dikunjungi berbagai kalangan masyarakat, BP2TPM juga menyiapkan ruangan khusus bagi ibu menyusui. Ruang khusus tersebut terbuka untuk umum.

Model layanan perizinan ini perlu diapresiasi. Sebab bagi sebagian daerah, akses perizinan harus melalui proses birokrasi berbelit, lama, dan tidak transparan. Padahal tuntutan pemerintah agar masyarakat yang melakukan aktivitas usaha harus melengkapi surat administrasi perizinan.

Pengurusan surat perizinan di kantor BP2TPM dilakukan secara profesional. BP2TPM diberikan kewenangan menangani semua jenis perizinan. Semua tahapan penerbitan surat perizinan dilakukan berdasarkan standar operasional pelayanan (SOP). Mulai tahapan verifikasi berkas hingga proses percetakan. Waktu dan besar biaya yang ditanggung pemohon pun telah jelas dalam SOP. Alur pelayanannya dapat dilihat dan dibaca di ruang tunggu.

Proses mendapatkan surat perizinan, caranya cukup mengisi formulir dan melengkapi syarat –syarat lainnya. Dalam satu format formulir, pemohon dapat mengajukan beberapa jenis perizinan. Berkas pemohon yang dianggap lengkap akan diterbitkan surat perizinannya dengan cepat.

Komitmen pemerintah agar proses pengurusan perizinan berjalan maksimal, tim BP2TPM aktif memberikan sosialisasi rutin di masyarakat. Baik langsung maupun melalui televisi lokal. Pemkab juga membangun sistem satu loket pembayaran melalui bank. Sistem ini menutup peluang kemungkinan terjadinya korupsi dan pungutan liar. Hal ini juga dapat meminimaliskan para calo.

Bagi masyarakat yang tidak puas, bisa menyampaikan pengaduan di unit pengaduan. Saluran pengaduan dapat dilakukan melalui SMS, telepon, atau datang langsung mengajukan pengaduan lisan maupun bentuk tertulis. Penyelesaian masalah di lapangan melibatkan satuan polisi pamong praja.

Keinginan kuat dan prestasi pelayanan menyebabkan BP2TPM Pinrang memperoleh hak akses Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Elektronik (SPIPISE). Perangkat SPIPISE terintegrasi antara BKPM dan kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen, utamanya yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di Indonesia.

Sejak BP2TPM terbentuk pada 2012, telah terbit izin usaha sebanyak 3.197 dan 1.212 izin non usaha. (*)

KABUPATEN LUWU UTARA

Peraih Otonomi Awards 2013 Kategori Partisipasi Masyarakat

Dorong Pembangunan Melalui Warung Demokrasi

ANDI MATTINGARAGAU T.

Peneliti FIPO

Anggapan diskusi di warung kopi hanya melahirkan wacana belaka, adalah tidak benar. Salah satu warung kopi di Luwu Utara membuktikannya. Melalui program Warung Demokrasi yang dikemas di warung kopi ternyata mampu mendorong lahirnya program pembangunan yang diakomodasi pemerintah daerah melalui APBD.

Monitoring dan evaluasi (money) FIPO terkait penilaian Otonomi Awards (OA) 2013 menetapkan Kabupaten Luwu Utara sebagai daerah dengan terobosan paling inovatif bidang partisipasi publik. Raihan total nilai yang dicapai sebesar 504,62 poin, masing-masing inovasi 278,22 poin dan survei publik 226,40 poin.

Torehan nilai tersebut mengungguli empat kabupaten lainnya yang harus puas sebagai nominasi. Keempat daerah tersebut adalah Kabupaten Bantaeng 497 poin, Parepare 477 poin, Luwu Timur 440 poin, dan Bulukumba 334 poin.

Salah satu faktor yang melatarbelakangi lahirnya program Warung Demokrasi adalah kurangnya wadah untuk menyalurkan aspirasi terkait kepentingan masyarakat. Sementara “parlemen jalanan” yang diharapkan dapat memberikan harapan besar, ternyata kontribusinya minim terhadap proses pembangunan.

Warung Demokrasi muncul dari akar rumput, digagas generasi muda Luwu Utara yang peduli terhadap dinamika pembangunan daerahnya. Mereka merupakan aktivis dan kumpulan jurnalis yang selama ini banyak mengkritisi masalah pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten (Pemkab) Luwu Utara.

Bentuk kegiatan Warung Demokrasi berupa diskusi yang dilaksanakan di warung kopi. Tema yang diusung berupa kondisi terhangat dan banyak mendapat perhatian masyarakat. Atau kondisi yang lagi ‘booming’ di tingkat nasional dan berkorelasi dengan kondisi Luwu Utara.

Secara teknis, untuk menggali tema yang diusung, terlebih dulu tim Warung Demokrasi turun ke lapangan melakukan monitoring ke tengah masyarakat untuk mengetahui isu yang berkembang. Mereka membawa kamera dan alat rekam. Hasil rekaman dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan.

Pada saat kegiatan diskusi dilakukan, hasil rekaman itu ditampilkan di layar agar dilihat peserta yang hadir. Metode ini mereka akui terinspirasi dari pola MetroTv dan TvOne. Hari pelaksanaan diskusi dikondisikan dengan konfirmasi kehadiran narasumber. Tetapi selama ini kebanyakan dilakukan malam hari.

Narasumber yang hadir memiliki hubungan dengan tema diskusi, baik dari kalangan pimpinan kabupaten, unsur SKPD dan jajarannya, birokrasi, legislatif, LSM, wartawan, masyarakat umum, dan berbagai pihak terkait. Pelaksanaan diskusi dilakukan sekali hingga dua kali sebulan yaitu pekan kedua dan keempat.

Dalam membuat perencanaan diskusi, lebih dulu diprediksi isu-isu utama yang memungkinkan terjadi untuk tiga bulan ke depan. Namun jika ada isu yang mengemuka di Luwu Utara akan menjadi pertimbangan penetapan pemilihan topik.

Acara diskusi dihadiri hingga 50 orang dan disiarkan *live* interaktif di Radio Adira Masamba. Pendengar dapat menelepon ke *call center* dan narasumber langsung menjawabnya. Animo masyarakat mengikuti diskusi cukup banyak karena unsur transparansi dijamin. Ada beberapa dinas yang awalnya tertutup, namun karena adanya program Warung Demokrasi akhirnya mereka membuka diri. Misalnya, APBD yang sebagian pihak memandangnya sebagai produk rahasia. Namun ketika kehadiran Bupati Luwu Utara memberikan penjelasan bahwa hal semacam itu bukan merupakan rahasia akhirnya peserta yang hadir menjadi mengerti.

Setelah eksis beberapa tahun lamanya, Warung Demokrasi telah berkontribusi melahirkan beberapa rekomendasi yang menjadi acuan pembuatan program pembangunan di Luwu Utara. Diantaranya program normalisasi Sungai Masamba. Program ini mereplikasi konsep wisata kuliner Sungai Pangkep. Mobil yang melewati Sungai Masamba dapat singgah mencicipi kuliner yang dijual para pedagang yang ada di sisi kanan dan kiri pelataran bantaran sungai.

Selain itu, program pemerataan distribusi guru ke desa terpencil juga telah diakomodasi di APBD. Kondisi geografis Luwu Utara menyebabkan beberapa daerah terpencil masih kekurangan guru. Alasan ini sangat rasional sehingga dimasukkan dalam penganggaran APBD.

Beberapa topik diskusi yang telah diangkat selama ini diantaranya masalah pembangunan, konflik antar-kampung, narkoba di kalangan pelajar dan bahaya HIV/AIDS, ujian nasional, dan beberapa topik menarik lainnya.

Penganggaran pelaksanaan diskusi Warung Demokrasi masih mengandalkan internal organisasi dan sumbangan sukarela dari peminat dan pemerhati masalah pembangunan. Namun, ada juga dinas terkait yang membiayai acara diskusi karena tema yang diangkat berhubungan dengan topik yang ditawarkannya.

Kesuksesan acara diskusi Warung Demokrasi melahirkan beberapa rekomendasi pembangunan telah mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Diantaranya mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, LSM Kopel yang membahas masalah APBD, KPID Provinsi, dan berbagai pihak lainnya. (*)

KOTA PAREPARE

Peraih Otonomi Awards 2013 Bidang Akuntabilitas Publik

Transparansi Dokumen Publik Secara Online

A. RISDAWATI AP

Peneliti FIPO

Di beberapa daerah, kesulitan untuk memperoleh dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih sering terjadi. Padahal APBD termasuk kategori dokumen yang dapat diakses oleh publik. Lain halnya yang terjadi di Kota Parepare, masyarakat dapat mengakses dokumen APBD secara online. Bagaimana kiat/upaya Kota Parepare mewujudkannya?

Malam Anugerah Otonomi Awards 2013 yang baru saja digelar The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) melahirkan sejumlah kabupaten/kota dengan prestasi dan kinerja terbaik. Kota Parepare salah satunya. Serangkaian kegiatan penilaian yang telah dilakukan FIPO menetapkan kota Bandar Madani ini sebagai daerah dengan terobosan paling inovatif bidang akuntabilitas publik.

Melalui program transparansi dokumen publik secara *online*, Parepare berhasil mengumpulkan nilai tertinggi. Hasil akumulasi nilai yang dicapai sebesar 421 poin, masing-masing inovasi 213 poin dan survei publik 208 poin. Nilai tersebut mengungguli tipis empat kabupaten lainnya yang harus puas di posisi nominasi. Keempat daerah tersebut adalah Kabupaten Sinjai 419 poin, Luwu Timur 398 poin, Maros 381 poin, dan Kota Makassar 373 poin.

Pada dasarnya regulasi mengenai transparansi terhadap dokumen publik sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Disebutkan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi publik wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Hal inilah yang menjadi pertimbangan pentingnya keterbukaan terhadap informasi publik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Untuk menindaklanjuti undang-undang tersebut pemerintah kota mengeluarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 45 Tahun 2011, tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini pun sesuai dengan Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 167 Tahun 2011 tentang pembentukan PPID.

Di Sulawesi Selatan sendiri, Parepare bukan yang pertama dalam menerbitkan regulasi mengenai PPID. Kabupaten Tana Toraja dan Pangkep sudah lebih dulu melakukannya. Namun respons cepat pemerintah Kota Parepare untuk mewujudkan amanat dalam regulasi tersebut patut diapresiasi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Parepare No. 45 tahun 2011, ditetapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Kepala PPID. Untuk memaksimalkan kinerja PPID dibentuk PPID pembantu di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di lingkungan pemerintah Kota Parepare.

Salah satu tugas PPID adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID Parepare menetapkan standar layanan informasi. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik PPID menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, instrumen transaksi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi. Selain itu, PPID menyediakan informasi publik tanpa dipungut biaya.

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID melalui *desk* layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan melalui media. Media online salah satunya. Melalui *website* pemerintah kota yakni *pareparekota.go.id*, masyarakat sebagai pemohon informasi tidak perlu lagi menunggu lama untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Daerah dengan luas wilayah hanya 99,33 kilometer persegi yang merupakan kota terkecil di Provinsi Sulawesi Selatan, melalui *website* tersebut aktif berbagi informasi aktual mengenai kegiatan pemerintahan, profil, potensi daerah, peraturan daerah, dan info layanan serta menerima pengaduan masyarakat.

Satu hal yang membedakan PPID Parepare dengan PPID kabupaten/kota lainnya adalah transparansi dokumen publiknya. Sebagian besar dokumen pemerintah kota yang masuk dalam kategori informasi publik sudah disediakan PPID Parepare melalui *website* pemerintah kota. Untuk mendapatkan dokumen yang dibutuhkan, masyarakat/pemohon informasi cukup meng-klik ikon PPID pada *website* tersebut kemudian memilih dokumen publik.

Dokumen publik yang dapat diakses diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Keuangan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), RAPBD/APBD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Dokumen Statistik, serta Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah yang berisikan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan dokumen opini atas audit. Sampai saat ini tercatat layanan tersebut telah dikunjungi sebanyak 2042 kali sejak mulai diterbitkan awal 2012 lalu.

Melalui mekanisme seperti ini, tidak hanya mewujudkan transparansi pemerintah, akses masyarakat terhadap informasi pun terpenuhi, bahkan mampu menjadi sarana untuk mengoptimalkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah. (*)

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Peraih Otonomi Awards 2013 Kategori Inspiratif

Mengubah Air Mata Menjadi Mata Air

IHSANUL AMRI

Peneliti FIPO

Ketersediaan air bersih merupakan masalah penting karena ketergantungan yang amat besar terhadap air bersih bagi kehidupan manusia. Di beberapa wilayah di negeri ini, masih ada warga yang kesulitan mengakses air bersih. Penyebabnya, antara lain sulitnya medan untuk mendapatkan sumber air yang layak konsumsi. Seperti yang dialami warga Dusun Tajuiyya di kepulauan Selayar.

Selayar membutuhkan strategi khusus untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga Tajuiyya dan daerah lainnya di Selayar. Apalagi kabupaten kepulauan ini memiliki luas 10.503,69 km² (wilayah daratan dan lautan) dengan penduduk sebanyak 123.283 jiwa. Wilayah Selayar terdiri atas dua sub area wilayah pemerintahan yaitu wilayah daratan yang meliputi kecamatan Benteng, Bontoharu, Bontomanai, Buki, Bontomatene, dan Bontosikuyu serta wilayah kepulauan yang meliputi kecamatan Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Takabonerate, Pasimarannu, dan Pasilambena.

Penyediaan dan pelayanan air minum di daerah ini berada di bawah PDAM sebagai *leading sector* penyalur, penyedia dan pengelola layanan air minum. Dinas PU menyediakan sarana dan fasilitas yang dapat melayani 123.283 jiwa penduduk. Kabupaten dengan wilayah yang berpulau-pulau menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penyediaan layanan air bersih dan air minum yang layak, sehat dan berkelanjutan.

Daerah yang berpulau mencerminkan langkanya sumber-sumber air baku yang dapat dikelola. Karenanya membutuhkan langkah dan strategi yang pragmatis dan temporer dalam memberikan akses bagi layanan air bersih di daerah ini. Salah satunya bantuan pengadaan sumur bor.

Dalam APBD 2012, pemerintah daerah mengalokasikan dana sebesar Rp250 juta untuk pembangunan dan pengadaan sumur bor. Program pembangunan jaringan air bersih dialokasikan Rp2,1 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pelaksana proyek dinas pekerjaan umum.

Salah satu wilayah yang terdata kesulitan mengakses air bersih untuk air minum dan keperluan lainnya adalah Dusun Tajuiyya. Dusun ini terletak di Desa Bungaiyya Kecamatan Bontomatene. Wilayah ini mendapat pasokan air bersih dengan mobilisasi mobil tangki air. Warga harus mengeluarkan uang yang cukup besar untuk memperoleh air bersih.

Selain distribusi air melalui mobil tangki, masyarakat mengakses air dari tebing-tebing sumber Tajuiyya yang medannya terjal, berbahaya dan jaraknya sangat jauh dari permukiman. Untuk mencapai sumber mata air bersih itu, masyarakat menuruni tebing dengan menggunakan tangga kayu. Risiko yang mereka hadapi lebih besar dibanding jumlah air yang mereka bisa dapatkan. Namun karena kebutuhan yang mendesak akan air bersih, penduduk rela menghadapi risiko itu dengan peralatan yang sederhana. Air yang bisa mereka peroleh hanya 20 liter satu kali angkut karena beratnya medan.

Pada 2005 dimulailah pembangunan fasilitas pompa air dan fasilitas pengolahan air minum (IPA) PDAM di sumber air Tajuiyya. Untuk pembangunan pompa dan fasilitas Pengolahan air minum ini pemerintah mengalokasikan sekitar Rp1 miliar dari dana satuan kerja air minum provinsi, ditambah alokasi dana Rp70 juta dari APBD 2006 untuk pembangunan

jaringan transmisi dan sambungan rumah.

Pada 2006, pemerintah resmi mengoperasikan fasilitas pompa pengolahan air di Tajuiyya. Proyek ini tidak saja memudahkan masyarakat Tajuiyya mengakses air bersih, tetapi juga dirasakan warga di dua dusun lainnya di Desa Bungayya serta wilayah desa lainnya di luar Tajuiyya. Dari data yang ada, tercatat lebih dari 200 sambungan rumah yang telah mengakses sumber air ini.

Inisiatif dan komitmen pemerintah daerah untuk mengelola sumber air Tajuiyya patut menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam memenuhi kebutuhan air minum dan air bersih bagi masyarakatnya. Sumber air Tajuiyya layak konsumsi dan Pemkab Selayar membangun fasilitas pompa dan instalasi pengolahan air di tempat itu.

Hal yang menarik tidak saja karena pemerintah daerah melalui PDAM telah mampu memanfaatkan sumber air terjal Tajuiyya, namun skema subsidi silang yang meringankan beban warga di sekitar yang sebagian besar merupakan warga kurang mampu.

Dengan skema ini, mereka dapat mengakses air minum secara merata. Hampir semua rumah di tiga dusun di Desa Bungayya saat ini telah menjadi pelanggan PDAM dengan skema subsidi ini. Dahulu, sebelum sumber ini dimanfaatkan dan dikembangkan oleh PDAM, masyarakat setempat harus mengeluarkan biaya sekitar Rp10 ribu per hari untuk mendapat 80 liter air. Jika dikalkulasi, sebulan biaya yang mereka keluarkan Rp300.000. Belum lagi risiko yang harus dihadapi.

Melalui skema subsidi ini warga mendapatkan air lebih murah. Hanya Rp20 ribu per bulan. Pemkab Selayar berhasil mengalirkan air bersih ke rumah-rumah warga Tajuiyya dan sekitarnya. Air layak konsumsi yang murah dan tanpa risiko. Inilah program yang oleh pemerintah setempat disebut sebagai program “Mengubah Air Mata Menjadi Mata Air”. (*)

KABUPATEN LUWU UTARA

Peraih Otonomi Awards 2013 Indikator Program Inspiratif

Madu Baebunta, Dorong Peningkatan Ekonomi Petani

ANDI MATTINGARAGAU T.

Peneliti FIPO

Anggapan jika madu rasanya manis tidaklah semuanya benar. Madu propolis yang dihasilkan dari lebah trigona Sp merupakan satu dari sekian jenis madu yang rasanya asam. Budi daya jenis madu trigona propolis ini terbukti dapat meningkatkan pendapatan petani dan dapat menyembuhkan berbagai penyakit.

Monitoring dan evaluasi (monev) The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) terkait penilaian Otonomi Awards (OA) 2013 menetapkan Kabupaten Luwu Utara sebagai daerah paling inspiratif dengan program budidaya madu trigona propolis. Madu yang dihasilkan dari lebah jenis trigona ini diberi nama madu Baebunta. Madu ini memang belum banyak dikenal masyarakat luas. Namun, kerja keras petani dan tim dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Luwu Utara ini, sudah merambah beberapa daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan beberapa negara.

Produksi madu propolis ini didukung kondisi geografis Luwu Utara yang memiliki hutan lebat. Hutan yang terjaga mendukung berkembangnya koloni lebah varietas trigona Sp yang bernilai ekonomis. Potensi tersebut ditangkap petani dengan melakukan budidaya di lingkungan mereka dan dihabitat lebah di hutan-hutan.

Sejak dikembangkan pada 2005, kini berkecimpung 43 kelompok tani dengan 512 anggota yang bernaung dalam Forum Kelompok Usaha Perlebahan Luwu Utara (FKUP-LU) yang mengelola 2039 koloni lebah. Nilai produksinya Rp1,28 miliar per tahun, yang terdiri dari madu, *bee bread*, dan propolis yang dihasilkan dari 10 kecamatan di Luwu Utara.

Mengusung merek Baebunta, kini pemasarannya menjangkau Sulawesi Selatan, Malaysia via Batam, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sebagai wujud dukungan pemda melalui Dishutbun memberikan bantuan berupa peralatan produksi, kotak koloni, dan tanaman Talianra sebagai pakan lebah trigona.

Rasa asam mengindikasikan asam amino yang berfungsi sebagai anti toksin, anti bodi, dan anti oksidan yang kaya akan kandungan flofonoid dengan kadar 5 Ppm (per sejuta) yang merupakan salah satu madu kadar anti toksin tertinggi di dunia. Khasiatnya pun tidak diragukan lagi. Hasil riset dari salah seorang dosen Universitas Padjajaran Bandung mengakui jika madu tersebut berkhasiat mengatasi dan mengobati berbagai penyakit. Pernyataan tersebut juga dibenarkan beberapa konsumen yang mengonsumsi dan telah merasakan khasiatnya.

Khasiatnya dapat mencegah dan mengobati penyakit kanker, batuk, tekanan darah tinggi, stroke, sakit gigi, liver, diabetes, anti bodi, anti toksin, anti oksidan, anti penyakit infeksi, menormalkan selera makan, mengatasi susah tidur, mengatur seksualitas, mengatasi kurang darah, penambah tenaga dan membuat energik, membangun semangat dan gairah hidup, menambah kecerdasan, dan masih banyak lagi.

Dalam upaya memberdayakan para petani, Dishutbun memberikan bantuan dan pembinaan. Pertama-tama petani terlebih dahulu membentuk kelompok tani sebagai syarat mendapatkan bantuan dan pembinaan.

Pada 2007, dilakukan pendampingan petani madu trigona/merang oleh LSM untuk tiap kecamatan. Memasuki 2008, pendampingan dilakukan oleh penyuluh teknis dari dishutbun yang menyebar satu orang di tiap kecamatan. Konten pembinaan kelompok meliputi metode budidaya, sistem pengolahan, penggandaan telur, dan penanganan sebelum dan pasca panen yang dilakukan dalam bentuk pelatihan-pelatihan (sekolah lapang) di masing-masing kelompok.

Selain bantuan dalam bentuk pembinaan, juga dilakukan pemberian bantuan koloni lebah merang, kotak produksi, dan bantuan alat prosesing madu. Pada 2009 diberikan lagi bantuan berupa peralatan prosesing madu merang seharga Rp 49,9 juta. Memasuki 2013, bantuan difokuskan pada pelatihan sekolah lapang masing-masing kelompok tani.

Dalam upaya untuk membumikan madu merang, para petani yang bergabung di FKUP-LU melakukan berbagai upaya untuk memberdayakan anggotanya. Di antaranya membuka dan membangun akses informasi untuk memperkenalkan produknya ke konsumen. Mereka membuat *website*, Facebook, Twitter, You Tube dan mempromosikan ke berbagai media lainnya.

Selain itu, mereka juga melakukan kerja sama dengan berbagai pihak di antaranya Universitas Mulawarman (Ummul) Samarinda, World Wildlife Fund (WWF) Riau, serta Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk membimbing petani dengan kontrak satu tahun. Kerja sama tersebut meliputi budidaya lebah dan produksi madu.

Keberhasilan FKUP-LU dan dishutbun mengembangkan hasil produksi lebah trigona/merang telah mendorong pengusaha di Jawa Barat membuat produk propolis bentuk cair. Dalam sebulan, produksinya mencapai 5 ribu botol dengan harga Rp100 ribu per botol ukuran 6 ml dengan nilai ekonomis Rp 600 juta pertahun. Produknya telah dipatenkan dalam lima merek dan telah dipasarkan ke seluruh Indonesia.

Kini, petani di Luwu Utara telah mendapatkan berbagai manfaat dari budidaya lebah trigona. Dari aspek ekonomis, rata-rata pendapatan mereka Rp1 juta hingga Rp 3 juta per bulan. Sedangkan dari aspek kesehatan, mereka merasakan lebih sehat. Budidaya lebah trigona telah mendatangkan manfaat bagi petani. Selain sejahtera karena meningkatkan pendapatan, mereka juga semakin sehat. (*)

Bab 5

Parameter Khusus



Parameter Khusus

Memasuki tahun kelima The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja para pemerintah daerah (pemda) kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, terdapat tambahan komponen dalam penggalian data pada penilaian parameter khusus untuk sanitasi dan air minum.

Selain dari tiga komponen penggalian data yang telah disebutkan sebelumnya pada Bab Pendahuluan, sub bab metodologi seperti *in-depth interview* (wawancara mendalam), survei publik, dan eksisting data terhadap program-program inovasi yang ditawarkan masing-masing daerah kabupaten dan kota, terdapat juga penggalian data dengan model wawancara performa. Wawancara performa yang dimaksud FIPO dalam melakukan penggalian data, adalah wawancara dengan berpedoman pada isu-isu strategis yang telah dirumuskan sebelum ke lapangan.

Isu-isu strategis tersebut disusun berdasarkan data-data yang diperoleh

dan dikumpulkan dari IUWASH Indonesia sebagai bentuk kerjasama dengan FIPO. Selanjutnya, data-data tersebut kemudian diolah lebih terstruktur oleh para peneliti FIPO dalam bentuk pedoman pertanyaan sebagai panduan wawancara performa.

Tabel 15
Isu Strategis dan Penekanan Parameter Sanitasi

PARAMETER KHUSUS	ISU STRATEGIS	PENEKANAN
<div>SANITASI</div> 	Rumah tangga bersedia membayar untuk perbaikan sanitasi	a. Data dasar sanitasi b. Mengembangkan strategi komunikasi untuk menjarang kebutuhan masyarakat pada pelayanan sanitasi. c. Melakukan sosialisasi dan promosi terkait keuntungan peningkatan pelayanan sanitasi. d. Menyepakati sambungan sistem sanitasi (individu, kelompok atau tingkat kota) e. Melaksanakan survei untuk peningkatan pelayanan sanitasi (keinginan membayar).
	Peran aktif kelompok masyarakat sipil dan/atau kader pemerintah melaksanakan program untuk memobilisasi perbaikan akses pada sanitasi yang layak.	a. Data CSO/Kader yang melaksanakan program untuk perbaikan akses sanitasi b. Mengembangkan modul peningkatan kapasitas CSO/Kader. c. Peningkatan Kapasitas CSO/Kader d. CSO/Kader yang telah menyiapkan skala prioritas program. e. Kemampuan CSO/Kader dalam mengakses anggaran melalui APBD/swasta/ masyarakat sendiri.
	Persentase peningkatan rumah tangga yang mengadopsi perbaikan kesehatan dan praktek kebersihan.	a. Melakukan baseline survei pada praktik-praktik STBM b. Mengembangkan strategi kampanye kebersihan terkait c. Desain materi kampanye, termasuk modul, dan materi pelatihan d. Kampanye imlementasi, termasuk acara komunitas, advokasi media, dan kegiatan sekolah. e. Melakukan survei tahunan untuk melihat meningkatnya adopsi praktik-praktik kebersihan f. Promosikan mekanisme penghargaan bagi masyarakat yang PHBS
	Lembaga pemerintah daerah menerapkan sanitasi terpadu dan intervensi pada kebersihan sanitasi seluruh kota serta masuk dalam rencana strategis	a. Kolaborasi dengan para pemangku kepentingan nasional tentang program sanitasi perkotaan dalam kebijakan dan pendekatan. b. Pokja AMPL menyusun strategi sanitasi kota baru c. Pemda menyiapkan dokumen perencanaan daerah (RAD, Renstra-AMPL, RPIJM, dll) d. Pemda menyiapkan manajemen IPLT (seluruh kota dan/atau berbasis masyarakat) dan/atau sistem pembuangan limbah e. Pemda telah memasukkan program STBM sebagai bagian dari rencana sanitasi f. Pemda menerapkan solusi sanitasi yang inovatif dan murah dihubungkan dengan perencanaan Sanitasi lokal atau perencanaan STBM.
	Usaha Kecil dan Menengah yang menyediakan konstruksi fasilitas sanitasi dan jasa manajemen yang terjangkau	a. Pemda telah menyiapkan penilaian pengalaman dan pembelajaran pada pemasaran sanitasi bagi UKM. b. Pemda telah menyusun penilai UKM potensial yang memiliki keahlian bekerja di sektor sanitasi c. Pemda telah mendesain modul-modul peningkatan kapasitas UKM pada pemasaran sosial dan pelaksanaan program d. Pemda telah meningkatkan kapasitas UKM untuk pengembangan fasilitas sanitasi yang sesuai dengan kemampuan masyarakat. e. Pemda telah memberikan bantuan teknis kepada UKM pada pembangunan sarana sanitasi yang baik f. UKM telah mampu melakukan promosi pada program sanitasi yang baik.

PARAMETER KHUSUS	ISU STRATEGIS	PENEKANAN
	Jumlah berpartisipasi Pemda yang menempatkan prioritas yang lebih besar pada sanitasi melalui kebijakan lokal dan peningkatan alokasi anggaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Menilai kebijakan existing dan alokasi anggaran untuk meningkatkan pelayanan sanitasi oleh Pemda b. Mendukung upaya advokasi untuk memperluas dukungan politik untuk meningkatkan akses sanitasi di daerah perkotaan antara pemerintah di tingkat lokal, regional dan nasional dan badan-badan legislatif lokal c. Dukungan pemerintah daerah untuk menyetujui reformasi kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan prioritas untuk mendukung peningkatan layanan sanitasi d. Dukungan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran peningkatan layanan sanitasi
	Persentase peningkatan sumber daya keuangan diakses oleh penyedia jasa dari sumber publik dan swasta untuk perluasan perbaikan keadaan sanitasi (CSR/Koperasi)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemda telah mengidentifikasi sumber daya keuangan yang ada serta dapat memprediksi peningkatan pelayanan sanitasi b. Pemda telah memberikan advocacy untuk sektor publik dan swasta untuk mendukung perluasan layanan sanitasi c. Pemda telah melakukan survei tahunan untuk mengidentifikasi sumber daya keuangan untuk peningkatan perluasan layanan sanitasi.
	Jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah mengakses keuangan mikro untuk perbaikan rumah tangga dalam sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemda telah memfasilitasi pengenalan keuangan mikro kepada rumah tangga, stakeholder kunci, termasuk penyedia layanan, lembaga pembiayaan, dan mitra pemerintah. b. Pemda telah memfasilitasi pembentukan kemitraan keuangan mikro untuk meningkatkan layanan sanitasi c. Pemda telah memfasilitasi pelaksanaan dan pematangan kemitraan kredit mikro yang berkelanjutan, termasuk pengembangan prosedur operasi standar, bentuk, dan alat-alat lain yang relevan d. Pemda telah mengembangkan strategi pemasaran dan promosi untuk keuangan mikro. e. Pemda mempromosikan hasil, pelajaran dan praktik terbaik dari program keuangan mikro kepada khalayak yang lebih luas.
	Pemda mengadopsi mekanisme baru atau yang ditingkatkan bagi warga negara untuk keterlibatan masyarakat terhadap layanan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menilai mekanisme yang ada keterlibatan warga negara dalam sistem Pemerintahan dan merekomendasikan perbaikan b. Mengembangkan mekanisme berbasis masyarakat. c. Memperkuat Pemda dan kelompok masyarakat untuk mengadopsi mekanisme Umpan Balik informasi pelayanan sanitasi d. Pemda melakukan movev mekanisme umpan balik untuk mendapatkan perbaikan e. Pemda melakukan promosi hasil, pelajaran dan praktik terbaik ke masyarakat yang lebih luas.

Tabel 16
Isu Strategis dan Penekanan Parameter Air Minum

PARAMETER KHUSUS	ISU STRATEGIS	PENEKANAN
<p>AIR MINUM</p> 	Peran aktif kelompok masyarakat sipil dan/atau kader pemerintah melaksanakan program untuk memobilisasi perbaikan akses ke air minum.	<ul style="list-style-type: none"> a. Data CSO/Kader yang melaksanakan program untuk perbaikan akses air minum b. Mengembangkan modul peningkatan kapasitas CSO/Kader. c. Peningkatan Kapasitas CSO/Kader d. CSO/Kader yang telah menyiapkan skala prioritas program. e. Kemampuan CSO/Kader dalam mengakses anggaran melalui APBD/ Swasta/ masyarakat sendiri.
	Terbentuknya kelompok masyarakat sipil/NGO yang memberikan umpan balik pelayanan atas kinerja PDAM.	<ul style="list-style-type: none"> a. PDAM telah membangun komunikasi dengan masyarakat untuk mendukung transparansi, akuntabilitas dan participasi b. Desain kapasitas modul untuk advokasi, hubungan media dan hubungan pelanggan untuk PDAM, forum pelanggan, dan lain-lain c. Pengembangan kapasitas pada pentingnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi antara PDAM/Pemda d. Dukungan CSO dan PDAM untuk mengembangkan forum pelanggan baru atau memperkuat <i>existing</i> forum pelanggan e. Membantu PDAM dan forum pelanggan untuk mengakses pendanaan dalam pelaksanaan program yang direncanakan f. Mempromosikan pembelajaran dan praktik terbaik.
	Peningkatan kinerja PDAM secara teknis, keuangan dan manajemen.	<ul style="list-style-type: none"> a. PDAM dan PEMDA menyepakati dalam memperbaiki aspek-aspek tertentu dari indeks kinerja PDAM. b. Mengembangkan dan mendukung perbaikan dalam aspek PDAM keuangan, termasuk pemulihan biaya penuh, tarif review, penagihan dan sistem akuntansi, efisiensi keuangan dan standar akuntabilitas c. Mengembangkan dan mendukung perbaikan aspek teknis & operasional PDAM, termasuk pengurangan NRW, efisiensi energi, dan perbaikan kualitas air. d. Mengembangkan dan Mendukung perbaikan dalam hubungan pelanggan PDAM e. Mengembangkan dan mendukung perbaikan tata pemerintahan yang baik PDAM, termasuk akuntabilitas, transparansi, berpihak pada MBR, dan langkah-langkah perluasan layanan f. Mengembangkan dan mendukung perbaikan dalam bisnis PDAM dan manajemen SDM, termasuk penggunaan rencana perusahaan, prosedur operasi standar, skema insentif. g. Dukungan berbagi informasi dan pengalaman antara PDAM, Pemda dan pemangku kepentingan lainnya h. Melakukan survei tahunan terhadap perubahan indeks kinerja PDAM dan hasil berbagi dengan PDAM dan Pemerintah Daerah (Pemda, BAWASDA, dll)
	PDAM telah melakukan restrukturisasi hutangnya	<ul style="list-style-type: none"> a. PDAM melakukan penilaian atas restrukturisasi utang saat ini dari target PDAM. b. PDAM menyiapkan dan menyerahkan rencana restrukturisasi hutang sesuai dengan PMK 120/2008 c. PDAM membentuk sistem pemantauan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi target yang ditetapkan dalam rencana bisnis disetujui mereka.
	PDAM telah meningkatkan jenjang kelayakan kredit	<ul style="list-style-type: none"> a. PDAM mengembangkan dan menguji-jenjang kelayakan untuk mendapatkan kredit b. Menentukan baseline jenjang Kelayakan kredit c. Melakukan survei tahunan terkait jenjang kelayakan kredit d. Peningkatan kinerja PDAM untuk mendapatkan peringkat kredit bersertifikat

PARAMETER KHUSUS	ISU STRATEGIS	PENEKANAN
	Lembaga pemerintah daerah menerapkan tindakan yang diperlukan adaptasi perubahan iklim, berdasarkan penilaian pendahuluan kerentanan sumber air baku.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian situasional pada program yang relevan pada adaptasi perubahan iklim untuk perlindungan air baku b. Pemda/PDAM telah melakukan penilaian awal sumber air baku kerentanan, (sekarang dan masa depan) kualitas dan kuantitas risiko, tindakan perlindungan dan perbaikan/ rencanaekspansi c. Pemda/PDAM telah menyusun perencanaan untuk beradaptasi terhadap perubahan global dan iklim induksi dan dampak menjaga masa depan sumber air baku d. Pemda/PDAM telah menerapkan perubahan iklim pada program adaptasi berdasarkan hasil penilaian sumber kerentanan air baku dan rencana perbaikan.
	Meningkatnya persentase pelanggan MBR yang melaporkan kepuasan yang lebih besar pada layanan air minum	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemda dan PDAM telah menyiapkan baseline survei kepuasan pelanggan (MBR) pada layanan air minum b. Pemda dan PDAM telah menyiapkan mekanisme umpan balik pelayanan air minum c. Pemda dan PDAM telah melakukan survey tahunan terkait tingkat kepuasan pelanggan MBR layanan air minum.
	Jumlah berpartisipasi Pemda yang menempatkan prioritas yang lebih besar pada air minum yang aman melalui kebijakan lokal dan peningkatan alokasi anggaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Menilai kebijakan <i>existing</i> dan alokasi anggaran untuk meningkatkan pelayanan air dan sanitasi oleh Pemda b. Mendukung setuju upaya advokasi untuk memperluas dukungan politik untuk meningkatkan akses air minum di daerah perkotaan antara pemerintah di tingkat lokal, regional dan nasional dan DPRD c. Dukungan pemerintah daerah untuk menyetujui reformasi kebijakan yang berkaitan dengan prioritas meningkat untuk mendukung peningkatan layanan air minum d. Dukungan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran peningkatan layanan air minum e. Meningkatkan/memperkuat Pemda (Dewan Pengawas) tanggung jawab pengawasan terhadap PDAM, termasuk manajemen, perekrutan, peraturan dan, kinerja.
	Akses PDAM atau Pemda untuk memperoleh dana jangka panjang untuk rencana investasi air minum	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi kebutuhan program/investasi dan memperoleh konsensus awal disepakati oleh pihak terkait b. Mengembangkan rencana investasi disertai dengan studi <i>feasibility</i> c. Hadir dan mensosialisasikan rencana investasi dan hasil studi kelayakan antara para pemangku kepentingan yang relevan dan membangun konsensus d. Memfasilitasi komitmen pendanaan melalui (a) alokasi dana masyarakat, (b) financing komersial perjanjian (c) Kewajiban utang; (d) alokasi dana donor.
	Persentase peningkatan sumber daya keuangan diakses oleh penyedia jasa dari sumber publik dan swasta untuk perluasan perbaikan pelayanan air minum (CSR/Koperasi)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemda dan PDAM telah mengidentifikasi sumber daya keuangan yang ada serta dapat memprediksi peningkatan pelayanan air minum. b. Pemda dan PDAM telah memberikan advokasi untuk sektor publik dan swasta untuk mendukung perluasan layanan c. Pemda dan PDAM telah melakukan survei tahunan untuk mengidentifikasi sumber daya keuangan untuk perluasan layanan air minum ditingkatkan.
	Jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah mengakses keuangan mikro untuk perbaikan rumah tangga dalam air minum	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemda dan PDAM telah memfasilitasi pengenalan keuangan mikro kepada rumah tangga, <i>stakeholder</i> kunci, termasuk penyedia layanan, lembaga pembiayaan, dan mitra pemerintah. b. Pemda dan PDAM telah memfasilitasi pembentukan kemitraan keuangan mikro untuk meningkatkan layanan air dan sanitasi c. Pemda dan PDAM telah memfasilitasi pelaksanaan dan pemantauan kemitraan kredit mikro yang berkelanjutan, termasuk pengembangan prosedur operasi standar, bentuk, dan alat-alat lain yang relevan

PARAMETER KHUSUS	ISU STRATEGIS	PENEKANAN
		d. Pemda dan PDAM telah mengembangkan strategi pemasaran dan promosi untuk keuangan mikro. e. Promosikan hasil, pelajaran dan praktik terbaik dari program keuangan mikro untuk halayak yang lebih luas.
	Jumlah Pemda mengadopsi mekanisme baru atau yang ditingkatkan bagi warga negara untuk terlibat Pemda dalam air minum	a. Menilai mekanisme yang ada keterlibatan warga negara dalam sistem Pemerintahan dan merekomendasikan perbaikan b. Mengembangkan mekanisme berbasis masyarakat. c. Memperkuat Pemda dan kelompok masyarakat untuk mengadopsi mekanisme umpan balik informasi pelayanan air minum d. Pemda melakukan monev mekanisme umpan balik untuk mendapatkan perbaikan e. Pemda melakukan promosi hasil, pelajaran dan praktik terbaik ke masyarakat yang lebih luas.

Peneliti FIPO tetap menemui informan di lapangan pada tiap-tiap daerah kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Selatan, baik yang memiliki program inovasi maupun yang tidak. Untuk parameter sanitasi, informan yang ditemui peneliti antara lain, untuk instansi pemerintah daerah adalah Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan SKPD lainnya yang terkait dengan program tersebut, dalam hal ini kelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan (Pokja AMPL). Informan lainnya, tentu saja masyarakat sebagai penerima manfaat. Selanjutnya untuk parameter air minum, informan yang ditemui peneliti antara lain adalah Direksi PDAM, pegawai, staf dan jajarannya, demikian pula pelanggan rumah tangga sebagai penerima manfaat. (*)

Daerah Terbaik Bidang Layanan Sanitasi

Kabupaten Enrekang, dengan program Replikasi Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Dilihat dari kondisi geografis, wilayah Kabupaten Enrekang secara persentase 85 persen berbukit dan curam. Akibatnya, pemda mengalami kesulitan untuk menjangkau masyarakatnya di desa-desa ketimbang masyarakat perkotaan. Oleh karena itu pemerintah kabupaten membutuhkan waktu dan perjalanan panjang untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakatnya di pelosok desa.

Dari data pemilikan jamban keluarga di Kabupaten Enrekang, persentase jamban sehat dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Pada 2008 persentase jamban sehat sebesar 73,33 persen meningkat menjadi 81,5 persen pada 2009 dan 89,09 persen pada 2010 (data Profil Kesehatan Kab. Enrekang 2011). Meskipun mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun tetap perlu mendapat perhatian yang serius mengingat masalah jamban keluarga ini sangat erat dengan sanitasi lingkungan masyarakat. Itulah sebabnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang melalui Bidang P2PL tetap gencar dalam melakukan kegiatan replikasi pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Dalam replikasi pemicuan STBM ini tidak ada pembangunan dalam bentuk fisik, namun Dinas PU melakukan pengembangan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM) dengan anggaran 2012 mencapai Rp1 miliar melalui APBD kabupaten Enrekang. Dengan demikian, dilakukan kolaborasi melalui Pokja AMPL untuk mengatasi buang air besar sembarangan (BABS) yang masih sering dilakukan sebagian kecil masyarakat Kabupaten Enrekang.

Adapun kolaborasi yang dimaksud adalah dengan menggunakan metode Participatory Rural Appraisal (PRA), di mana masyarakat diundang dan berkumpul di suatu tempat yang telah disepakati bersama untuk mengatasi hal tersebut. Pertemuan juga dihadiri tokoh masyarakat itu dilakukan untuk memetakan masing-masing lokasi tempat mereka buang air besar (BAB).

Pilar utama paling penting yang harus diperhatikan dalam metode PRA adalah perubahan perilaku dan kebiasaan, karena jika perilaku dan kebiasaan tidak berubah maka tidak akan pernah mencapai tahapan sharing terhadap masyarakat.

Program ini terlaksana sejak tahun 2007 sampai sekarang. Pada rentang 2007–2009, program yang bermula dari Kementerian Kesehatan melalui program WESLIC, kemudian dilanjutkan oleh Dinas Kesehatan kabupaten Enrekang pada 2010.

Keunggulan dari program ini antara lain karena bentuk kunjungan dilakukan tiap desa minimal empat kali dalam setahun, sehingga pengawalannya sangat

terkoordinasi. Mesti dipahami, kondisi geografis Kabupaten Enrekang cukup terisolasi satu sama lain, sehingga untuk menempuh tiap desa butuh waktu yang cukup lama, antara satu sampai dengan dua hari. Hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa pencapaian replikasi paling tinggi dalam satu tahun, hanya terlaksana di 20 desa. Dari 129 desa/kelurahan di Kabupaten Enrekang, sudah 70 desa yang sudah masuk replikasi pemucuan STBM.

Kabupaten Kepulauan Selayar. Rendahnya perilaku hidup bersih masyarakat di beberapa wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar, merupakan implikasi dari rendahnya akses masyarakat terhadap sarana sanitasi yang layak. Rendahnya pendapatan, atau situasi ekonomi masyarakat menjadi faktor penentu atas rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki/mengakses sarana sanitasi yang baik tersebut. Dengan demikian perlu upaya dan pro aktivitas pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang masih kurang mampu dalam mengakses sarana sanitasi tersebut.

Inisiatif yang dilakukan Pemkab Kepulauan Selayar dalam menyikapi masalah sanitasi adalah melalui program pembangunan MCK umum plus-plus dan bantuan pembangunan jamban gratis, dengan sistem septik komunal di beberapa wilayah yang teridentifikasi sebagai wilayah yang sebagian besar penduduknya tidak bisa mengakses sarana jamban secara layak. Pemerintah mengalokasikan sejumlah anggaran dari APBD dan melibatkan pihak ketiga dalam proses pembangunan jamban MCK plus-plus tersebut, yang kemudian diserahkan terimakan kepada warga yang dikelola secara swadaya dengan membentuk KSM.

Program ini mulai berlangsung sejak tahun 2011, melalui *sharing* 90:10 persen DAK dan APBD atau Rp 200 juta dari DAK dan Rp 26 juta dari APBD untuk pembangunan/pengadaan MCK plus-plus sebanyak dua unit di Benteng Selatan, dan Kelurahan Benteng dengan kapasitas akses 50-70 KK, rasio empat orang per KK, dengan fasilitas MCK, tempat cuci, kantor pengelola, bak pengolahan lumpur tinja, dan fasilitas untuk pemanfaatan gas. Namun gas hingga saat ini masih dimanfaatkan secara terbatas oleh kantor pengelola KSM, belum dimanfaatkan oleh masyarakat secara lebih luas. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor, yakni masyarakat masih merasa jijik memanfaatkan GAS dari sumber tinja untuk memasak, kemudian faktor lainnya sarana untuk pengolahan lumpur tinja dan sarana pemanfaatan dalam skala rumah tangga juga masih sangat kurang. Pada 2012, program ini kembali dilaksanakan dengan mekanisme yang sama *sharing* DAK dan APBD, total dana sebesar Rp 324 juta digelontorkan untuk pembangunan/pengadaan MCK plus-plus di Benteng Selatan (dua unit), Benteng Utara (satu unit), Kelurahan Putabangun (satu unit) dan Desa Buki (satu unit). Dengan

kapasitas akses masing-masing 50–70 KK, rasio 4 orang/KK dengan fasilitas yang sama dengan MCK plus-plus di 2011, namun terdapat penambahan delapan bilik. Kemudian pada 2012 ada alokasi dana APBD masing-masing sebesar Rp 112 juta untuk pengadaan/pembangunan sarana jamban keluarga dengan sistem septik komunal di delapan lokasi (Benteng Selatan tiga unit, Benteng Utara tiga unit, dan Benteng dua unit) dengan kapasitas lima rumah per satu unit *septic tank* komunal. Dampak jangka pendek dari program ini sudah dapat dirasakan. Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di sekitar fasilitas tersebut, saat ini sudah memanfaatkan/mengakses secara optimal fasilitas-fasilitas sanitasi tersebut, dan terdapat tren penurunan penyakit diare dari tahun-tahun sebelumnya.

Sementara di level promotif, dalam rangka menyebarluaskan dan mempromosikan program sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat, Pemkab Kepulauan Selayar melakukan terobosan melalui forum-forum keagamaan. Program ini disebut sebagai “Ustad/Dai/Muballigh STBM”. Terobosan ini berangkat dari latar belakang penduduk Kepulauan Selayar mayoritas beragama Islam yang sangat menekankan pentingnya kebersihan pribadi dan masyarakat. Ajaran tersebut tertuang, baik dalam Alquran maupun Hadist.

Nilai-nilai Islam yang menghargai dan memberikan kedudukan tinggi bagi kebersihan terutama mengenai kesucian dari najis, baik berupa hadas besar maupun kecil, yang jika dikaitkan dengan sanitasi sangat relevan. Inilah salah satu alasan mengapa pendekatan-pendekatan religius dianggap sebagai pintu masuk dengan akseptabilitas tinggi bagi masyarakat, yang diharapkan mudah mengajak masyarakat untuk menyelesaikan program STBM dan melalui PHBS. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan mampu mengakselerasi pencapaian MDG’s terutama di Kabupaten Kepulauan Selayar bidang sanitasi.

Program ini berjalan melalui mekanisme yang tahapannya adalah: pertama, 2011 telah berlangsung pertemuan dengan para dai, baik dari kalangan NU maupun Muhammadiyah untuk menyamakan persepsi tentang sanitasi dan PHBS. Pada pertemuan ini diundang sebanyak 30-an dai, ustad dan mubaligh. Kedua, dari penyamaan persepsi ini, para dai/mubaligh/ustad akan memperoleh gambaran tentang visi, program dan target pemerintah tentang program sanitasi (STBM) dan PHBS yang relevan dengan Syiar Islam. Selanjutnya, para dai/mubaligh/ustad kemudian memunculkan berbagai konsepsi nilai Islam yang relevan untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan program pemerintah tersebut yang (nantinya) dituangkan dalam materi ceramah di tempat mereka masing-masing. Dan terakhir, setelah relevansi nilai dan program tersebut tercapai, para ulama didorong untuk menganjurkan dan mempromosikan program sanitasi itu dari perspektif Islam kepada umat Islam di kabupaten Kepulauan Selayar.

Hasilnya, dari testimoni salah seorang staf Bappeda, terdapat tren perubahan perilaku masyarakat terhadap PHBS, terutama bagi masyarakat di sepanjang pesisir yang dulunya banyak membuang hajat di pinggir pantai. Saat ini telah banyak yang berubah menggunakan fasilitas-fasilitas sanitasi, baik yang dibuat sendiri maupun yang disediakan oleh pemerintah.

Kabupaten Soppeng, melalui program “Percepatan Pembangunan Sanitasi”. Program inovatif yang dilakukan Kabupaten Soppeng ini termasuk terobosan yang patut diapresiasi. Mengatasi keterbatasan ekonomi masyarakatnya dalam membuat jamban keluarga. Pemerintah menawarkan kepada masyarakat yang tidak mampu membuat jamban melalui program “Arisan Jamban Keluarga”. Program ini diluncurkan untuk mengubah pola pikir dan sikap masyarakat agar tidak buang air besar di sembarang tempat (BABS). Dimulai pada 2011, program ini menggunakan metode yang digunakan sangat sederhana. Diawali dari pemicuan melalui sosialisasi, setelah itu diharapkan muncul kesadaran akan pentingnya arti kesehatan.

Pelaksanaan program melibatkan berbagai elemen dalam masyarakat. Selain dari unsur Dinas Kesehatan, pemerintah juga melibatkan tokoh masyarakat, unsur muspida, dan pemerintah setempat.

Setelah pemicuan selesai dilakukan, maka dibuatlah arisan jamban. Setiap kelompok beranggotakan 10 orang. Tiap bulannya mereka mengadakan pertemuan untuk memastikan giliran rumah yang mendapatkan jatah jamban. Tiap anggota membayar paket jamban sebesar Rp500 ribu dengan cicilan Rp50 ribu per bulan selama 10 bulan.

Keterbatasan anggaran disiasati tukang bangunan yang bersedia membiayai semua pembuatan jamban dalam kelompok. Kekurangannya dikerjasamakan dengan toko bahan bangunan untuk dicicil. Hanya dalam tiga bulan, pengerjaan semua jatah jamban dalam kelompok selesai. Sedangkan pengembalian pinjaman uang ke tukang dan pinjaman bahan bangunan ke toko bangunan, dananya dipungut tiap bulannya dari anggota.

Program “Arisan Jamban” membawa dampak signifikan. Hingga 2012, khusus program arisan jamban, jumlah kelompok rumah tangga yang ikut program tersebut sebanyak empat kelompok. Setiap kelompok diikuti rata-rata 10 anggota rumah tangga.

Keberadaan Kabupaten Soppeng sebagai daerah dengan lima terbaik layanan sanitasi tak diragukan lagi. Keberhasilan pemerintahnya memenuhi kebutuhan sanitasi mulai dari pembangunan sarana prasarana, bantuan material, hingga terobosan ide inovatif juga dinilai positif oleh masyarakat. Hasil survei menggambarkan bahwa kinerja pemerintah dengan berbagai kebijakannya sudah dipersepsikan baik.

Kabupaten Luwu Utara, dengan program “Kampung Bebas Buang Air Besar Sembarangan”. Kondisi geografis Luwu Utara yang banyak dilalui aliran sungai dan luas wilayah yang belum dihuni masyarakat, menjadi tanggung jawab pemerintah agar menjaga kesehatan lingkungan khususnya terbebas dari tinja manusia.

Upaya mengatasi hal tersebut, pemerintah membuat program sanitasi Kampung ODF (bebas buang air besar sembarangan). Program sanitasi pemerintah Luwu Utara pada dasarnya sudah dijalankan pada 2010.

Guna mencapai target 80 persen ODF pada 2015, pemerintah melalui Dinas Kesehatan Luwu Utara membuat berbagai kebijakan. Program pemicuan salah satu agenda rutin yang diberikan kepada masyarakat. Tujuannya, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan lingkungan. Pemicuan ini dilakukan yang melibatkan berbagai pihak. Tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat sangat berperan penting, khususnya pada saat memberikan materi penyuluhan.

Selain itu, pemerintah menawarkan paket hemat pengadaan jamban keluarga yang dikemas dalam arisan jamban keluarga (arisan jaga). Anggota kelompok arisan jaga dapat mengangsur pembayaran sesuai kemampuan keuangannya dengan paket jamban yang dipilihnya. Besarnya biaya tiap paketnya bervariasi. Paket satu Rp 175 ribu, paket dua Rp 375 ribu, paket tiga Rp 500 ribu, dan paket empat Rp 875 ribu. Perbedaan paket ini berdasarkan bahan bangunan yang diberikan.

Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan berupa alat cetak gorong-gorong kepada masyarakat. Alat tersebut dimanfaatkan khususnya bagi masyarakat yang ingin membangun jamban keluarga secara mandiri. Pada 2013 ini, terdapat 19 desa yang telah ODF. Capaian ini telah melewati target 80 persen kampung ODF pada 2015. (*)

KOTA MAKASSAR

Peraih Otonomi Awards 2013 Kategori Layanan Sanitasi

Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Sistem IPAL Komunal

ABD. HAFID

Peneliti FIPO

Monitoring dan evaluasi Otonomi Awards The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) untuk tahun 2013, menetapkan Kota Makassar sebagai juara terbaik untuk Kategori Khusus Layanan Sanitasi. Komitmen pemerintah Makassar dalam memperbaiki layanan sanitasi masyarakat perkotaan, mengantar Makassar meraih prestasi melampaui daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan.

Makassar mendapatkan poin tertinggi. Indikator yang dinilai yaitu inovasi program, wawancara, eksisting data, hingga hasil survei publik. Dari hasil akumulasi penilaian tersebut, Kota Makassar meraih 395 poin jauh lebih tinggi dari dua kabupaten lain yang menyusulnya, yakni Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Enrekang dengan nilai masing-masing 371 poin dan 368 poin.

Pemerintah Kota Makassar melalui Tim Pokja AMPL (Bappeda, Dinas PU, Badan Lingkungan Hidup Daerah, dan Dinas Kesehatan) memang sangat laik diapresiasi. Terobosan yang dilakukannya, mengembangkan program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) dengan membangun pengelolaan limbah rumah tangga dengan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) secara komunal. Proyek IPAL ini untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.

Program tersebut didukung perencanaan pembangunan sanitasi yang responsif dan berkelanjutan. Pemetaan situasi sanitasi tertuang dalam buku putih sanitasi. Buku putih tersebut merupakan potret yang mencakup aspek teknis dan aspek non-teknis seperti: aspek keuangan, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta aspek-aspek lainnya. Proyek ini didukung lembaga donor seperti AusAID, IUWASH USAID, Sanimas, Swash Care, USRI, MSMHP, dan Pamsimas.

Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Sanitasi seringkali di anggap sebagai urusan “belakang”, sehingga sering terpinggirkan dari urusan-urusan yang lain. Namun seiring dengan tuntutan peningkatan standar kualitas hidup masyarakat. Semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan.

Makassar menuju kota dunia dengan tingkat pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 5 tahun terakhir terus bertambah, dengan rata-rata kenaikan 1,56 persen per tahunnya. Bayangkan jika pertumbuhan penduduk terus berkembang sementara penanganan terhadap sanitasi tidak dikembangkan, maka akan terjadi pencemaran terhadap tanah dan air yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Pengelolaan sanitasi menjadi prioritas, sebab bila tidak maka akan berakibat buruk terhadap masyarakat. Akibat buruk dari kualitas prasarana sanitasi dapat meningkatkan risiko kesehatan lingkungan terutama penularan penyakit, misalnya diare, demam berdarah, dan lainnya. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya berbagai jenis penyakit terutama diare, pembangunan

IPAL menjadi salah satu solusi tepat.

Pembangunan IPAL komunal ini dilakukan dengan praktik yang cukup mengesankan. Mengapa demikian? karena beberapa titik pembangunan bak IPAL seperti di kelurahan Suangga, Layang, dan Mandala dibangun di atas beton jalan umum. Pembangunan bak IPAL di atas poros lorong jalan, dilakukan karena lahan kosong yang ada di kota Makassar sudah sangat terbatas.

Proses pembangunan sistem IPAL komunal ini tetap berjalan berdasarkan mekanisme, seperti sosialisasi bersama Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), dengan mengundang unsur pemerintah setempat (kelurahan) sejawaran Kota Makassar. Kelurahan bisa mengajukan permohonan pembangunan IPAL komunal. SKPD selanjutnya melakukan peninjauan dan mempersiapkan program jika disetujui.

Tahapan berikutnya, dilakukan pemicuan oleh bidang sanitasi dari dinas kesehatan. Setelah dilakukan pemicuan, pada tingkatan masyarakat dibentuk kelembagaan seperti Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang difasilitasi oleh PNPM Mandiri Perkotaan. Hasil pembentukan kelembagaan tersebut kemudian dikeluarkan Surat Keputusan (SK) oleh pemerintah setempat (lurah) sebagai penguatan keberadaan lembaga tersebut di tingkatan masyarakat.

Seiring berjalannya proses pembangunan IPAL komunal pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, selanjutnya dibentuk kelembagaan bagi pengguna dan penerima manfaat, seperti Badan Pengelola Sarana Sanitasi (BPSS), dan Kelompok Pemelihara serta Pemanfaat (KPP) Sanitasi yang dimediasi oleh KSM atau BKM setempat. Tujuan dibentuknya BPSS dan KPP ini agar masyarakat dapat mengelola, memanfaatkan, dan memelihara sarana IPAL komunal tersebut. Salah satu cara bentuk pengelolaan dan pemeliharaan dengan menarik tarif masyarakat pengguna dan pemanfaat, dengan model subsidi silang yang disepakati bersama.

Pembangunan IPAL komunal di kota Makassar dari tahun 2007 hingga 2012, telah dibangun sebanyak 60 titik dengan jumlah sasaran per Kepala Keluarga (KK) masing-masing tiap IPAL komunal antara 15 sampai 100 KK. (*)

Daerah Terbaik Bidang Layanan Air Minum

Kabupaten Enrekang, program inovasi yang di tawarkan PDAM “Tirta Massenrempulu” Kabupaten Enrekang adalah program untuk mengatasi keterbatasan alat instalasi pengolahan air (IPA), yang dimana pada saat itu IPA yang akan digunakan nantinya untuk mengolah air baku tersebut dalam proses pengerjaan atau belum selesai dan belum bisa di manfaatkan. Sedang kebutuhan masyarakat terhadap air sangat mendesak. Karena itu PDAM “Tirta Massenrempulu” Kabupaten Enrekang melakukan inisiatif untuk memanfaatkan peralatan yang ada seperti *reservoir* yang dapat berfungsi sebagai IPA, agar masyarakat dapat segera memanfaatkan air dan tidak terbuang percuma. Sumber air baku (mata air) saat ini kondisinya sudah mulai rawan/ kritis akibat adanya peladangan berpindah oleh masyarakat yang berdomisili dekat dari sumber air baku.

Pelaksanaan program rekayasa IPA ini hanya berlangsung di Kecamatan Enrekang (kota kabupaten) saja, karena di kecamatan-kecamatan sudah ada dan kondisinya masih sangat baru, seperti IPA Bongso yang terletak di Buntu Batu.

Upaya Pemda meningkatkan akses air minum ke masyarakat perkotaan di Kabupaten Enrekang dengan sistem tata kelola pelayanan yang maksimal dan baik, dilakukan melalui PDAM “Tirta Massenrempulu” Kabupaten Enrekang. Targetnya, bagaimana mengolah air keruh yang berasal dari sumber air baku menjadi air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih di Kecamatan Enrekang (Kota Kabupaten) sesuai standar kesehatan yang telah ditetapkan. Para teknisi PDAM merekayasa cara pengolahan tersebut sambil menunggu rampungnya pembangunan sistem IPA yang nantinya akan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.

Keunggulan program ini adalah sistem pengolahannya sangat sederhana, namun hasilnya tidak jauh berbeda dengan sistem IPA. Pada sistem rekayasa ini hanya ada dua proses, yaitu fluktuasi dan sedimentasi (pengendapan). Tingkat pemakaian tawas sangat tergantung pada tingkat kekeruhan air, semakin keruh air kian banyak tawas yang digunakan. Sedangkan pada sistem IPA ada tiga proses, yaitu fluktuasi, sedimentasi, dan filtrasi (penyaringan). Meski begitu, biaya bahan-bahan kimia akan lebih murah dengan sistem IPA.

Alhasil, melalui rekayasa IPA kebutuhan air ke masyarakat di Kecamatan Enrekang dapat terlayani, terutama di lingkungan perumahan Pinang dan Talaga yang sebelumnya sangat sulit terpenuhi, terutama pada musim kemarau. Selain itu jumlah pelanggan rumah tangga dan pelaku usaha di Kecamatan Enrekang makin bertambah.

Kabupaten Takalar melalui program “Pasang Baru Air Minum Sistem

Kredit”. Kabupaten Takalar terletak di sekitar wilayah pesisir. Kondisi air tanahnya yang asin menyebabkan masyarakat sulit menggunakan air sumur sebagai sumber air minum. Sebelum mendapatkan akses air PDAM, masyarakat pesisir hanya membeli air minum dari penjual keliling dalam bentuk galon.

Kondisi ini berlangsung cukup lama, khususnya bagi masyarakat yang bermukim di pinggiran kota. Mengatasi hal tersebut, pemerintah membangun beberapa instalasi kota kecamatan (IKK) air minum. Tujuannya, memberikan kemudahan akses air bersih kepada semua masyarakat bukan hanya di kota tetapi juga di daerah terpencil.

Biaya administrasi sambungan baru pun tidak ada masalah. Pemerintah membuat terobosan melalui program sistem kredit sambungan baru. Meskipun PDAM belum melibatkan lembaga keuangan dalam sistem kredit, tetapi masyarakat merasa sangat terbantu dengan pemberian keringanan pembayaran sambungan baru tersebut. Prosesnya pun sangat mudah. Masyarakat yang ingin sambungan baru cukup melapor kepada petugas lapangan atau langsung ke kantor PDAM, mengisi formulir, menyiapkan fotokopi KTP/kartu keluarga.

Selanjutnya, pihak PDAM memberikan informasi terkait sistem pembayaran pada biaya sambungan baru. Calon pelanggan mendapat dua pilihan, bayar *cash* (tunai lunas) atau sistem kredit. Bagi yang membayar tunai, cukup Rp 700 ribu. Sedangkan dengan sistem kredit, harus membayar total sebesar Rp 750 ribu. Berdasarkan ketentuan, pelanggan yang menggunakan alur sistem kredit, maksimal membayar uang muka antara Rp 400 ribu, Rp 300 ribu, hingga Rp 200 ribu, selebihnya diangsur Rp 50 ribu/ bulan.

Upaya mengoptimalkan pelayanan pada pelanggan, PDAM juga menyiapkan layanan pengaduan, informasi rekening tagihan bulan berjalan melalui SMS centre. Fasilitas lainnya yang dimiliki PDAM Takalar saat ini adalah sistem baca meter dengan aplikasi Bima Sakti yang mampu mengetahui jumlah tagihan secara tepat dan benar, sehingga mengurangi komplain pelanggan.

Selain itu, PDAM Takalar telah memiliki sistem *geographics information system* (GIS) yang memberikan kemudahan melakukan pemetaan jaringan pipa sehingga permasalahan penataan dan perbaikan jaringan dapat segera teratasi. Melalui alat ini pula PDAM mudah mengatasi kebocoran pipa.

Dengan keluarnya kebijakan pemerintah dan PDAM yang terus berupaya melakukan perbaikan kinerja teknik, manajemen, dan keuangan. Respons positif masyarakat sebagai pelanggan terhadap PDAM Takalar sangat baik. Kinerja maksimal ini pula terbukti dengan meningkatnya jumlah pelanggan sejak dua tahun terakhir. Sejak 2011 jumlah pelanggan mencapai 7.927 sementara pada 2012 meningkat menjadi 9.150 pelanggan.

Kota Parepare, Setiap layanan publik tentunya harus menyediakan layanan pengaduan sebagai salah satu cara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sejak awal berdirinya, PDAM Parepare telah menyediakan layanan pengaduan melalui *call center* 121 yang merupakan kerjasama dengan Telkom, lalu berubah menjadi 0421-21500 karena usainya kontrak. Hanya saja, cara tersebut tidak efektif mengakomodasi keluhan pelanggan, karena kerap tidak sinkron antara pengaduan dan respons petugas. Seringkali petugas sudah berada di lapangan pada saat aduan masuk, sehingga penanganan menjadi terlambat.

Untuk mengatasi problem tersebut PDAM Parepare mendesain model pengaduan melalui SMS Center (2009) dan *website* (2011). Melalui SMS Center, pelanggan bisa mendapatkan informasi dan menyampaikan aduan. Pelanggan cukup mengirim SMS ke 0811 421 6500, sesuai format yang telah disediakan.

Adapun mekanismenya adalah SMS aduan tersebut akan masuk ke *server*, kemudian *server* akan meneruskan ke semua daftar telepon yang ada di *server* (direktur dan karyawan/staf PDAM), jadi tidak lagi menggunakan tenaga admin untuk meneruskan SMS yang masuk. Sehingga ketika ada aduan masuk, staf yang bersangkutan dapat langsung mengatasinya. Selain melalui SMS center, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui *website* www.pdamparepare.com.

Tidak hanya penanganan pengaduan yang semakin efektif, tetapi juga hubungan baik dengan pelanggan pun dapat dimaksimalkan. Berdasarkan hasil survei, keberadaan program inipun dipersepsi baik oleh masyarakat.

Kota Makassar, dengan program “Peningkatan Layanan PDAM”. Institusi PDAM sebagai penyedia air minum bagi masyarakat bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan (masyarakat). Namun tidak hanya itu, sebagai perusahaan juga harus mampu mandiri dalam mengatur dan mengelola serta berkembang. Mandiri juga dalam artian kemampuan finansial. Hal ini hanya bisa diperoleh melalui penerimaan yang wajar atas hasil usaha perusahaan. PDAM Makassar pun menyadari hal tersebut.

Dalam perjalanannya banyak faktor yang menyebabkan kurangnya penerimaan PDAM Makassar, diantaranya (1) angka kehilangan air (NRW) yang tinggi mencapai 48%. Upaya pencarian kebocoran pada siang hari dinilai belum efektif. (2) Kesalahan baca meter oleh petugas, bukan hanya merugikan pelanggan tapi juga PDAM sendiri. Dan (3) Piutang PDAM cukup tinggi yang mencapai 20 persen.

Berbagai upaya pun dilakukan untuk memberikan layanan terbaik ke

masyarakat, sekaligus meningkatkan penerimaan PDAM. Memanfaatkan teknologi menjadi salah satu solusinya. Mulai dari penggunaan kamera baca meter untuk meminimalisasi kesalahan baca meter oleh petugas lapangan. Selain itu, terdapat fasilitas *Payment Point for Online Bank* yang memberikan kemudahan kepada pelanggan melakukan pembayaran, serta penggunaan *Electronic Data Capture* (EDC) sebagai alat transaksi penagihan tunggakan pelanggan. Melalui EDC penerimaan PDAM dari pembayaran tunggakan pelanggan pun meningkat dari Rp 513.650.950,- pada 2011 menjadi Rp 3.571.448.412,- di 2012. PDAM Makassar menjadi PDAM pertama di Sulsel yang memanfaatkan berbagai teknologi tersebut.

Selain itu, sebagai upaya mengurangi NRW, PDAM Makassar melakukan posko malam hari serta memanfaatkan pemetaan jaringan GIS untuk mendeteksi kebocoran air. Pada dasarnya hal ini dianggap efektif, namun belum mampu mengurangi angka kehilangan air karena masih banyaknya masyarakat melakukan sambungan ilegal (*illegal connection*).

Secara garis besar berbagai upaya yang dilakukan PDAM Makassar telah terlihat dari peningkatan penerimaan PDAM dan jumlah pelanggan. Jika pada 2011 laba bersih PDAM sebesar Rp 21miliar meningkat menjadi Rp28 miliar pada 2012. Jumlah pelanggan pada 2011 adalah 154,500 meningkat menjadi 158,777 pada 2012. Hal ini pun tidak lepas dari perhatian Pemerintah Kota Makassar, misalnya menyetujui penyesuaian tarif air sesuai usulan PDAM dan memfasilitasinya dalam upaya pengembangan dan perbaikan kinerja PDAM. (*)

KOTA PALOPO

Peraih Otonomi Awards 2013 Kategori Khusus Layanan Air Minum

'Bersama' PDAM, Air Bersih untuk Semua

DASMAN

Peneliti FIPO

Air bersih merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harus terpenuhi. Sebagaimana dilakukan PDAM Kota Palopo yang mampu menjangkau cakupan wilayah layanan hingga 85, 06 persen. Bagaimana strategi PDAM Palopo mewujudkan hal tersebut, berikut laporannya.

Tahapan monitoring evaluasi The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) pada 2013 menentukan PDAM Palopo keluar sebagai juara terbaik untuk kategori khusus layanan air minum. Komitmen pemerintah Kota Palopo dalam pengembangan PDAM sebagai pengelola air bersih, mengantarkan Palopo melampaui daerah lainnya.

Berdasarkan hasil monitoring evaluasi peneliti FIPO, terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam penyediaan air bersih. PDAM Palopo mendapatkan poin tertinggi. Indikator yang dinilai mulai dari nilai inovasi, wawancara performa, eksisting hingga survei publik. Dari akumulasi penilaian tersebut, PDAM Palopo berhasil meraih 371. Disusul PDAM Enrekang dan PDAM Takalar dengan nilai masing-masing 369 dan 324.

Pemerintah Kota Palopo melalui PDAM memang patut diapresiasi. Terobosan berbagai kebijakan dilakukan dalam memberikan layanan air bersih. Ada tiga strategi penting telah dijalankan PDAM Palopo saat ini, perbaikan kondisi keuangan, manajemen, dan teknik.

Upaya penyehatan keuangan, pemerintah Kota Palopo berperan dalam penyertaan modal. Selama tiga tahun berturut-turut, total dana APBD yang dikucurkan sebesar Rp 24 miliar. Anggaran digunakan sebagai modal pembangunan instalasi pengolahan air dan biaya perbaikan kerusakan jaringan instalasi.

Keberpihakan anggaran ini menjadi jalan bagi PDAM untuk mengembangkan diri. Hingga akhirnya mendapat kepercayaan pihak perbankan, kemudian mendapatkan pinjaman dengan suku bunga rendah. Belum lagi dukungan AusAID, lembaga donor Australia untuk 2.000 sambungan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan jumlah anggaran Rp 5 miliar. PDAM Kota Palopo juga berhasil melakukan restrukturisasi utang. Bahkan sejak 2009, lembaga ini telah membuat bisnis plan sebagai syarat administrasi penghapusan utang non pokok.

Dalam rangka menjaga kualitas laporan keuangan, manajemen PDAM Palopo rutin berkonsultasi dengan tim audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sehingga wajar jika laporan keuangan PDAM Palopo sejak 2010-2012 meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

Peran serta dewan pengawas dalam pendampingan dan upaya-upaya mendorong PDAM dalam peningkatan kualitas layanan, juga cukup besar. Demikian juga partisipasi *stakeholders* lainnya. Media lokal diberi ruang untuk ikut mengontrol setiap kebijakan pemerintah dan PDAM. Termasuk pembentukan forum pelanggan yang banyak memberikan masukan.

PDAM Kota Palopo yang memiliki luas wilayah layanan 155,19 kilometer persegi, berkomitmen menata aspek tekniknya. Penanganan instalasi ditangani secara profesional. Tim teknik di lapangan selalu siaga mengidentifikasi

masalah kebocoran pipa. Patugas tidak perlu menunggu pengaduan dari masyarakat, semuanya diselesaikan berdasarkan standar operasional pelayanan (prosedur).

Dari berbagai langkah-langkah teknik yang dilakukan, ternyata memberikan pengaruh positif. PDAM berhasil menurunkan tingkat kebocoran dari 40,17 persen pada 2011, menjadi 37,82 persen pada 2012.

Meski berada jauh dari ibu kota provinsi, tetapi PDAM Kota Palopo tidak ketinggalan dalam penggunaan teknologi tinggi. Seperti alat baca meter Bima Sakti digunakan untuk mendata penggunaan air pelanggan setiap bulan. Tujuannya, meminimalisasi kesalahan petugas baca meter. Hasilnya signifikan, baca meter Bima Sakti mengurangi banyaknya komplain dari pelanggan. Alat ini juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan bulanan hingga menyentuh angka Rp300 juta.

Sarana laboratorium pun dimiliki. Tersedia satu ruangan khusus yang digunakan untuk menjaga kualitas air. Laboratorium ini dijaga oleh petugas, secara rutin memeriksa agar air yang didistribusikan terjamin kesehatannya.

Nilai lebih lainnya yang dimiliki, disediakan sistem layanan pengaduan yang diberi nama “SMS Centre”. Tujuannya, menampung keluhan dan kritik konstruktif agar pelayanan berjalan maksimal. “SMS Centre” juga efektif digunakan pelanggan, termasuk menanyakan berapa jumlah tagihan bulannya.

Peningkatan pelayanan bisa juga dilihat dengan terbitnya kebijakan kemudahan proses sambungan baru. Calon pelanggan cukup datang ke kantor PDAM mengisi formulir. Mereka yang tergolong masyarakat miskin diberi keringanan pembayaran biaya sambungan dengan sistem kredit. Angsuran dibayar setiap bulan sesuai kesepakatan antara pelanggan dan PDAM. Selain itu, ada kebijakan keringanan pembayaran tagihan bulanan. Keringanan ini diberikan khusus bagi pelanggan yang mengalami kebocoran instalasi dalam rumahnya tanpa disengaja.

Komitmen pemerintah dan PDAM pun mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Buktinya, akumulasi persepsi masyarakat yang dilakukan melalui survei publik oleh FIPO sangat baik. Indikator pertanyaannya menyangkut aspek kualitas, kontinuitas, dan kuantitas air PDAM. Sekarang ini, PDAM telah mampu menjawab kebutuhan air bersih bagi hampir seluruh warga Kota Palopo. Terbukti, hingga 2012, jumlah cakupan layanan wilayah pelayanan PDAM Kota Palopo mencapai 85,06 persen. (*)

Bab 6

Penutup



Catatan Kegiatan Penelitian dan Survei Publik 2013

2013 menandai lima tahun perjalanan The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO). Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada awal 2013 menandai dimulainya rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) FIPO sekaligus memasuki lima tahun perjalanannya mendorong kemajuan daerah. Sosialisasi dilakukan tidak hanya untuk memaparkan kembali indikator-indikator yang selama ini menjadi dasar penilaian, melainkan juga memperkenalkan indikator baru dalam skema



Peneliti FIPO saat melakukan wawancara mendalam dengan salah seorang Kepala SKPD



Enumerator survei sedang melakukan wawancara dengan salah seorang penerima manfaat program inovasi daerah

movev FIPO, yaitu layanan air minum dan sanitasi.

Mengikuti format kegiatan sosialisasi tahun 2012, pada sosialisasi Otonomi Awards 2013 FIPO kembali mengundang perwakilan pemerintah daerah; Bappeda, Humas, dan PDAM sebagai peserta kategori khusus dari 24 kabupaten/kota untuk hadir di Graha Pena Makassar, pada 2 Februari 2013.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah mulai menyiapkan program inovasi yang akan diajukan pada penilaian Otonomi Awards 2013. Syarat yang ditetapkan FIPO masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni program harus berjalan minimal satu tahun, sedangkan program yang telah meraih trofi, harus mengalami peningkatan inovasi yang cukup signifikan (proliferasi).

Proses penelitian lapangan dimulai pada Maret 2013, dan berlangsung selama empat bulan yang terbagi atas lima gelombang. Gelombang pertama, 25 Maret-2 April 2013 meliputi lima kabupaten; diantaranya Kabupaten Maros, Parepare, Pinrang, Sidrap, dan Enrekang. Gelombang kedua, 15-23 April 2013, berlangsung di kota Makassar, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Bantaeng. Gelombang ketiga, 6-14 Mei 2013 di Bulukumba, Selayar, Bone, Soppeng, dan Wajo. Gelombang keempat, 27 Mei-4 Juni 2013 di Kabupaten Luwu, Kabupaten Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Tana Toraja. Gelombang kelima, 17-25 Juni 2013 di Kabupaten Sinjai, Gowa, Pangkep, Barru, dan Toraja Utara.

Setiap peneliti bertanggung jawab pada satu daerah penelitian di tiap gelombang. Hasil penelitian pada setiap gelombang akan dipaparkan di hadapan peneliti lainnya, untuk memberikan nilai terhadap program yang diajukan. Tidak semua program akan disurvei, hanya program inovasi daerah yang memenuhi standar nilai, berdasarkan rujukan FIPO. Program kemudian direkomendasikan kepada tim survei independen sebagai mitra FIPO, untuk melakukan survei publik dan survei inovasi.

Adapun responden dipilih dari sepuluh kelompok masyarakat yaitu, organisasi kemasyarakatan LSM (NGO), organisasi profesi, tokoh masyarakat, investor/pebisnis/IKM dan koperasi, petani dan nelayan, DPRD/parpol,



Salah seorang respondens sedang mengisi kuisioner survei publik

mahasiswa/pelajar, masyarakat umum, kelompok perempuan. Seratus kuesioner didistribusikan secara merata kepada masing-masing responden di tiap daerahnya. Kegiatan survei berlangsung selama empat bulan sejak April hingga Juli 2013.

Setelah kegiatan penelitian dan survei berakhir, dilanjutkan pengumpulan dan analisis dokumen/data eksisting kabupaten/kota sebagai penilaian pendukung terhadap sebuah program inovasi. Akumulasi dari nilai inovasi, survei publik, dan eksisting data menghasilkan nilai akhir yang menentukan pemenang pada tiap indikator. (*)

Seminar Nasional



Pembicara seminar nasional. Dari kiri, Agus Ranuprijambodo (Auditor Ahli Muda BPKP), Benny Djumhana (Municipal Finance Specialist National Office IUWASH), Purwoko Hadi (Water Sanitation Finance Government USAID IUWASH), Abdul Madjid Sallatu (Moderator).

Banyaknya PDAM yang menunggak utang, membuat pemerintah harus merestrukturisasi pinjaman kepada PDAM. Sampai saat ini, tercatat sebanyak 175 PDAM yang melakukan tunggakan utang. Selama dua tahun

terakhir upaya penyelesaian utang PDAM semakin intensif dilakukan pemerintah. Penyebabnya, tunggakan PDAM sudah mencapai Rp4,6 triliun, dengan rincian Rp3,1 triliun tunggakan non pokok dan Rp1,5 triliun tunggakan pokok.

Karena kurang modal, menyebabkan kinerja PDAM dalam menyediakan air minum semakin menurun. Selain itu, tugas PDAM semakin berat dengan target pemerintah dalam rangka memenuhi target *Millennium Development Goals* (MDGs).

175 PDAM penunggak tersebut, masih tersisa 71 PDAM di antaranya belum mengajukan restrukturisasi utang, sementara 104 PDAM telah mengajukannya. Sebanyak 15 PDAM dipastikan mendapat persetujuan pemerintah melakukan restrukturisasi utang, sedangkan 8 PDAM ditolak, dan selebihnya masih dalam kajian.

Persetujuan restrukturisasi utang diberikan oleh Menteri Keuangan atau Presiden atau DPR, sesuai dengan jumlah yang dihapuskan setelah dilakukan evaluasi dan penilaian kinerja keuangan PDAM berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 120/05/2008 yang direvisi melalui Peraturan Menteri Keuangan No.114/PMK.05/2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Perusahaan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum.

Sesuai PMK ini, program restrukturisasi utang PDAM tersebut dilakukan dengan cara penjadwalan kembali atas tunggakan pokok dengan menetapkan periode pembayaran kembali atas dasar kemampuan *cash flow* masing-masing PDAM.

Penghapusan tunggakan non pokok bagi PDAM dengan kinerja sehat dilakukan melalui *debt swap to investment* dengan kegiatan atau proyek yang dibiayai dari dana PDAM dan atau APBD. Adapun tunggakan non pokok bagi PDAM dengan kinerja kurang sehat ataupun sakit, dilakukan tanpa harus melalui mekanisme *debt swap to investment*.

Penghapusan dilakukan secara bertahap, yaitu penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak. Restrukturisasi tidak semata-mata untuk penyelesaian masalah tunggakan, namun lebih ditujukan sebagai langkah penyehatan kinerja PDAM.

Penyehatan dilakukan melalui penetapan rencana bisnis dengan target-target terukur yang ditetapkan dalam PMK 120 atau No.114/PMK.05/2012. Melihat kompleksnya permasalahan yang dihadapi PDAM, The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) menyelenggarakan seminar nasional bertema “Penghapusan Utang Non-Pokok PDAM untuk Membawa PDAM Lebih Baik dalam Memberikan Pelayanan Air Minum”.

Seminar nasional ini dibuka oleh Kepala Bappeda Sulsel, Amal Natsir

mewakili Gubernur Sulawesi Selatan. Seminar sehari ini juga dihadiri sejumlah pejabat Muspida Sulawesi Selatan, Direktur Utama PDAM, Kepala Bagian Teknis dan Keuangan PDAM, serta para kepala SKPD kabupaten/kota se-Sulsel.

Hadir pula perwakilan lembaga-lembaga donor USAID; Kinerja, IUWASH, SSEI, YAS, EMAS, Lembaga mitra seperti JPIP Surabaya, kalangan dosen dan mahasiswa.

Intisari Seminar Nasional



Andi Mattingaragau

Seminar Nasional dengan tema "Penghapusan Utang Non Pokok PDAM untuk Membawa PDAM Lebih Baik dalam Layanan Air Minum" diawali dengan pemaparan kinerja layanan paripurna PDAM se-Sulawesi Selatan oleh Peneliti Eksekutif FIPO, Andi Mattingaragau yang mewakili FIPO memberikan gambaran mengenai temuan-temuan program dan hasil survei publik pada indikator layanan air minum.

Menurut Andi, PDAM lahir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih. Selain itu PDAM diharapkan pula menghasilkan nilai ekonomis. Namun harapan untuk mendapatkan return dari modal yang diinvestasikan daerah tidak sesuai harapan. Menurut hasil riset yang dilakukan peneliti FIPO terhadap 23 PDAM kabupaten/kota di Sulsel ditemukan "sejuta" masalah serius dan jika tidak ditangani dengan baik akan berdampak terhadap kinerja dan kualitas layanan air minum.

Masalah yang membelit hampir seluruh PDAM di Sulsel, menurut Andi Mattingaragau adalah dari aspek keuangan dengan tingkat likuiditas rendah, solvabilitas tinggi yang berpengaruh terhadap profitabilitas. Selain itu, masalah juga muncul dari aspek teknis. Misalnya *Not Revenue Water* (NRW) yang tidak teratasi dengan serius karena tingkat kebocoran air yang tinggi, pemakaian teknologi yang up to date dan tidak tersedianya peralatan teknik seperti *geographic information system* (GIS) yang berfungsi sebagai alat identifikasi jaringan perpipaan dan data pelanggan.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan, peneliti FIPO, mengusulkan beberapa hal untuk memperbaiki kinerja PDAM di Sulsel, diantaranya: (1) restrukturisasi modal, berupa penyertaan modal Pemda untuk kebutuhan modal pengembangan PDAM, (2) dukungan teknologi untuk mengatasi kebocoran air dan peralatan teknik lainnya, (3) pembentukan forum pelanggan sebagai sarana komunikasi antara PDAM dengan pelanggan, (4) membuat standar operasional prosedur (SOP) sebagai standar pelaksanaan kegiatan di semua aspek.

Dari gambaran di atas, Abdul Madjid Sallatu selaku moderator memberikan refleksi bahwa betapa mulia tujuan awal pembentukan PDAM oleh pemerintah, karena telah menyajikan suatu kelembagaan kepada masyarakat dalam melayani air bersih. Apalagi, air bersih adalah kebutuhan utama bagi hajat hidup orang banyak.

Masyarakat juga sudah sepenuhnya menyadari bahwa air bersih bukanlah barang publik, namun sudah menjadi barang ekonomi bernilai yang harus dibayar oleh masyarakat. Pelayanan merupakan sukma dari PDAM, dan harus dicatat bahwa PDAM telah menjadi bagian integral sejarah panjang pemerintahan dalam melayani masyarakat. Namun pertanyaannya, “PDAM sekarang ini melayani yang mana?”

Prof. Dr. Purwoko Hadi, *Water Sanitation Finance Government USAID*



Purwoko Hadi

IUWASH, yang tampil sebagai pembicara pertama menyampaikan bahwa infrastruktur air adalah kunci untuk kehidupan, karena air adalah kunci kehidupan. PDAM sesuai dengan tempat dan posisinya *very tight regulated*.

Akses air bersih dari 2009 hingga 2013, capaiannya masih rendah menurut proporsi penduduk yang memiliki akses terhadap air bersih. Target MDG's 2015 berdasarkan sumber air terlindungi untuk wilayah perkotaan pada 2009 hanya 49,82 persen, sedangkan target MDG's adalah 78,19 persen, sehingga masih jauh dari harapan yakni sekitar 28,37 persen. Sementara layanan air bersih untuk perpipaan daerah perkotaan 2009 adalah 43,96 persen sedangkan target MDG's tahun 2015 adalah 68,32 persen. Jadi, masih kurang sekira 24,36 persen untuk mencapai target tersebut.

Negara menjamin untuk memenuhi kebutuhan akan air. Standar Kebutuhan air adalah 10m³ per kepala keluarga per bulan. Pengeluaran rumah tangga tidak melampaui 4 persen dari pendapatan masyarakat pelanggan.

Rata-rata persentase masyarakat yang dilayani baru 50 persen, di sinilah tantangannya. Untuk PDAM yang menjadi persoalan ada “3K” yaitu kualitas, kontinuitas, dan kuantitas. Pemerintah daerah sebagai penanggung jawab penyediaan air harus menjawab tantangan ini. Pertanyaannya adalah dari mana masyarakat mendapatkan air, apakah airnya layak dikonsumsi, serta berapa biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mendapatkan air. Sekarang ini beberapa daerah mengalami kesukaran memperoleh air baku untuk pengembangan SPAM. Dalam hal ini diharapkan peran sektor swasta, karena keterbatasan kemampuan pembiayaan oleh pemerintah.

Agus Ranuprijambodo, SE., Ak sebagai auditor ahli muda BPKP mewakili



Agus Ranuprijambodo

Kepala Sub Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Air Minum, yang tampil menjadi pembicara kedua, memaparkan kinerja PDAM secara nasional dan secara lebih spesifik kinerja PDAM di Provinsi Sulawesi Selatan. Menurutnya, ada dua pendekatan untuk melakukan pengukuran kinerja PDAM. Pertama, berdasarkan Kemendagri No.47 tahun 1999, dan kedua berdasarkan indikator penilaian dari BPPSPAM Tahun 2010.

Dalam Kepmendagri No. 47 tahun 1999 untuk pengukuran kinerja PDAM ada tiga aspek penilaian yaitu keuangan, operasional, dan administratif. Sedangkan indikator BPPSPAM ada empat aspek yaitu keuangan, pelayanan, operasional, dan sumber daya manusia.

Terkait dengan tema seminar, ada beberapa hal yang berkaitan dengan penghapusan utang diantaranya rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas,

rasio total aktiva terhadap total utang, rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi, serta rasio laba operasi sebelum penyusutan terhadap angsuran pokok dan bunga jatuh tempo.

Hasil evaluasi kinerja PDAM oleh BPKP selanjutnya dikirimkan ke

Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pemberi amanat, dan ke Kementerian Keuangan dengan tujuan, pertama terkait penyelesaian utang jangka panjang PDAM, dan kedua terkait bantuan pemerintah berupa penyertaan modal yang belum jelas statusnya.

Cakupan audit BPKP secara nasional pada tahun 2012 mencapai 274 PDAM dan meningkat pada 2013 yakni 333 PDAM dari sekitar 410 PDAM se-Indonesia. Berdasarkan hasil penilaian BPKP pada 23 PDAM di Provinsi Sulawesi Selatan, hanya 1 PDAM (4,35 persen) yang berkinerja baik, 10 PDAM (43,48 persen) kinerja cukup, dan 12 PDAM (52,17 persen) kinerja kurang.

Dari tingkat kesehatan, 8 PDAM (34,78 persen) tergolong sehat, 8 PDAM (34,78%) tergolong kurang sehat, dan 7 PDAM (30,43%) masih sakit. Adapun kondisi utang jangka panjang PDAM di Sulsel, dari 18 PDAM yang mempunyai utang jangka panjang, 4 diantaranya telah disetujui restrukturisasi, 9 telah mengajukan, dan masih ada 5 PDAM yang belum mengajukan restrukturisasi.

Benny Djumhana, *Municipal Finance Specialist National Office* IUWASH



Benny Djumhana

sebagai pembicara ketiga, menguraikan tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan IUWASH kepada PDAM di Sulsel, lebih khusus lagi terkait program restrukturisasi utang untuk membawa PDAM lebih baik lagi sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Tujuan IUWASH adalah untuk membantu pemerintah Indonesia dalam mencapai target MDG's pada sektor air minum dan sanitasi. Pada 2015, Indonesia harus mencapai cakupan layanan air minum 68 persen. Bagaimana IUWASH melakukan programnya? Dengan mendekatkan tiga komponen yang bergerak dalam kegiatan air minum yaitu pemerintah, penyedia layanan (PDAM), dan masyarakat.

Program-program yang dilakukan IUWASH diantaranya program untuk mendukung peningkatan kinerja jasa layanan air minum (PDAM), program pembiayaan perluasan pelayanan PDAM, peningkatan kapasitas PDAM, dan program restrukturisasi utang PDAM. Terkait restrukturisasi

utang berdasarkan PMK 114 pada 2012, bentuk bantuan IUWASH adalah membantu PDAM dalam menyusun *Business Plan*, memperoleh persetujuan stakeholder dan memperoleh persetujuan kementerian keuangan.

Manfaat adanya restrukturisasi utang PDAM, adalah dihapuskannya utang non pokok PDAM, meningkatnya kinerja profitabilitas PDAM, memiliki akses untuk pembiayaan air dari pihak luar untuk pengembangan SPAM, dan meningkatnya pelayanan air minum di kabupaten/kota.

Pengantar Diskusi Moderator, Madjid Sallatu:

Persoalan PDAM memang cukup kompleks mulai dari hal yang bersifat teknis operasional, juga menyangkut kutipan-kutipan para negarawan sampai pada ayat-ayat suci Al-Quran. Hal tersebut menunjukkan betapa PDAM memang perlu mendapat sorotan dan perhatian.

Ada empat tema besar yang bisa dishare dalam seminar kali ini:

1. Adakah inovasi yang pernah dilakukan dalam perhitungan harga pokok.
2. Mungkin ada semangat praktik cerdas di dalam kaitan dengan manajemen PDAM khususnya manajemen keuangan.
3. Adakah usulan-usulan kongkret atau ketentuan dan peraturan yang berlaku dan sementara diajukan saat ini.
4. Usulan-usulan yang bersifat mendasar tentang dukungan pemerintah daerah.

Sesi Tanya Jawab

**) Aksan dari PDAM Makassar*

- Tantangan PDAM terkait 3K, hasil yang ingin dicapai dari 3K tentunya biaya operasional yang kadang jauh berbeda dari tiap daerah.
- Tingkat kehilangan air. Perhitungan terkait kehilangan air sangat terkait dengan meter terutama dari hulu ke hilir, sehingga meter perlu mendapat perhatian?
- Cakupan pelayanan terkait MBR, dibutuhkan bantuan jaringan air.
- Ketersediaan air baku mesti menjadi prioritas perhatian oleh pemerintah pusat, terutama terkait APBN. Bagaimana mau mengurus air baku, jika sumber pelayanan pun belum tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.
- Mungkin saatnya air minum sudah ada yang mengurus pada tingkat kementerian.
- Terkait kinerja PDAM, mengusulkan mengenai tingkat kehilangan air, ada dua hal yang menjadi tolak ukur, yakni berdasarkan Kepmendagri No. 47 itu ada 20 persen, sedangkan dari BPP SPAM 25 persen, sehingga perlu diperjelas mana yang harus jadi patokan terkait perhitungan kehilangan air. Mengusulkan Kepmendagri No. 47 perlu direvisi, khususnya menyangkut kehilangan air.

**) Hj. Andi Cendranawati dari Pemda Kepulauan Selayar*

- Mengapa ada program penghapusan utang non pokok?
- Mengapa PDAM selalu punya utang? Padahal berdasarkan analisa, semua pelanggan rajin membayar karena jika lewat dari 1 bulan, maka PDAM langsung mencabut sambungan air.

**) Asdar Amin dari PDAM Makassar*

- Tarif listrik PDAM yang dihitung sama dengan industri, sementara pelanggan PDAM hampir 90 persen adalah pelanggan rumah tangga, 8 persen industri, dan 2 persen sisanya pelanggan sosial.
- Harga pokok bahan kimia yang sangat tergantung dari kurs dollar.
- Menekan semua biaya operasional tidak langsung seperti biaya perjalanan dinas.
- Bagaimana peran pemerintah daerah terhadap PDAM?

**) Yasir, Direktur PDAM Palopo*

- Mutasi-mutasi antar-direksi PDAM tidak ada kejelasan standar, menyebabkan para direksi tidak proaktif bekerja, karena sangat tergantung pemda.
- Dari segi efisiensi, biaya-biaya yang tidak perlu dicut sehingga PDAM Palopo mendapat laba.

Tanggapan dari Pembicara

Purwoko Hadi

PDAM adalah perusahaan. Perusahaan apapun dalam perkembangannya mesti berpartner dengan bank, jadi biasa kalau perusahaan meminjam. Masalahnya bisa bayar atau tidak. Pada waktu meminjam pasti ada persyaratan peminjaman, dan hukum apapun dalam meminjam itu diberlakukan bunga berbunga. Oleh karena itu, harus memenej pinjaman agar terbayar tepat waktu. Sebab jika tidak, maka akumulasi akan terjadi. PDAM adalah perusahaan yang dagangannya adalah hak asasi, sehingga diatur tidak boleh berlabab banyak. Namun, jika labanya tidak banyak maka untuk investasi mau tidak mau harus pinjam atau bermitra. Makanya, harus cerdas memanfaatkannya.

Mari kita membiasakan diri berbisnis, yakni membiasakan diri untuk mengelola dengan cara mengefisiensi pengeluaran. Margin dapat dicapai dengan dua cara, yakni melakukan dengan meningkatkan pendapatan atau menurunkan *cost* (biaya).

Oleh karena ini adalah bisnis hak asasi, maka sangat tergantung pada kepala daerah, sehingga perlu komitmen Pemda. Jika PDAM mau pendapatannya



Peserta Seminar Nasional saat melakukan registrasi.

bagus memang harus ada departemen air. Waktu periode pemerintahan Pak JK sebagai Wapres pernah mengusulkan departemen air, tapi juga ditolak.

Direktur Perpamsi juga sudah pernah mengusulkan ke PLN terkait tarif listrik agar tarif listrik itu bukan tarif perusahaan, tapi PLN menolak. Itulah sebabnya, PDAM harus pandai-pandai mengatur tarif subsidi silang dan tarif progressif untuk mengatur pengeluaran biaya listrik.

Terkait meter air pelanggan. Meter air PDAM itu lebih bodoh dari meter listrik PLN. Mengapa, karena meter listrik PLN jika tidak berfungsi atau rusak maka listrik juga terputus, maka yang rugi adalah pelanggan, sedangkan meter air PDAM ketika terjadi kerusakan atau tidak berfungsi airnya tetap mengalir sehingga yang rugi adalah PDAM, bukan pelanggan. Sehingga mesti dipahami oleh PDAM bahwa alatnya adalah alat bodoh. Jadi yang harus dilakukan adalah meteran yang rusak itu harus diganti, alasannya karena tiap bulan PDAM menarik tarif pemakaian meter terhadap pelanggan.

Regulasi PDAM sudah sangat baik dibanding sanitasi yang masih ompong. Sisa memperbaiki juknis dan SOP-nya. Air baku harus ditanggulangi dan diperhatikan saat ini oleh pemerintah, sehingga perlu segera diantisipasi PDAM.

Mengenai tarif, sebisa mungkin dikomunikasikan dengan pemerintah dan pelanggan. Jika bisa tidak perlu ada subsidi supaya PDAM tidak berutang lagi.

Agus Ranuprijambodo

Mengapa tema ini baru diangkat yang seharusnya sejak dari dulu? Supaya bisa mengajak PDAM yang lain, karena baru ada empat PDAM yang baru ikut program restrukturisasi sehingga yang lain juga bisa segera ikut.

Mengapa PDAM punya utang? Ceritanya panjang. Singkatnya karena yang membuat utang adalah orang-orang zaman dulu.

Mengenai penghapusan utang non pokok, Kementerian Keuangan juga melihat akan ada konsekuensi terhadap tidak akan mengenakan pajak terhadap penghapusan utang non pokok.

Benny Djumbana

Mengenai regulasi, ada tiga regulasi baru pada Permendagri 2007 yang akan diubah; yakni mengenai indikator kinerja kesehatan PDAM akan disatukan supaya sudut pandang dapat disatukan, seperti 20 persen dan 25 persen mengenai tingkat kehilangan air yang akan disatukan angkanya. Mengenai UU BUMD sampai saat ini hanya wacana, baru sekadar draf namun sempat dirapatkan. Mengenai Permendagri dua dari Kemendagri yang kemungkinan akan memasukkan dalam salah satu perubahan UU No. 32 tentang Pemerintahan Daerah.

Terkait pengenaan pajak akan ada kemudahan, karena jika tidak, akan menyulitkan. Akan tetapi pembuatan aturan itu tidak semudah yang dibayangkan, karena pada saat ikut FGD pun, sudah tiga kali dilakukan tapi belum selesai-selesai juga. Masih banyak perdebatan di sana-sini.

Mengenai penyediaan air baku memang pekerjaan yang berat, karena itu perlu peranan semua unsur, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun PDAM sendiri.

Kesimpulan Seminar dari Moderator (Madjid Sallatu)

1. Menyangkut air, target nasional kita sangat mengkhawatirkan jika batas waktunya sampai 2015 sesuai dengan MDG's.
2. Masih puluhan juta masyarakat Indonesia yang belum mengkonsumsi air yang laik.
3. Ternyata orang miskin harus membayar lebih mahal air bersih, ketimbang orang yang berpendapatan cukup atau lebih.
4. Hati-hati perusahaan PDAM yang sudah banyak untung, bisa dilirik oleh swasta, karena swasta sekarang ingin masuk dalam usaha-usaha penyediaan air.
5. Tampaknya restrukturisasi itu dapat meningkatkan kinerja PDAM, oleh karena itu ajakannya adalah mari kita mencoba memerhatikan restrukturisasi. Kita bisa meminta kesediaan BPKP sebuah rekomendasi untuk dapat memasang di websitenya, sehingga semua orang dapat mengakses dan bisa belajar bagaimana sistem dapat dijadikan sandaran terkait kinerja. Sehingga idealnya terkait kinerja dapat berkembang *self assesment* dari setiap PDAM dalam menyusun kinerjanya setiap tahun.
6. Kita harus malu ternyata NGO dari luar negeri jauh lebih memperhatikan air dibanding kita sendiri. Akan tetapi sebagai lembaga yang lebih banyak membantu, mungkin kita dapat berharap sebagaimana lembaga-lembaga

- partner* lainnya dapat menerbitkan sebuah buku-buku pintar/praktik cerdas tentang bagaimana menyusun kinerja dari PDAM.
7. Untuk merangkum semua ini, kita harus mengatakan bahwa dunia kedepan itu akan menghadapi tiga krisis besar; yakni krisis energi, pangan, dan air. Jika meneropong ke tanah air, mengenai energi sudah ada Kementrian yang menangani, sedangkan pangan sudah ada Badan. Namun air ini masih ditangani oleh eselon 2 yaitu Departemen PU. Jika dibawa ke masyarakat --dan ini mungkin gaungnya-- maukah kita memilih seorang kepala daerah yang visinya tentang pemanfaatan penggunaan air. Dan realitasnya belum pernah ada calon kepala daerah di Indonesia yang punya visi-misi tentang air.

Kata Penutup oleh Chairman Fajar Grup, HM. Alwi Hamu



Chairman Fajar Grup HM Alwi Hamu memberikan kata penutup di acara seminar nasional.

Air ini merupakan suatu hal yang mungkin belum terpikirkan le-bih jauh bagaimana mengatasinya.

Namun, potensi tanah air Indonesia ini patut disyukuri kehadiran Allah SWT, bahwa kemudahan-kemudahan itu ada, karena ketika kita

menusuk ke dalam tanah sekian meter akan muncul air. Sedangkan di negara-negara lain seperti Australia, air adalah sesuatu yang sangat luar biasa eksistensinya. Bayangkan, jika ada seorang anggota rumah tangga yang menyiram kembang dengan air di halaman rumahnya, itu akan ditangkap polisi lalu memasukkannya ke penjara. Begitupun juga mencuci mobil di halaman juga di tangkap polisi. Di negara-negara lain yang harga minyak/bensin jauh lebih murah dibanding harga air. Karena itu kita sangat patut bersyukur kehadiran Allah SWT atas hal ini.

Mengenai tema seminar kali ini memang bukan hal baru bagi kita semua, karena dulu waktu terjadi krisis, perbankan juga menghapuskan utang-utang non pokok pada nasabahnya, yang berguna untuk menolong para nasabahnya. Begitupun dengan penghapusan masalah utang non pokok pada PDAM. Semoga seminar ini dapat bermanfaat bagi PDAM ke depannya. (*)

Penganugerahan Otonomi Awards FIPO 2013



Wakil gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang, Chairman Media Fajar Grup HM Alwi Hamu (tengah) berfoto bersama dengan bupati dan walikota peraih oronomi awards 2013.

Semarak dan gegap gempita malam penganugerahan Otonomi Awards 2013 membahana tepat pukul 20.00 wita, di Sandeq Ballroom Hotel Clarion Makassar, sesaat setelah dara-dara cantik nan jelita dari UKM Seni Tari Unhas



Chairman Media Fajar Grup HM Alwi Hamu, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah, Wakil Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, Wakil Bupati Luwu Timur Thoriq Husler, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang.

tampil sebagai pembuka acara dengan membawakan Tari Sompereng Lino.

Acara yang dihadiri Wagub Sulawesi Selatan Ir. H Agus Arifin Nu'mang, MS, Chairman PT. Media Fajar HM Alwi Hamu, Deputy II Kementerian Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Karlansyah, Wakil Ketua Komisi Yudisial, Imam Anshori. Di

jajaran meja VVIP hadir pula, Staf Konjen AS Bidang Ekonomi dan Politik, Mrs. Joanne I Cossitt, Deputy Director Environment Office USAID, Mrs. Aurelia Micko, *Chief of Party* (CoP) USAID IUWASH, Mr. Louis O'brien dan *Chief of Party* (CoP) USAID KINERJA, Mrs. Elke Rapp.

Selain itu turut hadir beberapa bupati dan wakil bupati, diantaranya, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah, Bupati Pinrang A. Aslam Patonangi, Walikota Palopo, HM. Judas Amir, Bupati Takalar Burhanuddin Baharuddin, Bupati Barru, A. Idris Syukur, Wakil Bupati Selayar, Saiful Arif, Wakil Bupati Luwu Timur, Thoriq Husler, Wakil Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriyani, Wakil Bupati Sidrap, Dollah Mando, serta beberapa asisten dan kepala SKPD dari berbagai kabupaten kota se-Sulsel.



Dalam sambutannya Wakil Gubernur Agus Arifin Nu'mang menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya ke pada FIPO yang terus berupaya mendorong daerah untuk terus berkompetisi dalam memajukan masyarakatnya. Menurut Wagub Sulsel, bebe-



Tropi Grand awards 2013 saat diarak memasuki .

rapa kabupaten/kota di Sulsel yang berhasil menempati ranking dalam hal pengelolaan daerah, tidak terlepas dari peran FIPO dan PT. Media Fajar yang selalu memublikasikan kemajuan-kemajuan daerah.

Di tahun kelima ini daerah penerima *award* pada parameter khusus Layanan Air Minum diraih oleh PDAM Kota Palopo melalui program "Bersama PDAM, Air Bersih untuk Semua". Peringkat kedua hingga kelima adalah; PDAM Enrekang, PDAM Takalar, PDAM Parepare dan PDAM Makassar. Sementara itu penerima *award* untuk parameter khusus Layanan Sanitasi diraih oleh Kota Makassar melalui program "Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Sistem IPAL Komunal", disusul Kabupaten Enrekang, Selayar, Luwu Utara, dan Soppeng.



Melalui studi otonomi yang dilakukan FIPO, sedikitnya kita dapat menjumpai beberapa fokus penting dalam mencapai kemajuan berotonomi daerah. Melalui program monitoring akan dijumpai peluang, kendala, implikasi dan terobosan da-

lam menggapai kesuksesan melaksanakan otonomi daerah.

Melalui pengembangan model ini, terkandung makna bahwa setiap elemen



masyarakat merupakan stakeholder utama dalam memperjuangkan hak-hak dasarnya sekaligus akan memperkuat keberadaan *civil society*.

Melalui perhelatan Otonomi Awards akan membuka kesempatan untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan inovatif, kebijakan-kebijakan publik yang progresif. Kebijakan-kebijakan publik yang demikian diyakini akan mampu mendorong la-hirnya potensi menjadi produksi dan unggulan-unggulan bagi daerah.

Otonomi Awards akan memancing munculnya kapasitas *leadership* yang andal. Daerah-daerah yang dipimpin oleh kepala daerah kreatif dan supportif akan mampu mempercepat gerak pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

(*)



Tentang Penulis/Editor



SUKRIANSYAH S. LATIEF

Direktur Eksekutif FIPO

(sukriansyah88@yahoo.com)

Meski lembaga ini baru terbentuk tahun 2008 lalu, namun upaya untuk menghidupkan lembaga tersebut terus dirintisnya. Uki, begitu dia akrab disapa memulai karier di Harian Fajar sejak Tahun 1990 sebagai reporter, dan saat ini dipercaya sebagai Direktur Produksi dan SDM Media Fajar Grup dan Pimpinan Redaksi Harian Fajar. Kecintaannya pada dunia pendidikan tidak membuat dirinya berhenti pada jenjang pendidikan strata satu (S1) Strata dua (S2) dan S3 di bidang hukum terus digelutinya hingga berhasil meraih gelar doktor tahun 2009. Sebagai lembaga independen, Uki selalu menekankan agar para peneliti selalu menjaga independensi, kredibilitas dan kepercayaan. Dengan tiga hal tersebut, FIPO akan terus tumbuh sebagai suatu lembaga yang akan mendukung tujuan pelaksanaan otonomi daerah yakni terciptanya kesejahteraan masyarakat.



ERNIWATI

Direktur Eksekutif FIPO

(ernifiipo@gmail.com)

Lahir dari pasangan Sabaria (ibu) dan Muntu Taba (ayah) asal Takalar. Mengawali karier di Harian Fajar sebagai reporter pada tahun 1991. Tugas liputan seputar kasus hukum dan kriminal. Tahun 1997 diangkat menjadi redaktur/editor. Pada 2009 menjadi kepala litbang. Dua tahun kemudian menjadi kepala lembaga pengembangan sumber daya manusia (LP-SDM) PT Media Fajar. Dan 2012, dipercayakan menjadi Direktur The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO).

Menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) ekonomi tahun 1998 di Universitas 45 Makassar dan strata dua (S2) komunikasi bisnis di Unhas pada 2005.

FIPO merupakan lembaga yang mengusung harapan besar yaitu pencapaian pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Untuk itu, lembaga yang didirikan Harian Fajar ini menyediakan panggung bagi 24 kabupaten/kota untuk menunjukkan kemampuannya dalam menyusun program-program yang inovatif.

Tentang Penulis/Editor



YUSUF AR

Divisi Pengembangan FIPO

(jusufar@gmail.com)

Pimpinan Media Fajar mengamanahinya tanggung jawab pada divisi pengembangan FIPO sejak medio 2013, setelah 17 tahun “berkeliling” karir sebagai jurnalis di lingkungan Harian Fajar dan grup. Lelaki kelahiran Bantaeng 41 tahun lalu ini lebih akrab dengan panggilan Ucu. Dia memulai karir sebagai reporter magang di Harian Fajar pada 1996 ketika masih sebagai pemimpin redaksi WASHILAH; koran kampus IAIN (UIN) Alauddin Makassar. Minatnya yang besar pada dunia jurnalistik mendorongnya untuk studi di sela waktu ketika bertugas di kantor perwakilan Fajar Jakarta, hingga meraih gelar magister ilmu komunikasi kajian komunikasi politik dan media Universitas Mercu Buana.

Pernah merangkap tugas Koordinator Liputan dan Kepala Litbang Redaksi Fajar 2003-2005. Terpilih sebagai peserta Short Course Independent Press and Rule of Law, Amherst, Massachusetts, Amerika Serikat, 2000. Awal 2009, sepulang bertugas di Jakarta selama empat tahun, dia menjabat Wakil Pemimpin Redaksi Fajar sekaligus Wakil Direktur Produksi dan SDM. Menjadi anggota Delegasi Bilateral Inter-Media Dialogue (BIMD) Indonesia-Australia, difasilitasi Divisi Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, November 2010. Lalu pada 2011-2013 sebagai Direktur Pemberitaan Fajar TV. Beberapa bulan setelah Dewan Pers menerbitkan sertifikat kepadanya sebagai Wartawan Utama, pada Juli 2013 Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menetapkan sebagai penguji kompetensi jurnalis.



NURDIN TAPPA

Sekretaris Eksekutif FIPO

(nurdintp_st@yahoo.com)

Lahir di Belawa-Wajo, 12 Februari 1974. Alumni Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin ini bergabung di Harian Fajar sebagai staf Penelitian dan Pengembangan pada Maret 2003. Tahun 2005 ditunjuk sebagai staf Lembaga Pengembangan SDM PT. Media Fajar. Di lembaga ini dia ditugaskan melaksanakan workshop, lokakarya dan kegiatan pelatihan bagi wartawan/karyawan Media Fajar Group agar menjadi insan-insan profesional yang cerdas. Berdirinya FIPO tidak terlepas dari peran pria ini. Saat The Fajar Institute of Pro Otonomi terbentuk, dia diberi tanggung jawab mengirim proposal ke beberapa lembaga donor untuk berpartisipasi pada kegiatan penelitian FIPO. Kerja kerasnya membuahkan hasil saat Pemprov Sulsel dan Canadian International Development Agency (CIDA) setuju untuk bekerjasama. Tekadnya yang besar untuk menyukseskan program-program FIPO membuat dia senantiasa hidup bersemangat.

Tentang Penulis/Editor



ANDI MATTINGARAGAU TENRIGAU

Peneliti FIPO

(andimattinragau@yahoo.com)

Lahir di Sabbang-Luwu Utara, 13 Maret. Sewaktu mahasiswa dipercaya sebagai Ketua Badan Penerbitan Pers dan Jurnalistik Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (BPPJ-PMII) Cabang Ujung Pandang periode 1997-1998. Tahun 1998 menyelesaikan studi di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Jurusan Akuntansi. Pernah bekerja di Perusahaan Daerah Luwu tahun 2000-2001. Tahun 2001 sebagai pengajar Universitas Andi Djemma Palopo. Alumni pada Program Studi Manajemen Keuangan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar tahun 2003 ini pernah bekerja di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar 2004-2007. Sejak tahun 2008 hingga sekarang selain sebagai peneliti FIPO juga mengajar pada sejumlah perguruan tinggi. Saat ini juga mendalami Ilmu Ekonomi untuk Program Doktor di Universitas Hasanuddin.



DASMAN SAMANG

Peneliti FIPO

(dasman.samang@yahoo.com)

Lahir di Bulukumba, 13 Februari 1986. Menempuh pendidikan sejak SD sampai SMA di Kabupaten Bulukumba. Gelar Sarjana Pendidikan (S1) diperoleh di jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Selama kuliah, aktif di organisasi kemahasiswaan dengan menjabat Ketua Umum Maperwa Civis Hukum Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Universitas Negeri Makassar (UNM), 2006-2007. Ketua Bidang Kaderisasi Study Club (SC) Al-Furqan, FIS UNM. Ketua Bidang Komunikasi Study Club Forum Study Islam Raudathul Ilmi, UNM, 2009-2010. Aktif di berbagai lembaga survei sosial, politik, dan Ekonomi. Bergabung di The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) akhir tahun 2010 sebagai staf peneliti.

Tentang Penulis/Editor



IHSANUL AMRI

Peneliti FIPO

(esan_amri@yahoo.com)

Ihsanul Amri, Lahir di Batujai (Lombok Tengah) 15 Mei 1979. Meraih gelar Sarjana Ilmu Politik di FISPOL UNHAS pada tahun 2004. Saat ini sedang melanjutkan studi magister pada program studi Sosiologi di Pasca Sarjana UNHAS. Pengalamannya dalam penelitian diawali ketika bergabung dengan lembaga Active Society Institute (AcSI) dan IMDeV research Institute di Makassar. Ke dua lembaga inilah yang kemudian mengantarkannya terlibat dalam berbagai survey oleh LSI (Lembaga Survey Indonesia), LP3ES, Puskapol-UI dan PSKK-UGM. Kerjasama dalam penelitian dengan lembaga donor juga pernah dilakukannya bersama LGSP (Local Government Support Programme) dalam program Local Government Assesment (LGA). Pernah terlibat sebagai fasilitator dalam pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa di Kabupaten Maros dan Mamuju Utara serta sebagai peneliti dalam studi pelimpahan kewenangan dari Kabupaten kepada kecamatan di Kabupaten Mamuju Utara. Tahun 2012 bergabung sebagai peneliti FIPO (The Fajar Institute of Pro otonomy).



ANDI RISDAWATI AP

Peneliti FIPO

(andirisda_ap@yahoo.com)

Alumni jurusan matematika Universitas Negeri Makassar Tahun 2011 ini, lahir di Palopo tanggal 7 Oktober 1989. Di lingkungan kampus, sempat bergabung dengan Lembaga Penelitian Mahasiswa (LPM) Penalaran UNM dan dipercaya sebagai Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan pada periode 2010-2011. Keterlibatannya dalam kegiatan-kegiatan penelitian baik internal maupun eksternal kampus ketika masih kuliah, menjadi bekal menapaki karirnya sebagai peneliti FIPO sejak akhir tahun 2011.

Tentang Penulis/Editor



ABD. HAFID

Peneliti FIPO

(*antropologhafidz@gmail.com*)

Lahir di Makassar 31 Desember 1981. Meraih gelar Sarjana Ilmu Sosial di Jurusan Antropologi FISIP Unhas pada 2008. Saat ini sedang menempuh pendidikan magister pada program studi Antropologi di Pascasarjana Unhas.

Sejak mahasiswa aktif di organisasi internal dan eksternal kampus, untuk internal mulai dari tingkat Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), tingkat Fakultas (BEM dan Maperwa), dan tingkat Universitas (Forum BEM Unhas, sebelum ada Lembaga Mahasiswa Tingkat Universitas), sedang untuk eksternal kampus aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur.

Pengalaman dalam bidang penelitian sudah aktif sejak masih mahasiswa, dari sebagai Peneliti, Surveyor, Enumerator, Editor, Quality Control (QC) data hingga Supervisor team. Adapun lembaga-lembaga yang menaungi dan mempekerjakan adalah Active Society Institute (AcSi), Lembaga Survey Indonesia (LSI), Lembaga Survey Meter Yogyakarta, CDC John Hopkins Bloomberg School of Public Health (JHUCCP), PT. Survey Indonesia, Dirjen Pendidikan Usia Dini Direktorat Pendidikan Non Formal dan Informal, dan PSKK-UGM. Saat ini aktif juga sebagai pengajar di FISIPOL Universitas Indonesia Timur (UIT). Awal tahun 2013 tergabung sebagai peneliti FIPO (The Fajar Institute of Pro Otonomi).



Buku ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban publik sekaligus media diseminasi informasi bahwa otonomi daerah adalah suatu keniscayaan di Indonesia. Secara formal, otonomi daerah memang seringkali diartikan sebagai penyerahan kewenangan pusat ke daerah, atau lazim disebut desentralisasi. Konsekuensi formal, tentu saja, daerah memiliki hak prerogatif untuk menjalankan administrasi pemerintah sendiri dan potensi yang dimiliki. Namun, secara substantif, makna otonomi daerah lebih dari sekadar terpenuhinya hak-hak otonom yang demikian itu. Sejak diimplementasikan secara resmi tahun 2001, otonomi daerah telah memicu tumbuh suburnya praktik-praktik cerdas di daerah. Pemerintah daerah berada dalam ruang kebebasan mengekspresikan potensi yang dimilikinya. Menyiasati kekurangan dan memaksimalkan potensi, sekecil apapun potensi itu, adalah tindakan kreatif yang dalam sudut pandang FIPO biasanya disebut inovasi. Hasilnya, program inovatif yang digagas daerah jauh lebih efektif mengatasi masalah-masalah di daerah ketimbang program pusat. Memang pengalaman sentralisasi selama berpuluh tahun menjadi pelajaran berharga bahwa pusat [Jakarta] tidak mampu mendesain pembangunan daerah-daerah di Indonesia. Jakarta tidak saja kurang memiliki informasi tentang potensi dan kebutuhan seluruh daerah, tetapi juga kurang memiliki komitmen politik mendistribusikan potensi-potensi pusat untuk memenuhi kebutuhan daerah.



The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO), adalah institusi independen yang secara sungguh-sungguh dan terus menerus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah. FIPO didirikan Harian Fajar pada 16 Juni 2008, seminggu setelah otonomi daerah resmi diberlakukan. Visi FIPO adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) demi kemajuan Sulawesi Selatan. Sebagai penjabaran dari visi, FIPO mengembangkan misi yakni mendorong inovasi dan kreativitas pemerintah kabupaten dan kota agar berlangsung kemajuan berkebebasan dan kebebasan berkemajuan (*development of freedom and freedom for development*). Karena itu, FIPO mengambil peran mendorong pemerintah kabupaten dan kota mengembangkan praktik-praktik cerdas pada parameter kehidupan ekonomi, pelayanan publik, performa politik lokal, dan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap tahun FIPO mengapresiasi dan menganugerahi trofi Otonomi Awards kepada kabupaten dan kota yang memiliki kinerja terbaik pada setiap parameter.